



## **SIARAN PERS**

### **TAHUN 2024: PENGUATAN STRATEGI DAN AKSI KOLABORASI DALAM P4GN**

Jakarta, 23 Desember 2024

---

Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menjalankan tugas di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Perkembangan situasi dunia yang begitu cepat dan tidak terduga, membuat kejahatan narkotika semakin kompleks dan sulit untuk dikendalikan, seiring dengan munculnya modus-modus baru dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terus berkembang.

Kejahatan narkotika yang kian meresahkan dan membahayakan masa depan bangsa ini telah mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan permasalahan narkoba sebagai salah satu isu strategis yang diangkat dalam misi Asta Cita ke-7. Presiden juga menguatkan "Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba" menjadi program prioritas ke-6 dalam rangka mewujudkan visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Sebagai tindak lanjut atas komitmen dan tekad Presiden, Kemenkopolkam telah membentuk "Desk Pemberantasan Narkoba" sebagai langkah untuk mengakselerasi penanganan permasalahan narkoba pada instansi pemerintah terkait. BNN tentunya sangat mendukung upaya-upaya tersebut, sehingga upaya penanganan permasalahan narkoba akan lebih terkonsolidasi dengan baik.

Pada tahun transisi perencanaan pembangunan nasional baik jangka panjang maupun jangka menengah ini, BNN melakukan transformasi arah kebijakan dan strategi dalam penanganan permasalahan narkotika untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari ancaman narkoba dan mewujudkan visi Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba).

Kepala BNN RI Komjen Pol Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si., menetapkan 5 (lima) arah kebijakan dan strategi yang menjadi fokus dalam upaya penanganan permasalahan narkotika, yaitu (1) penguatan kolaborasi (2) penguatan intelijen (3) penguatan wilayah pesisir dan perbatasan negara (4) penguatan kerja sama dengan negara perbatasan, serta (5) tematik dan ikonik. Kelimanya adalah langkah strategis yang sangat relevan dalam memperkuat penanganan permasalahan narkotika di Indonesia untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan menyeluruh.

#### **PENGUATAN KOLABORASI**

Penguatan kolaborasi dilakukan BNN dengan membangun komunikasi dan koordinasi bersama pemangku kepentingan untuk pelaksanaan P4GN, serta mendorong pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan P4GN di wilayah. Kolaborasi ini penting, sebab permasalahan narkotika melibatkan berbagai aspek yang saling terkait dan kompleks,

sehingga membutuhkan pendekatan yang holistik dan multi-sektoral dalam penanganannya.

Untuk itu, mengawali tahun 2024, Kepala BNN RI bersama Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama melakukan audiensi dengan sejumlah pimpinan kementerian/lembaga terkait guna mengelaborasi dan menyinergikan program P4GN, baik dalam upaya pencegahan, pemberantasan, maupun rehabilitasi penyalahguna narkoba.

Dalam upaya pencegahan, BNN melakukan penguatan kolaborasi dengan lembaga pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat, untuk membangun kesadaran dan pemahaman mengenai bahaya narkoba sehingga mampu mengendalikan diri, menghindari dari, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Melalui Deputi Bidang Pencegahan, BNN memanfaatkan instrumen program Advokasi serta Informasi dan Edukasi melalui pendekatan yang tidak hanya bersifat informatif tetapi juga melibatkan transformasi perilaku dan pola pikir, terutama di kalangan generasi muda sebagai kelompok yang rentan terhadap pengaruh narkoba, sebagaimana data survei penyalahgunaan narkoba tahun 2023 yang menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba kategori pernah pakai secara signifikan pada kalangan kelompok umur antara 15-24 tahun, yaitu dari 1,44% pada 2021 menjadi 1,52% pada 2023. Hal ini menjadi perhatian khusus. Sebab pelajar merupakan generasi penerus pembangunan bangsa yang menentukan nasib arah perjalanan bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

Advokasi berperan penting dalam membangun kesadaran masyarakat dan mendorong kebijakan yang mendukung pencegahan penyalahgunaan narkoba, yang digencarkan BNN melalui program prioritas nasional “Desa Bersinar” (berbasis sumber daya pembangunan desa) dan “Sekolah Bersinar” (pendidikan anti narkoba di kalangan remaja). Pada periode 2024, telah terbentuk **344 Desa Bersinar** yang di dalamnya terdapat **1.040 Keluarga Bersinar**.

Desa Bersinar mengintegrasikan program pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi secara menyeluruh di tingkat masyarakat dengan melibatkan partisipasi aktif kementerian dan lembaga terkait, perangkat daerah, serta masyarakat setempat, dengan mengedepankan pendekatan berbasis komunitas.

Kolaborasi yang dilakukan BNN bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menghasilkan kebijakan, yaitu menjadikan program P4GN sebagai salah satu prioritas dalam penggunaan anggaran dana desa, sehingga aparat desa terfasilitasi untuk melaksanakan program P4GN di wilayahnya masing-masing.

Sedangkan pada program Sekolah Bersinar, telah terbentuk **1.135 Sekolah Bersinar** yang melibatkan **2.073 guru/tenaga pengajar** serta **1.873 pelajar** yang dilatih BNN untuk menjadi mentor bagi para teman sebaya, melalui pelatihan pengembangan *soft skill* serta dialog interaktif remaja. Hal ini dianggap sangat efektif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda, karena remaja cenderung dipengaruhi oleh teman sebaya dalam banyak aspek kehidupan termasuk dalam perilaku sosial dan pilihan gaya hidup. Kehadiran teman sebaya sebagai mentor yang memiliki pengalaman positif dapat memberikan pengaruh yang lebih besar dalam mengubah pola pikir dan perilaku remaja.

Sementara itu dalam hal Informasi dan Edukasi, dilakukan BNN untuk menyebarkan informasi yang akurat dan edukatif tentang dampak buruk penyalahgunaan narkoba serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Pada tahun 2024, **BNN melaksanakan sosialisasi P4GN kepada 9.908.291 orang** yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejatinya juga dilakukan BNN melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berperan sangat penting dalam menciptakan ketahanan kolektif terhadap ancaman narkoba. Dengan pemberdayaan masyarakat, BNN tidak hanya memberikan informasi tentang bahaya narkoba, tetapi juga membangun kesadaran dan kapasitas masyarakat untuk mencegah, mengidentifikasi, dan menangani masalah narkoba secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga masyarakat memiliki ketanggapsiagaan terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Untuk itu, BNN melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat menjalankan fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait serta pelibatan berbagai komponen masyarakat dalam program “Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN)” dan program “Pengentasan Kawasan Rawan di Wilayah Perbatasan dan Pesisir Indonesia”.

Program KOTAN dirancang sebagai strategi terpadu untuk meningkatkan peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tanggap terhadap ancaman narkoba. Pada periode 2024, BNN telah memfasilitasi implementasi program KOTAN di **173 kabupaten/kota** di **34 provinsi di Indonesia**. Fokus utama dari program ini adalah meningkatkan ketahanan masyarakat melalui penguatan ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, kewilayahan, kelembagaan, dan hukum. Salah satu bentuk intervensi yang dilakukan untuk mendukung Kebijakan KOTAN adalah melalui pengembangan kapasitas bagi Penggiat P4GN yang menjadi perpanjangan tangan BNN dalam menciptakan lingkungan Bersinar di wilayahnya masing-masing. Saat ini terdapat **11.537 penggiat P4GN** yang tersebar di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikan.

Sementara itu, program Pengentasan Kawasan Rawan di Wilayah Perbatasan dan Pesisir Indonesia dilakukan melalui pengembangan kapasitas masyarakat dengan bimbingan teknis *Life Skill* sebagai upaya mengembangkan potensi masyarakat di kawasan rawan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari ancaman kejahatan narkoba secara berkelanjutan.

Pemulihan kawasan rawan menggandeng stakeholder baik instansi pemerintah maupun swasta (dunia usaha), baik berupa sinergi program/kegiatan, pemanfaatan dana hibah, ataupun *Corporate Social Responsibility* (CSR). Adapun jenis pelatihan yang dilakukan pada program pemulihan kawasan rawan bervariasi disesuaikan dengan kearifan lokal wilayah masing-masing. Pada tahun 2024, BNN telah melakukan intervensi di **66 kawasan rawan** dengan jumlah **masyarakat yang dibina sebanyak 1.510 orang** dan **452 orang di antaranya telah beralih profesi** dari “pekerjaan” yang berkaitan dengan narkoba ke profesi yang lebih positif dan produktif. Sedangkan dalam pengembangan potensi masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang melalui budidaya komoditi alternatif bersama stakeholder, telah dilakukan pada **lahan seluas 983,2 ha** dengan melibatkan **358 petani**.

Selain melakukan upaya pencegahan, tindakan represif terhadap jaringan sindikat narkoba merupakan langkah penting yang diambil oleh BNN untuk memberantas peredaran gelap narkoba yang semakin meluas. Tindakan ini diperlukan guna menghentikan operasional jaringan narkoba dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan narkoba, terutama yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan perdagangan narkoba secara ilegal.

Penguatan kolaborasi di bidang penegakan hukum dilakukan BNN dengan institusi penegak hukum, seperti TNI, Polri, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan

Pemasyarakatan, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kolaborasi BNN dengan institusi penegak hukum terkait telah berhasil menggagalkan upaya peredaran gelap narkoba yang melibatkan jaringan sindikat narkoba nasional maupun internasional terorganisir.

Sepanjang tahun 2024, BNN telah mengungkap **27 jaringan sindikat narkoba**, yang terdiri dari **13 jaringan sindikat narkoba nasional** dan **14 jaringan sindikat internasional**.

Sindikat jaringan narkoba nasional membangun jejaringnya dengan melintasi pulau dan provinsi. Mereka membangun tentakelnya di kota dan desa tanpa mengenal batas identitas suku, agama, bahasa, dan lainnya. BNN berhasil mengungkap sindikat peredaran narkoba antar Provinsi **Aceh - Sumatera Utara - Jawa Timur - dan Nusa Tenggara Barat**. Pada kasus ini BNN menangkap lima pelaku di NTB dan Jawa Timur. Sementara kiloan sabu yang dikirim dari Aceh atau Sumatera tersebut dipasarkan di wilayah Bali dan NTB. Keterhubungan sindikat antar provinsi di Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara tersebut adalah fakta lain jika sindikasi jaringan di tingkat domestik adalah rumit.

**Pada tahun 2024, BNN juga berhasil mengungkap peredaran ganja antar provinsi melewati pesisir barat Sumatera.** Ganja yang diproduksi di Provinsi Aceh diedarkan di Sumatera Barat dan sekitarnya di mana pengendali berada di Sumatera Utara. Semua yang terlibat pada sindikat ini, baik yang ada di Sumatera Barat ataupun yang ada di Sumatera Utara berhasil diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara di **Kabupaten Bangka Barat**, BNN juga berhasil mengungkap penyelundupan **55 Kg ganja yang berasal dari Mandailing Natal, Sumatera Utara**.

Adapun terhadap **sindikat internasional**, perlu disampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa sindikat narkoba internasional merupakan ancaman nyata bagi keutuhan bangsa Indonesia. Di tahun ini, BNN berhasil mengungkap penyelundupan narkoba yang menggunakan sarana transportasi udara dengan modus **pengiriman paket antar negara seperti yang dilakukan oleh jaringan Gregor Haas** yang menjadi bagian dari **jaringan kartel narkoba Amerika Selatan**, tepatnya kartel Sinaloa yang berpusat di Meksiko. Kasus ini memberikan fakta jika kartel narkoba internasional telah dan terus berupaya mencengkeram tentakelnya di manapun, termasuk di Indonesia.

Pada kasus lain, BNN berhasil mengamankan lebih dari seratus kilogram narkoba sabu yang diselundupkan dengan menggunakan **Kapal LCT (Landing Craft Tank)** yang berlayar dari negara tetangga menuju Indonesia dan dihentikan di perairan Batam. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa sindikat menggunakan berbagai macam metode apapun demi suksesnya upaya penyelundupan termasuk menggunakan **kapal dengan bobot 500 ton dan panjang kapal 45 meter atau panjangnya hampir 2 kali panjang lapangan basket**.

Kelompok penyelundup internasional juga selalu memanfaatkan celah penyelundupan di tengah gelapnya laut yang menjadi perbatasan Indonesia. Dengan menggunakan kapal-kapal tradisional yang terbuat dari kayu dan *fiber glass*, mereka menyelundupkan puluhan atau ratusan kilogram sabu ke berbagai daerah di Indonesia. Seperti yang dilakukan **kelompok penyelundup dari Tawau-Malaysia, lalu melintasi Kalimantan Utara dan berlabuh ke Donggala, Sulawesi Selatan**. BNN menangkap para penyelundup yang biasa membawa **±20 Kg sabu** di setiap kali aksinya.

Di tahun 2024 ini juga, BNN bersama Bea dan Cukai juga berhasil menggagalkan peredaran narkoba yang dilakukan para **penyelundup di Bengkalis, Provinsi Riau** yang dalam **sekali beraksi menyelundupkan sekitar 30 Kg sabu**. Sementara di **Kabupaten**

**Aceh Timur**, BNN juga mengagalkan penyelundupan narkoba dari Thailand yang diangkut dengan menggunakan **kapal tradisional dengan jumlah barang bukti yang sama, sekitar 30 Kg sabu**.

Sementara di sepanjang **perbatasan Kalimantan Barat**, BNN bersama Bea dan Cukai serta Pamantas berkali-kali menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu dan ekstasi di berbagai pintu masuk. Sekitar seratus kilogram narkoba jenis sabu dan ekstasi berhasil disita dengan mengamankan **6 (enam) tersangka WNI dan 3 (tiga) tersangka WNA**.

Data-Data tersebut menunjukkan seriusitas jaringan penyelundup narkoba yang beroperasi di wilayah perbatasan laut dan darat. Mereka terkoneksi secara mendalam antara satu kelompok dengan kelompok lain. Mereka juga telah berhasil membangun modalitasnya sehingga mampu untuk terus menyelundupkan narkoba. Sebab itu, BNN bersama instansi lainnya akan terus melakukan operasi di wilayah tersebut seperti yang telah dilakukan di sepanjang wilayah pesisir Aceh mulai dari Sabang hingga ke Aceh Tamiang, begitu juga di sepanjang pesisir timur Sumatera Utara, wilayah pesisir dan pulau-pulau yang menjadi pintu penyelundupan di wilayah Riau, seperti di Pulau Rupat dan Pulau Bengkalis. Operasi yang sama juga dilakukan di Kepulauan Riau, seperti operasi BNN di Batam.

BNN juga melakukan operasi di wilayah perbatasan lainnya karena menghadapi situasi jaringan yang sama-sama rumitnya seperti yang telah dilakukan di Nunukan, Tarakan, Palu, Donggala, dan daerah-daerah lainnya. BNN akan melakukan operasi sepanjang tahun, 24 x 7 hari dalam seminggu.

Indonesia adalah pasar berbagai jenis narkoba dan sekaligus sebagai produsen narkoba serta obat-obatan berbahaya. Dengan cara berkolaborasi dengan instansi terkait, BNN berhasil mengungkap **rumah produksi narkoba yang mampu memproduksi narkoba dalam jumlah besar terutama untuk jenis PCC, Tramadol dan Trihexphenidyl** di Serang, Banten. Jenis narkoba yang dijual murah tersebut diedarkan di wilayah Jawa dan Kalimantan, terutama di kalangan pelajar dan kelompok remaja lainnya. Selain itu, BNN juga berhasil mengungkap pabrik besar obat keras lainnya di Sumedang, Jawa Barat. Di kasus ini, BNN bersinergi dengan baik sehingga kasus kemudian ditangani oleh Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut. Bahkan dari kasus ini, pihak Kepolisian berhasil membongkar pabrik narkoba ilegal serupa di Tasikmalaya dan Bandung, Jawa Barat.

Selain adanya WNA yang terlibat dalam penyelundupan narkoba ke wilayah Indonesia, BNN juga berhasil mengungkap penyelundupan narkoba yang menjadikan Indonesia sebagai wilayah transit atau Hub, di mana narkoba kemudian diselundupkan ke negara lain. Pada kasus ini, pengendali operasi penyelundupan adalah WNI yang berada di luar negeri dan telah ditetapkan sebagai DPO atas nama Dewi Astutik.

Pada kasus ini, BNN terus bekerja sama dengan Kepolisian, badan narkoba negara sahabat dan instansi terkait di dalam dan luar negeri untuk memburu serta membawa DPO tersebut ke Indonesia, agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam pengungkapan kasus kejahatan narkoba, BNN hanya berfokus pada pengungkapan jaringan sindikat narkoba secara komprehensif dan tidak melakukan penangkapan terhadap penyalahguna narkoba.

Adapun jumlah kasus yang diungkap oleh BNN pada tahun 2024 adalah sebanyak **618 kasus tindak pidana narkoba dan 2 kasus *clandestine laboratory* narkoba**, dengan jumlah tersangka yang diamankan sebanyak **974 orang dari tindak pidana narkoba dan 11 tersangka dari kasus *clandestine laboratory***. Sementara itu, jumlah tersangka yang masuk dalam **Daftar Pencarian Orang (DPO) BNN** pada tahun 2024 adalah sebanyak **363**

**orang.** Dari daftar panjang DPO tersebut, BNN berhasil mengamankan **26 orang di antaranya**, sedangkan **337 orang DPO lainnya masih dalam proses pencarian dan pengejaran.**

Dari seluruh kasus yang diungkap, BNN menyita barang bukti narkoba, di antaranya berupa **710.980,59 gram sabu; 2.178.034,61 gram ganja; 1.077,69 gram ganja sintetis; 290.737,23 butir dan 138.404,29 gram ekstasi; 2.760 gram heroin; 4.335,34 gram kokain; 971.000 butir dan 2.800 gram PCC;** serta **1.300 ml cairan prekursor narkoba.**

Sementara itu, dalam hal eradikasi lahan ganja yang tumbuh subur di wilayah Barat Indonesia, BNN telah melakukan **pemusnahan terhadap 135.000 m<sup>2</sup> lahan ganja** dengan berat **tanaman ganja basah mencapai 35,5 ton.** Berdasarkan seluruh barang bukti narkoba yang berhasil diamankan pada tahun 2024, **BNN menyelamatkan lebih dari 4 juta jiwa anak bangsa** dari potensi ancaman penyalahgunaan narkoba.

Di samping melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan narkoba, penguatan kolaborasi juga dilakukan BNN dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan penelusuran tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil kejahatan narkoba, sebagai upaya memiskinkan para bandar agar tidak dapat kembali melakukan bisnis gelap narkoba. Dari kolaborasi ini, sebanyak **13 kasus TPPU** yang melibatkan **15 tersangka** dengan barang bukti **aset yang disita senilai total Rp 111.535.843.866,-** berhasil diungkap.

Di tengah maraknya upaya peredaran gelap narkoba yang semakin masif dilakukan oleh jaringan sindikat narkoba, BNN juga terus melakukan pengawasan terhadap perkembangan peredaran *new psychoactive substances* (NPS) bersama dengan Kementerian Kesehatan. Saat ini teridentifikasi **1.261 jenis NPS yang beredar di dunia**, dan **172 di antaranya telah masuk ke Indonesia.** Dari 172 jenis NPS yang beredar di Indonesia, sebanyak 167 jenis telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika, sehingga telah memiliki ketetapan hukum.

Kolaborasi lainnya dalam bidang hukum juga dilakukan BNN dalam proses revisi Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan kompleksitas permasalahan narkoba, BNN menilai penerapan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 belum maksimal karena adanya persoalan ditinjau dari faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum sehingga perlu dikaji kembali guna menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan efektif. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan kebijakan dengan tantangan dan dinamika permasalahan narkoba.

BNN bersinergi dengan Polri, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menyusun usulan penggabungan RUU Narkoba dan Psikotropika dengan menitikberatkan kepada upaya penyelamatan penyalahguna narkoba melalui rehabilitasi, dekriminialisasi penyalahguna narkoba, serta penguatan kelembagaan BNN sebagai *leading sector* dalam P4GN.

BNN berharap revisi Undang-Undang Narkoba dapat menyeimbangkan pendekatan represif dengan kebijakan yang lebih humanis terhadap penyalahguna narkoba, sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada, salah satunya over kapasitas di lembaga pamasarakatan, serta memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum guna menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dalam P4GN.

Saat ini rancangan terakhir RUU tentang Tata Kelola dan Pengendalian Narkotika dan Psikotropika telah disiapkan oleh Kementerian Hukum dan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025, untuk dilakukan pembahasan lanjutan bersama DPR.

Sebagai bentuk penanganan permasalahan narkotika secara holistik, penguatan kolaborasi juga dilakukan BNN dalam upaya rehabilitasi. Pemulihan penyalahguna narkotika melalui rehabilitasi menjadi kunci dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi bukan hanya berfokus pada pemulihan fisik, tetapi juga pada pemulihan mental dan sosial korban penyalahgunaan narkotika agar dapat kembali berkontribusi pada masyarakat.

Sepanjang tahun 2024, **BNN melalui Deputi Bidang Rehabilitasi telah merehabilitasi 13.852 penyalahguna narkotika dari total 40.900 individu yang mengakses layanan pemulihan di Indonesia.** Jika dibandingkan dengan angka prevalensi penyalahguna narkotika nasional tahun 2023, yang mencapai 3,3 juta jiwa, jumlah penyalahguna narkotika yang mengakses layanan rehabilitasi tergolong sangat sedikit. Sebab itu, untuk memastikan akses rehabilitasi yang merata dan berstandar tinggi, BNN melakukan penguatan kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem rehabilitasi yang berkelanjutan serta berkualitas.

Sebagai komitmen jaminan mutu dan kualitas Layanan Rehabilitasi dalam menyelamatkan pecandu dan korban penyalahguna narkotika, BNN melakukan penguatan terhadap lembaga rehabilitasi BNN maupun mitra BNN menuju standar nasional Indonesia. Pada tahun 2024 terdapat **216 lembaga rehabilitasi BNN dan 649 lembaga rehabilitasi mitra yang bekerja sama dengan BNN disiapkan agar dapat menyelenggarakan layanan sesuai standar Rehabilitasi Nasional (SNI), melalui peningkatan kemampuan kepada 225 orang dan sertifikasi kompetensi kepada 106 petugas rehabilitasi.** Sesuai Dengan tugas dan fungsi BNN dalam memberikan dukungan/fasilitasi Lembaga Rehabilitasi, pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, **terdapat 367 lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Rehabilitasi Nasional.**

Keberhasilan program rehabilitasi membutuhkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Oleh karena itu, selain mengembangkan fasilitas rehabilitasi di balai dan loka rehabilitasi serta berkolaborasi dengan lembaga mitra, BNN juga memperluas layanan rehabilitasi melalui unit rehabilitasi dari kelompok masyarakat, yaitu Intervensi Berbasis Masyarakat. Pada tahun 2024 **telah terbentuk 418 unit IBM dengan jumlah petugas agen pemulihan sebanyak 2.217 orang.**

Terkait penguatan kolaborasi sebagai komitmen bersama dalam P4GN, sepanjang tahun 2024 BNN dengan *stakeholders* secara resmi telah **menandatangani 56 dokumen kerja sama nasional** yang terdiri dari instansi pemerintah, BUMN, lingkungan pendidikan, dan komponen masyarakat. MoU tersebut memberikan landasan hukum dan operasional yang jelas dalam melaksanakan berbagai inisiatif P4GN bersama secara terorganisir dan terarah.

## PENGUATAN INTELIJEN

Penguatan intelijen merupakan salah satu langkah strategis untuk mendukung kebijakan P4GN. Penguatan ini mencakup berbagai upaya yang difokuskan pada pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang akurat dan relevan guna mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan narkoba secara lebih efektif.

Langkah penguatan intelijen dilakukan BNN melalui pembangunan big data intelijen guna mendukung kebijakan P4GN, serta intensifikasi kegiatan *surveillance*, peningkatan kapasitas SDM intelijen, dan penguatan *drugs signature analysis*.

Pembangunan big data intelijen menjadi langkah utama dalam penguatan intelijen di BNN. Big data ini memungkinkan pengumpulan informasi yang sangat besar dari berbagai sumber, baik dari dalam negeri maupun internasional. Data tersebut meliputi pola peredaran narkoba, identifikasi sindikat narkoba, hingga data terkait jaringan distribusi dan pengguna. Big data intelijen BNN tidak hanya digunakan untuk pemberantasan peredaran gelap narkoba saja melainkan sebagai sumber data untuk menentukan intervensi yang tepat dalam rangka P4GN.

*Surveillance* atau pemantauan yang intensif merupakan upaya penting dalam penguatan intelijen. Kegiatan ini melibatkan pemantauan terhadap individu, kelompok, dan jaringan yang terlibat dalam peredaran narkoba, baik melalui teknologi canggih (seperti pemantauan digital) maupun secara langsung (seperti pengawasan lapangan). Dengan intensifikasi kegiatan *surveillance*, BNN dapat mendeteksi lebih cepat aktivitas yang mencurigakan dan mengidentifikasi lokasi-lokasi strategis yang digunakan untuk penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba.

Peningkatan kapasitas SDM intelijen sangat penting dalam memastikan bahwa petugas intelijen BNN memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk mengidentifikasi dan mengatasi ancaman narkoba. Pelatihan, pendidikan, dan pembaruan pengetahuan terus menerus dilakukan untuk memastikan bahwa petugas intelijen memiliki kemampuan yang sesuai dengan perkembangan situasi dan teknologi terkini. Pada tahun 2024 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) BNN memperkuat peran petugas intelijen melalui pendekatan pelatihan berbasis kebutuhan nyata.

Dengan menggandeng mitra strategis seperti Australian Federal Police (AFP), Drug Enforcement Administration (DEA), dan lembaga internasional lainnya, PPSDM BNN tidak hanya meningkatkan kapabilitas teknis dan analitis para pegawai, tetapi juga membangun jejaring kolaborasi yang relevan untuk menghadapi ancaman lintas batas. Di tingkat nasional, kerja sama dengan lembaga seperti LAN RI, ANRI, dan PPATK memperkuat fondasi pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan domestik.

Fokus utama pada intelijen tidak hanya meningkatkan keahlian individu dalam pengumpulan informasi dan analisis, tetapi juga memperkuat strategi kolektif dalam perang melawan peredaran gelap narkoba.

Penguatan *drugs signature analysis* adalah salah satu langkah strategis yang dilakukan BNN untuk mengidentifikasi narkoba berdasarkan karakteristik atau ciri khas tertentu yang dimiliki oleh setiap jenis narkoba. Melalui penguatan *drugs signature analysis* yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Narkoba, BNN dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengungkap asal-usul, jalur distribusi, dan pola peredaran narkoba yang ada. Pendekatan ini memungkinkan BNN untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dan akurat terhadap narkoba yang beredar di masyarakat.

## **PENGUATAN WILAYAH PESISIR DAN PERBATASAN NEGARA**

Penguatan wilayah pesisir dan perbatasan negara dilakukan dengan memperkuat ketahanan masyarakat pada wilayah pesisir dan perbatasan negara untuk menangkal penyelundupan narkoba serta dengan memperkuat sistem pengawasan jalur perlintasan antar negara. Selama periode tahun 2024, BNN membangun kekuatan masyarakat wilayah pesisir dan perbatasan negara dengan melibatkan seluruh stakeholder melalui kegiatan Deklarasi Anti Narkoba sebagai bentuk pernyataan sikap dan perlawanan masyarakat pesisir dan perbatasan negara terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Deklarasi ini diserukan oleh masyarakat, mulai dari wilayah Tanjung Balai-Sumatera Utara, Dumai-Riau, Muka Kuning-Batam, Prabumulih-Sumatera Selatan, dan Kotawarngin Timur-Kalimantan Tengah.

## **PENGUATAN KERJA SAMA DENGAN NEGARA PERBATASAN**

Penguatan kerja sama dengan negara perbatasan dilakukan oleh BNN melalui pembangunan koordinasi yang lebih intensif dengan aparat penegak hukum di negara tetangga. Pada tahun 2024, Kepala BNN RI melakukan kunjungan kerja ke Malaysia, Singapura, dan Timor Leste untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum antar negara melalui penguatan sistem perbatasan, berbagi informasi intelijen, serta melakukan operasi bersama

Dengan memanfaatkan pendekatan yang terkoordinasi dan berkelanjutan, penguatan kerja sama dengan negara perbatasan diharapkan dapat menciptakan jaringan pertahanan yang lebih solid dalam memutuskan jalur distribusi narkoba, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan angka peredaran narkoba di wilayah Indonesia dan negara tetangga.

Selain memperkuat kerja sama dengan negara perbatasan, BNN juga aktif menghadiri berbagai pertemuan internasional sebagai bagian dari upaya untuk menunjukkan eksistensi dan komitmennya dalam penanggulangan narkoba di tingkat global. Selama periode 2024, BNN berperan serta dalam pertemuan internasional, seperti: *2<sup>nd</sup> Workshop on Development of ASEAN Cooperation Projects for ASOD Focal Points*; *The 13<sup>th</sup> ASEAN Airport Interdiction Task Force (AAITF)*; *The 16<sup>th</sup> ASEAN Drug Monitoring Network Meeting (The 16<sup>th</sup> ADMN) Meeting*; *The 67<sup>th</sup> Commission on Narcotic Drugs (The 67<sup>th</sup> CND)*; *Regional Workshop of Early Warning*; *Colombo Plan Drug Advisory Program National Secretariats Meeting (CPDAP NSM)*; *UNODC Global Smart Forensics Regional Workshop for East and Southeast Asia 2024*; *International Drug Enforcement Conference (IDEC) International ke-38*; *ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) ke-45*; *The Anti-Drug Liaison Officials' Meeting for International Cooperation (ADLOMICO)*; *The 3<sup>rd</sup> Intersessional Meeting of the Commission on Narcotic Drugs*; *The 9<sup>th</sup> ASEAN Seaport Interdiction Task Force*; dan *Invitation to the Regional Seminar on International Cooperation Against Drug Trafficking*.

## TEMATIK DAN IKONIK

Strategi tematik dan ikonik dilakukan melalui intervensi langsung di lapangan dengan pendekatan yang disesuaikan dengan permasalahan narkoba yang aktual di masing-masing wilayah. Melalui pendekatan tematik, BNN dapat menargetkan permasalahan yang spesifik, seperti penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, pekerja, atau masyarakat di daerah rawan. Sedangkan pendekatan ikonik mengarahkan perhatian pada wilayah atau isu-isu yang menjadi simbol atau representasi dari masalah narkoba yang lebih besar, seperti daerah perbatasan atau kota-kota besar yang menjadi pusat peredaran.

Strategi tematik dan ikonik bertujuan untuk memaksimalkan dampak dari setiap program dengan merespon permasalahan yang ada di masyarakat dengan cepat dan tepat. Intervensi langsung ini mencakup berbagai aktivitas seperti kampanye pencegahan, rehabilitasi berbasis komunitas, serta pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kesadaran dan partisipasi aktif dalam memerangi narkoba. Dengan demikian, upaya yang dilakukan tidak hanya bersifat umum, tetapi juga terarah pada masalah spesifik yang memerlukan solusi terfokus.

## PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

Selain melakukan penanganan permasalahan narkoba melalui lima strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan secara matang, BNN juga menyadari pentingnya penguatan kelembagaan sebagai bagian integral dari upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Penguatan kelembagaan merupakan salah satu faktor kunci untuk memastikan bahwa setiap langkah dan kebijakan yang diambil dapat terlaksana dengan baik dan berdampak maksimal.

Sebagai leading institution dalam P4GN, BNN terus berupaya memperkuat kapasitas internal melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM), penguatan struktur organisasi, serta pemanfaatan teknologi guna mewujudkan transformasi pelayanan publik yang berkualitas

Dalam rangka pemenuhan kompetensi pegawai BNN sebagai upaya meningkatkan SDM, pada tahun 2024, PPSDM BNN telah memberikan **pendidikan dan pelatihan kepada 1.733 pegawai**. Sementara itu, dalam hal penguatan struktur organisasi dilakukan melalui penerapan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk membangun budaya kerja yang bersih, profesional, dan berintegritas tinggi di lingkungan BNN. Ini diwujudkan melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan langkah-langkah nyata untuk mencegah segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Zona Integritas menuju WBK merupakan upaya konkret pemerintah dalam mendorong terciptanya birokrasi yang bersih dan melayani demi keberlanjutan pembangunan yang adil dan berkeadilan. Pada tahun 2024, penghargaan WBK diberikan kepada Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, BNN Kota Denpasar, dan BNN Kabupaten Purbalingga sebagai hasil dari komitmen yang berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan pelayanan publik.

Sebagai upaya penguatan organisasi, Pada tahun 2024, BNN mengajukan permohonan pembentukan BNN Kabupaten/Kota kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, di beberapa wilayah strategis di Indonesia. Pembentukan BNN Kabupaten/Kota ini merupakan langkah penting dalam memperluas cakupan P4GN di tingkat daerah, serta memberikan respons yang lebih cepat dan tepat terhadap

permasalahan narkoba yang semakin kompleks. Hingga saat ini terdapat 17 wilayah yang mengusulkan pembentukan BNN Kabupaten/Kota dan 9 di antaranya menjadi wilayah prioritas yang diusulkan BNN untuk dapat segera dibentuk BNN Kabupaten/Kota. Kesembilan wilayah tersebut adalah, Kab. Morowali Utara, Kab. Sambas, Kab. Buru, Kab. Banyuwangi, Kab. Konawe, Kab. Kutai Timur, Kab. Pahuwato, Kab. Kotawaringin Timur, dan Kab. Sidrap.

BNN menyadari bahwa meskipun langkah-langkah strategis dalam P4GN telah disusun dengan matang pada tahun 2024, tantangan yang dihadapi dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba ke depan masih sangat besar. Sebab itu, upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Namun, meskipun masih banyak hambatan yang harus dihadapi, BNN berkomitmen untuk terus memperkuat dan mengoptimalkan program-program P4GN, serta menggali potensi kolaborasi lebih lanjut dengan berbagai instansi, masyarakat, dan lembaga internasional.

Dengan semangat dan komitmen yang kuat, dalam aksi penyelamatan dan perlindungan masyarakat Indonesia dari kejahatan narkoba, BNN bertekad untuk menghadapi tantangan ini dan berfokus pada pencapaian hasil yang lebih maksimal dan berdampak dalam upaya mewujudkan Indonesia Bersinar, menyongsong Indonesia Emas 2045.

#indonesiabersinar

#indonesiadrugfree

**BIRO HUMAS DAN PROTOKOLL BNN**

**DATA PENDUKUNG  
PRESS RELEASE AKHIR TAHUN 2024  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**I. BIDANG PENCEGAHAN**

Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) terus memainkan peran strategis dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Indonesia. Melalui instrumen program advokasi serta Informasi dan Edukasi, Deputi Bidang Pencegahan berkomitmen membangun kesadaran publik akan bahaya narkoba serta menciptakan lingkungan yang kondusif guna mencegah peredaran dan penyalahgunaannya. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga melibatkan transformasi perilaku dan pola pikir, terutama di kalangan generasi muda sebagai kelompok yang rentan terhadap pengaruh narkoba.

**A. DATA AKTIVITAS ADVOKASI**

1. Pembentukan Desa Bersinar Dan Keluarga Bersinar) BNN PUSAT dan BNNP/BNNK.

Desa Bersinar merupakan program Prioritas Nasional yang dilaksanakan oleh Direktorat Advokasi. Kesadaran akan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diharapkan dapat terbangun dari lingkungan paling bawah yaitu di wilayah desa. Peran aktif masyarakat dan perangkat desa dalam membentengi lingkungan baik secara individu maupun secara kelompok dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap program pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Selama tahun 2024 direktorat Advokasi sudah melakukan bimbingan, Asistensi dan Supervisi serta monitoring terhadap pelaksanaan pembentukan Desa Bersinar kepada para jajaran di Tingkat Provinsi dan juga Kabupaten / Kota dengan total desa mencapai **344 Desa Bersinar**.

Selain Desa Bersinar, melalui program ketahanan keluarga anti narkoba juga dibentuk keluarga bersinar di seluruh wilayah yang dilaksanakan oleh jajaran BNN Provinsi dan BNN Kabupaten / Kota dengan latar belakang keluarga yang bervariasi. Pada periode tahun 2024 ini telah dilaksanakan program ketahanan keluarga dimana terbentuk **Keluarga Bersinar** sebanyak **1.040 anggota keluarga**.

2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi, Membangun Jejaring, Asistensi, Intervensi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi serta Bimbingan Teknis pada tingkat BNN Pusat dan BNNP/BNNK.

NO	KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH AUDIENCE
1	Rakor	1,318	16,862
2	Membangun Jejaring	419	23,296
3	Asistensi	558	36,739
4	Intervensi	656	15,213
5	Supervisi	53	791
6	Monev	334	8,534
7	Bimtek	341	25,349
<b>TOTAL</b>		<b>3,679</b>	<b>126,784</b>

Dengan rincian sebagai Berikut :

NO	PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PESERTA
1	PUSAT	180	32,791
2	ACEH	198	4,513
3	BALI	123	1,536
4	BANGKA BELITUNG	28	533
5	BANTEN	47	1,274
6	BENGKULU	40	497
7	DI YOGYAKARTA	54	2,245
8	DKI JAKARTA	64	1,323
9	GORONTALO	60	954
10	JAMBI	39	660
11	JAWA BARAT	248	6,243
12	JAWA TENGAH	337	2,998
13	JAWA TIMUR	394	23,261
14	KALIMANTAN BARAT	159	2,517
15	KALIMANTAN SELATAN	223	2,563
16	KALIMANTAN TENGAH	43	602
17	KALIMANTAN TIMUR	48	795
18	KALIMANTAN UTARA	42	726
19	KEPULAUAN RIAU	56	1,109
20	LAMPUNG	35	612
21	MALUKU	5	97
22	MALUKU UTARA	41	881
23	NUSA TENGGARA BARAT	282	21,438
24	NUSA TENGGARA TIMUR	37	588
25	PAPUA	112	2,950
26	PAPUA BARAT	3	23
27	RIAU	43	618
28	SULAWESI BARAT	27	388
29	SULAWESI SELATAN	32	492
30	SULAWESI TENGAH	97	1,542
31	SULAWESI TENGGARA	64	1,236
32	SULAWESI UTARA	40	668
33	SUMATERA BARAT	41	516
34	SUMATERA SELATAN	135	2,949
35	SUMATERA UTARA	302	4,646
<b>JUMLAH</b>		<b>3,679</b>	<b>126,784</b>

**B. DATA AKTIFITAS INFORMASI DAN EDUKASI BNN PUSAT DAN BNNP/BNNK (MEDIA CETAK, MEDIA PENYIARAN, MEDIA ONLINE DAN MEDIA KONVENSIONAL)**

1. Jumlah Kegiatan Informasi dan Edukasi Tahun 2024

NO	PROVINSI	MOBIL KIE	MEDIA CETAK	MEDIA SIAR	MEDIA ONLINE	MEDIA KONVEN SIONAL	JUMLAH
1	Pusat	93	0	23	246	3	365
2	ACEH	321	24	5	25	16	391
3	BALI	482	2	10	93	6	593

NO	PROVINSI	MOBIL KIE	MEDIA CETAK	MEDIA SIAR	MEDIA ONLINE	MEDIA KONVEN SIONAL	JUMLAH
4	BANGKA BELITUNG	107	2	1	8	34	152
5	BANTEN	220	10	3	127	19	379
6	BENGKULU	72	9	0	149	5	235
7	DI YOGYAKARTA	563	0	15	234	6	818
8	DKI JAKARTA	173	3	4	22	68	270
9	GORONTALO	10	1	0	55	7	73
10	JAMBI	115	5	1	1	8	130
11	JAWA BARAT	1,224	27	80	417	179	1,927
12	JAWA TENGAH	1,318	229	93	752	593	2,985
13	JAWA TIMUR	1,292	43	36	590	245	2,206
14	KALIMANTAN BARAT	135	10	4	3	189	341
15	KALIMANTAN SELATAN	286	16	55	855	133	1,345
16	KALIMANTAN TENGAH	30	2	5	2	68	107
17	KALIMANTAN TIMUR	197	84	24	8	37	350
18	KALIMANTAN UTARA	157	11	6	4	7	185
19	KEPULAUAN RIAU	210	6	60	375	3	654
20	LAMPUNG	331	0	14	23	6	374
21	MALUKU	3	0	0	0	2	5
22	MALUKU UTARA	127	13	1	209	21	371
23	NUSA TENGGARA BARAT	260	20	3	166	28	477
24	NUSA TENGGARA TIMUR	51	13	3	232	8	307
25	PAPUA	81	1	4	377	18	481
26	PAPUA BARAT	18	0	1	0	4	23
27	RIAU	91	4	1	30	57	183
28	SULAWESI BARAT	32	25	1	1	0	59
29	SULAWESI SELATAN	402	0	38	0	3	443
30	SULAWESI TENGAH	102	0	6	2	5	115
31	SULAWESI TENGGARA	76	2	10	19	63	170
32	SULAWESI UTARA	69	6	14	74	50	213
33	SUMATERA BARAT	10	8	0	0	11	29
34	SUMATERA SELATAN	184	10	13	499	47	753
35	SUMATERA UTARA	259	30	40	603	704	1,636
<b>TOTAL</b>		<b>9,101</b>	<b>616</b>	<b>574</b>	<b>6,201</b>	<b>2,653</b>	<b>19,145</b>

## 2. Jumlah Sasaran/Peserta Kegiatan Informasi Dan Edukasi Tahun 2024

NO	PROVINSI	MOBIL KIE	MEDIA CETAK	MEDIA SIAR	MEDIA ONLINE	MEDIA KONVEN SIONAL	JUMLAH
1	Pusat	30,273	0	4,760	114,233	235	149,501
2	ACEH	31,757	207	21,412	734,120	11,016	798,512
3	BALI	58,455	3	20,374	129,726	270	208,828
4	BANGKA BELITUNG	13,305	400	600	674	5,703	20,682
5	BANTEN	33,211	1,547	5,400	38,900	3,403	82,461
6	BENGKULU	13,705	29	0	370,041	180	383,955
7	DI YOGYAKARTA	79,841	0	15,100	266,738	1,245	362,924
8	DKI JAKARTA	30,269	5	21,003,000	2,123,500	9,845	23,166,619
9	GORONTALO	415	1	0	436	50	902

NO	PROVINSI	MOBIL KIE	MEDIA CETAK	MEDIA SIAR	MEDIA ONLINE	MEDIA KONVEN SIONAL	JUMLAH
10	JAMBI	14,425	5,025	0	0	140	19,590
11	JAWA BARAT	170,683	50,832	5,646,679	1,453,425	46,193	7,367,812
12	JAWA TENGAH	289,949	956	896,766	3,267,039	117,216	4,571,926
13	JAWA TIMUR	219,415	25,094	174,820	1,488,882	57,260	1,965,471
14	KALIMANTAN BARAT	16,429	261	6,189	4,497	23,065	50,441
15	KALIMANTAN SELATAN	42,455	40	661,500	3,076,418	13,035	3,793,448
16	KALIMANTAN TENGAH	14,779	2	80,000	104,320	8,302	207,403
17	KALIMANTAN TIMUR	31,866	12,604	83,250	1,100	4,805	133,625
18	KALIMANTAN UTARA	24,847	1,218	71,000	3,810	1,428	102,303
19	KEPULAUAN RIAU	28,935	14	191,105	130,124	30	350,208
20	LAMPUNG	50,579		112,620	21,877	1,160	186,236
21	MALUKU	105	0	0	0	130	235
22	MALUKU UTARA	19,401	215	5,000	660,756	1,979	687,351
23	NUSA TENGGARA BARAT	39,326	148	15,100	542,050	6,133	602,757
24	NUSA TENGGARA TIMUR	8,502	15	4,314	75,621	1,443	89,895
25	PAPUA	12,546	1	2,695,264	32,098	3,261	2,743,170
26	PAPUA BARAT	2,858	0	50	0	120	3,028
27	RIAU	11,137	7	257	276,062	29,780	317,243
28	SULAWESI BARAT	2,435	18	1,000	0	0	3,453
29	SULAWESI SELATAN	57,777	0	54,000	0	130	111,907
30	SULAWESI TENGAH	14,208	0	500	563	1,050	16,321
31	SULAWESI TENGGARA	7,772	23	4,200	190	7,737	19,922
32	SULAWESI UTARA	20,968	904	4,450	61,622	2,665	90,609
33	SUMATERA BARAT	2,110	11	0	0	1,481	3,602
34	SUMATERA SELATAN	24,808	70	5,650	769,631	8,173	808,332
35	SUMATERA UTARA	271,684	10,417	245,002	829,001	68,770	1,424,874
<b>TOTAL</b>		<b>1,691,230</b>	<b>110,067</b>	<b>32,029,362</b>	<b>16,577,454</b>	<b>437,433</b>	<b>50,845,546</b>

Jumlah masyarakat yang menerima informasi baik secara elektronik maupun non elektronik di bidang pencegahan sebesar **50.845.546** angka tersebut diperoleh dari **19.145** kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Kedeputusan Bidang Pencegahan di seluruh wilayah BNNP dan BNN Kota / Kabupaten.

Selain program prioritas nasional yang dilaksanakan oleh Direktorat Advokasi yang disebut diatas, Deputi Bidang Pencegahan juga melaksanakan prioritas nasional yang lain. Program prioritas nasional yang menasar ke remaja dan Pendidikan, yaitu melalui kegiatan Pelatihan Pengembangan Soft Skill serta Dialog Interaktif

Remaja. Dari kegiatan tersebut telah terbentuk sekolah bersinar sebanyak **1.135 sekolah** dengan melibatkan **2.073 guru / tenaga pengajar** serta terdapat **1.873 pelajar** yang dijadikan sebagai mentor bagi para teman sebaya mereka. (data terlampir)

Penyebaran Informasi dan Edukasi kepada masyarakat juga dilakukan melalui penyuluhan maupun sosialisasi P4GN. Selama tahun 2024 sudah dilaksanakan **37.789 sosialisasi P4GN** dengan audiens sebanyak **9.908.291 peserta** yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia.

## II. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BNN RI melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Dalam upaya mitigasi ancaman narkoba, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat berhasil menjalankan fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait serta melibatkan berbagai komponen masyarakat. Capaian ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) dan program pengentasan kawasan rawan di wilayah perbatasan dan pesisir Indonesia.

Program KOTAN dirancang sebagai strategi terpadu untuk meningkatkan peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tanggap terhadap ancaman narkoba. Hingga saat ini, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah berhasil memfasilitasi implementasi program KOTAN di 173 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia. Fokus utama dari program ini adalah meningkatkan ketahanan masyarakat melalui penguatan ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, kewilayahan, kelembagaan, dan hukum.

Sebagai negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan beberapa negara, wilayah perbatasan dan pesisir Indonesia sering menjadi jalur rawan penyelundupan narkoba. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah memprioritaskan program pemberdayaan di kawasan-kawasan tersebut. Fokus kegiatan di wilayah ini mencakup:

- Pengembangan keterampilan masyarakat untuk menciptakan mata pencaharian alternatif guna mengurangi kerentanan terhadap peredaran narkoba.
- Pendampingan komunitas lokal untuk membangun ketahanan sosial terhadap ancaman narkoba.
- Penguatan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Bea Cukai, Imigrasi, dan pemerintah daerah, dalam mengawasi jalur perbatasan.

Dalam pelaksanaannya, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat juga telah menjalin kerja sama erat dengan kementerian/lembaga lain, organisasi masyarakat, serta sektor swasta untuk memperkuat implementasi program. Salah satunya yaitu PT PG Rajawali II Cirebon yang telah bersinergi dengan BNN dalam program *Alternative Development* pada masyarakat di kawasan rawan narkoba di 3 (tiga) Desa dengan status Kerawanan Bahaya di Kabupaten Indramayu, telah melatih 75 orang melalui kegiatan Bimtek *Life Skill* Budidaya Tanaman Tebu dan telah bermitra diberikan pinjam pakai lahan, hasilnya dibeli oleh PT PG Rajawali II.

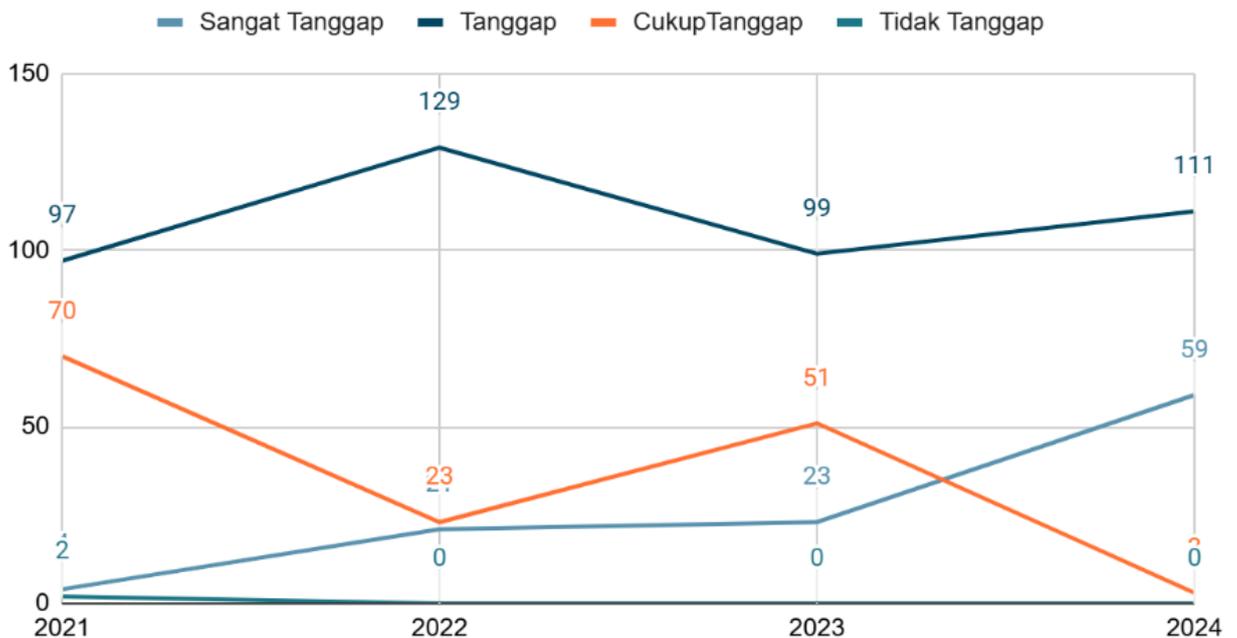
Kerjasama juga telah dilakukan dengan PT. Ujang Jaya International (UJI) dalam hal pembelian komoditas Kopi Program GDAD di Kabupaten Gayo Lues sejak tahun 2022 dan pada tahun 2024 ini untuk memperluas areal penanaman Kopi telah diberikan bantuan program CSR berupa sarana produksi dan benih unggul (Kopi) dari PT UJI dan Starbucks yang diperuntukkan pada luas lahan 937,7 ha dan jumlah petani 195 org di Kabupaten Gayo Lues.

Program P4GN pada Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat memiliki sasaran meningkatnya ketanggap-siagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan indikator kinerja jumlah kabupaten/kota berkategori "tanggap ancaman narkoba" yang memiliki target 30 kota pada Tahun 2020, target 60 kota pada Tahun 2021, target 90 kota pada Tahun 2022, target 120 kota pada Tahun 2023, dan target 150 kota pada Tahun 2024. Penilaian ketanggapan Kabupaten/Kota pada tahun 2024 didasarkan pada perhitungan Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKOTAN) yang dilakukan pada 173 Kabupaten/Kota yang tersebar di 34 provinsi.

Tabel 1. Indikator Kinerja Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten/ Kota berkategori Tanggap Ancaman Narkoba	150 Kabupaten/ Kota	170 Kabupaten/ Kota	113,33

Gambar 1. Perbandingan Capaian KOTAN 2021 - 2024



Dari perhitungan Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKOTAN) didapatkan hasil, yaitu sejumlah 59 Kabupaten/Kota berstatus “Sangat Tanggap”, 111 Kabupaten/Kota berstatus “Tanggap”, dan 3 Kabupaten/Kota berstatus “Cukup Tanggap”. Pencapaian IKOTAN 2024 adalah 3,107 masuk dalam kategori Tanggap dengan pencapaian mutu B. Secara nasional dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya, IKOTAN Tahun 2024 mengalami kenaikan angka indeks sebesar 0,257. Adapun secara rinci dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Perhitungan Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKOTAN)

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	INDEKS 2024 (SKALA 1-4)	KATEGORI
1	Aceh	3.062	Tanggap
2	Gayo Lues	3.457	Sangat Tanggap
3	Aceh Selatan	3.378	Sangat Tanggap
4	Pidie	3.178	Tanggap

NO	PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA	INDEKS 2024 (SKALA 1-4)	KATEGORI
5	Pidie Jaya	2.955	Tanggap
6	Aceh Tamiang	2.765	Tanggap
7	Bireuen	2.976	Tanggap
8	Kota Sabang	2.975	Tanggap
9	Kota Lhokseumawe	2.913	Tanggap
10	Kota Langsa	3.514	Sangat Tanggap
11	Banda Aceh	3.010	Tanggap
12	Sumatera Utara	3.129	Tanggap
13	Mandailing Natal	2.863	Tanggap
14	Deli Serdang	3.249	Tanggap
15	Simalungun	3.165	Tanggap
16	Serdang Bedagai	3.190	Tanggap
17	Kota Pematangsiantar	2.689	Tanggap
18	Kota Asahan	2.860	Tanggap
19	Kota Tebing Tinggi	3.159	Tanggap
20	Kota Tanjungbalai	3.465	Sangat Tanggap
21	Tapanuli Selatan	3.208	Tanggap
22	Kota Binjai	2.988	Tanggap
23	Langkat	3.153	Tanggap
24	Kota Gunung Sitoli	3.201	Tanggap
25	Labuhanbatu Utara	3.448	Sangat Tanggap
27	Karo	2.895	Tanggap
27	Batu Bara	3.522	Sangat Tanggap
28	Sumatera Barat	3.276	Sangat Tanggap
29	Kota Payakumbuh	2.983	Tanggap
30	Kota Sawahlunto	3.029	Tanggap
31	Pasaman Barat	3.629	Sangat Tanggap
32	Solok	3.480	Sangat Tanggap
33	Sumatera Selatan	3.192	Tanggap

NO	PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA	INDEKS 2024 (SKALA 1-4)	KATEGORI
34	Kota Pagar Alam	3.118	Tanggap
35	Kota Lubuklinggau	2.890	Tanggap
36	Prabumulih	3.651	Sangat Tanggap
37	Ogan Ilir	3.038	Tanggap
38	Ogan Komering ilir	3.417	Sangat Tanggap
39	Empat Lawang	3.293	Sangat Tanggap
40	Muara Enim	3.194	Tanggap
41	Musi Rawas	2.851	Tanggap
42	Ogan Komering Ulu Timur	3.109	Tanggap
43	Bengkulu	2.803	Tanggap
44	Bengkulu Selatan	2.823	Tanggap
45	Kota Bengkulu	2.781	Tanggap
46	Jambi	3.011	Tanggap
47	Batang Hari	3.179	Tanggap
48	Tanjung Jabung Timur	2.906	Tanggap
49	Kota Jambi	2.957	Tanggap
50	Riau	3.193	Tanggap
51	Kota Dumai	2.911	Tanggap
52	Kota Pekanbaru	3.366	Sangat Tanggap
53	Pelalawan	3.785	Sangat Tanggap
54	Kuantan Sengingi	2.881	Tanggap
55	Kepulauan Riau	3.329	Sangat Tanggap
56	Karimun	3.380	Sangat Tanggap
57	Kota Batam	3.639	Sangat Tanggap
58	Tanjung Pinang	3.005	Tanggap
59	Bangka Belitung	3.207	Tanggap
60	Bangka Selatan	3.180	Tanggap
61	Bangka	3.404	Sangat Tanggap
62	Kota Pangkalpinang	3.118	Tanggap

NO	PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA	INDEKS 2024 (SKALA 1-4)	KATEGORI
63	Belitung	3.082	Tanggap
64	Lampung	3.071	Tanggap
65	Tanggamus	2.901	Tanggap
66	Lampung selatan	3.587	Sangat Tanggap
67	Kota Metro	2.982	Tanggap
68	Way Kanan	3.247	Tanggap
69	Lampung Timur	2.828	Tanggap
70	Banten	3.431	Sangat Tanggap
71	Kota Tangerang Selatan	3.700	Sangat Tanggap
72	Kota Cilegon	3.254	Sangat Tanggap
73	Kota Tangerang	3.339	Sangat Tanggap
74	DKI Jakarta	2.985	Tanggap
75	Kota Jakarta Timur	2.844	Tanggap
76	Kota Jakarta Selatan	3.129	Tanggap
77	Kota Jakarta Utara	2.969	Tanggap
78	Jawa Barat	2.986	Tanggap
79	Karawang	2.767	Tanggap
80	Sukabumi	2.784	Tanggap
81	Bogor	2.822	Tanggap
82	Sumedang	2.806	Tanggap
83	Tasikmalaya	2.841	Tanggap
84	Ciamis	2.795	Tanggap
85	Kuningan	2.880	Tanggap
86	Kota Cirebon	2.694	Tanggap
87	Kota Depok	3.456	Sangat Tanggap
88	Cianjur	3.262	Sangat Tanggap
89	Garut	3.520	Sangat Tanggap
90	Kota Bandung	3.361	Sangat Tanggap
91	Kota Cimahi	3.517	Sangat Tanggap

<b>NO</b>	<b>PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>INDEKS 2024 (SKALA 1-4)</b>	<b>KATEGORI</b>
92	Bandung Barat	2.833	Tanggap
93	DI Yogyakarta	3.273	Sangat Tanggap
94	Kota Yogyakarta	3.351	Sangat Tanggap
95	Bantul	3.711	Sangat Tanggap
96	Sleman	2.640	Cukup Tanggap
97	Jawa Tengah	3.319	Sangat Tanggap
98	Kendal	3.231	Tanggap
99	Temanggung	3.396	Sangat Tanggap
100	Banyumas	3.207	Tanggap
101	Purbalingga	2.889	Tanggap
102	Batang	3.252	Sangat Tanggap
103	Cilacap	3.694	Sangat Tanggap
104	Magelang	3.493	Sangat Tanggap
105	Kota Surakarta	3.034	Tanggap
106	Kota Tegal	3.781	Sangat Tanggap
107	Jawa Timur	3.312	Sangat Tanggap
108	Malang	3.464	Sangat Tanggap
109	Tulungagung	3.466	Sangat Tanggap
110	Pasuruan	3.707	Sangat Tanggap
111	Sumenep	3.630	Sangat Tanggap
112	Gresik	3.481	Sangat Tanggap
113	Lumajang	3.481	Sangat Tanggap
114	Kediri	2.993	Tanggap
115	Tuban	2.936	Tanggap
116	Kota Malang	2.849	Tanggap
117	Kota Surabaya	3.327	Sangat Tanggap
118	Kota Kediri	3.467	Sangat Tanggap
119	Sidoarjo	3.250	Sangat Tanggap
120	Kota Batu	2.907	Tanggap

<b>NO</b>	<b>PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>INDEKS 2024 (SKALA 1-4)</b>	<b>KATEGORI</b>
121	Trenggalek	3.635	Sangat Tanggap
122	Nganjuk	3.279	Sangat Tanggap
123	Kota Mojokerto	2.983	Tanggap
124	Blitar	3.694	Sangat Tanggap
125	Bali	3.038	Tanggap
126	Badung	3.292	Sangat Tanggap
127	Gianyar	2.839	Tanggap
128	Klungkung	2.804	Tanggap
129	Buleleng	3.726	Sangat Tanggap
130	Karangasem	3.028	Tanggap
131	Kota Denpasar	2.903	Tanggap
132	NTT	2.725	Tanggap
133	Kota Kupang	2.792	Tanggap
134	Belu	2.719	Tanggap
135	Rote Ndao	2.668	Tanggap
136	NTB	3.191	Tanggap
137	Sumbawa Barat	2.978	Tanggap
138	Bima	3.178	Tanggap
139	Mataram	3.820	Sangat Tanggap
140	Sumbawa	2.868	Tanggap
141	Kalimantan Selatan	3.194	Tanggap
142	Barito Kuala	3.532	Sangat Tanggap
143	Kota Banjarbaru	3.150	Tanggap
144	Balangan	3.304	Sangat Tanggap
145	Tanah Laut	3.382	Sangat Tanggap
146	Tabalong	2.833	Tanggap
147	Hulu Sungai Selatan	3.006	Tanggap
148	Hulu Sungai Utara	3.513	Sangat Tanggap
149	Kota Banjarmasin	3.016	Tanggap

<b>NO</b>	<b>PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>INDEKS 2024 (SKALA 1-4)</b>	<b>KATEGORI</b>
150	Kalimantan Barat	3.056	Tanggap
151	Bengkayang	2.971	Tanggap
152	Kubu Raya	3.521	Sangat Tanggap
153	Sintang	3.109	Tanggap
154	Sanggau	2.852	Tanggap
155	Kota Singkawang	2.957	Tanggap
156	Kota Pontianak	3.111	Tanggap
157	Mempawah	2.965	Tanggap
158	Kalimantan Timur	2.931	Tanggap
159	Samarinda	3.126	Tanggap
160	Balikpapan	3.045	Tanggap
161	Bontang	2.755	Tanggap
162	Kalimantan Tengah	3.253	Sangat Tanggap
163	Kotawaringin Barat	3.908	Sangat Tanggap
164	Kota Palangka Raya	2.780	Tanggap
165	Kalimantan Utara	2.850	Tanggap
166	Kota Tarakan	2.867	Tanggap
167	Nunukan	2.841	Tanggap
168	Sulawesi Selatan	3.356	Sangat Tanggap
169	Tana Toraja	3.170	Tanggap
170	Bone	3.532	Sangat Tanggap
171	Kota Palopo	3.353	Sangat Tanggap
172	Sulawesi Tengah	2.889	Tanggap
173	Banggai Kepulauan	3.183	Tanggap
174	Poso	3.012	Tanggap
175	Tojo Una-Una	2.845	Tanggap
176	Kota Palu	2.754	Tanggap
177	Morowali	2.762	Tanggap
178	Donggala	3.031	Tanggap

<b>NO</b>	<b>PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>INDEKS 2024 (SKALA 1-4)</b>	<b>KATEGORI</b>
179	Sulawesi Tenggara	3.043	Tanggap
180	Muna	2.595	Cukup Tanggap
181	Kolaka	2.908	Tanggap
182	Kota Kendari	3.166	Tanggap
183	Kota Bau-Bau	3.387	Sangat Tanggap
184	Gorontalo	3.041	Tanggap
185	Boalemo	2.925	Tanggap
186	Bone Bolango	2.795	Tanggap
187	Kota Gorontalo	2.968	Tanggap
188	Gorontalo Utara	3.592	Sangat Tanggap
189	Gorontalo	2.957	Tanggap
190	Maluku	3.365	Sangat Tanggap
191	Buru Selatan	2.919	Tanggap
192	Kota Tual	3.801	Sangat Tanggap
193	Maluku Utara	2.871	Tanggap
194	Pulau Morotai	2.674	Tanggap
195	Halmahera Utara	3.187	Tanggap
196	Kota Tidore Kepulauan	2.788	Tanggap
197	Papua	3.009	Tanggap
198	Jayapura	3.196	Tanggap
199	Mimika	2.768	Tanggap
200	Sulawesi Barat	3.107	Tanggap
201	Poliwali Mandar	3.107	Tanggap
202	Sulawesi Utara	2.914	Tanggap
203	Kepulauan Sangihe	3.501	Sangat Tanggap
204	Bolaang Mongondow	2.840	Tanggap
205	Kota Bitung	2.782	Tanggap

NO	PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA	INDEKS 2024 (SKALA 1-4)	KATEGORI
206	Kota Manado	2.616	Cukup Tanggap
207	Papua Barat	2.617	Cukup Tanggap
<b>JUMLAH</b>		<b>3.107</b>	<b>Tanggap</b>

Pelaksanaan pemberdayaan peran serta masyarakat dilakukan di 4 (empat) lingkungan yang akan menjadi sasaran program, yaitu instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikan. Tanggap darurat narkoba nasional di Indonesia harus ditanggapi dengan peningkatan peran aktif masyarakat di masing-masing lingkungan dalam P4GN secara mandiri dan berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 104 Bab Peran Serta Masyarakat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa masyarakat memiliki peran serta yang seluas-luasnya dalam P4GN.

Pada akhir Triwulan IV tahun 2024 telah dilakukan pengukuran kepada 4 (empat) lingkungan yang menjadi sasaran pemberdayaan peran serta masyarakat, yaitu instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikan. Dari keempat sasaran tersebut, lingkungan pendidikan memiliki nilai indeks IKP tertinggi dengan perolehan sebesar 161 lembaga dengan perolehan nilai indeks sebesar 3,54 dengan kategori Sangat Mandiri. Sedangkan lingkungan swasta mendapatkan nilai indeks sebesar 3,91, instansi pemerintahan mendapatkan nilai indeks sebesar 3,61, serta lingkungan masyarakat mendapatkan nilai indeks sebesar 3,55 dengan kategori Sangat Mandiri. Sedangkan rata-rata nasional IKP sebesar 3,59 dengan kategori dengan Sangat Mandiri.

Tabel 3. Hasil Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP)

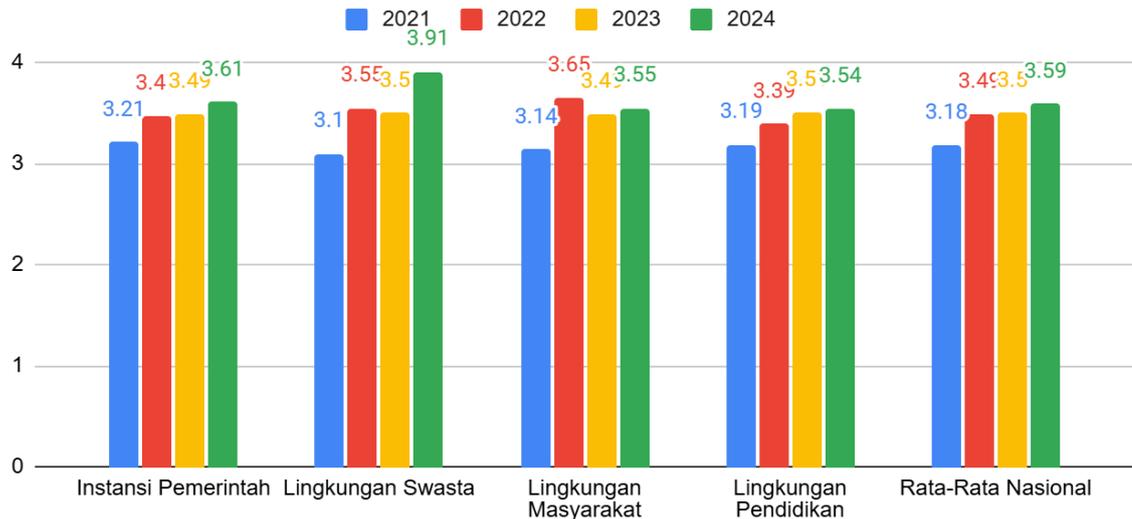
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP)	3,30	3,59	108,79

Tabel 4. Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP)

Berdasarkan Lingkungan Sasaran

NO	LINGKUNGAN SASARAN	INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI (IKP)
1	Instansi Pemerintah	3,61
2	Lingkungan Swasta	3,91
3	Lingkungan Masyarakat	3,55
4	Lingkungan Pendidikan	3,54
<b>NILAI KUMULATIF</b>		<b>3,59</b>

Gambar 2. Indeks Kemandirian Partisipasi 2021 - 2024



Meningkatnya kesadaran, kepedulian dan kemandirian masyarakat pada lingkungan-lingkungan tersebut merupakan hasil dari keberhasilan intervensi yang dilakukan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat dan pelaksana fungsi di jajaran BNNP dan BNNK vertikal melalui pencapaian *output* dan *outcome* program pemberdayaan peran serta masyarakat.

Tabel 5. Capaian Kinerja Rincian Output (RO) Direktorat Peran Serta Masyarakat Tahun 2024

KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	3257.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK (Reguler)	1 NSPK	1 NSPK	100%
	3257.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba (Prioritas Nasional)	414 Lembaga	414 Lembaga	100%

Hingga Triwulan IV (Januari - Desember 2024), target Rincian Output Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba (dilaksanakan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat) yaitu 1 NSPK dapat terealisasi 100%. Sedangkan target Rincian Output Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba (dilaksanakan oleh unit vertikal BNNP dan BNNK) sebesar 414 Lembaga terealisasi sebesar 100% dengan tercapainya 414 Lembaga. Target lembaga tersebut tersebar di 4 (empat) lingkungan yang menjadi sasaran pemberdayaan peran serta masyarakat, yaitu sebanyak 132 lembaga di instansi pemerintah, 14 lembaga di lingkungan swasta, 107 lembaga di lingkungan masyarakat, dan 161 lembaga di lingkungan pendidikan.

Selain serangkaian aktivitas di atas, pada tahun 2024 Direktorat Peran Serta Masyarakat melakukan kegiatan pelayanan publik berupa tes urine deteksi dini narkotika. Selama setahun, Direktorat Peran Serta Masyarakat dan pelaksana fungsi pemberdayaan masyarakat di BNNP/BNNK telah melaksanakan kegiatan deteksi dini narkotika melalui tes

urine dengan jumlah total peserta sebanyak 197.862 orang dengan hasil sebanyak 1.405 orang positif menggunakan narkoba. Adapun secara rinci dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 6. Pelaksanaan Tes Urine Deteksi Dini Narkoba Nasional Tahun 2024

NO	SATUAN KERJA/PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PESERTA	JUMLAH TERINDIKASI POSITIF
1.	Direktorat Peran Serta Masyarakat	70	12.237	13
2.	Aceh	92	10.103	30
3.	Bangka Belitung	50	2.608	3
4.	Bali	132	5.495	3
5.	Banten	85	5.800	7
6.	Bengkulu	23	790	0
7.	DI Yogyakarta	34	3.241	14
8.	DKI Jakarta	97	4.609	3
9.	Gorontalo	33	1.195	0
10.	Jawa Barat	225	17.292	63
11.	Jambi	19	1.780	0
12.	Jawa Tengah	242	13.254	8
13.	Jawa Timur	375	25.524	433
14.	Kalimantan Barat	53	3.478	28
15.	Kalimantan Selatan	214	10.155	129
16.	Kalimantan Utara	54	4.605	19
17.	Kalimantan Tengah	40	2.350	60
18.	Kalimantan Timur	91	15.216	98
19.	Kepulauan Riau	51	2.988	6
20.	Lampung	52	1.575	8
21.	Maluku	10	613	2
22.	Maluku Utara	14	687	0
23.	NTB	86	3.119	30
24.	NTT	26	1.717	0
25.	Papua	45	2.410	6

NO	SATUAN KERJA/PROVINSI	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PESERTA	JUMLAH TERINDIKASI POSITIF
26.	Papua Barat	6	286	0
27.	Riau	46	3.546	38
28.	Sulawesi Barat	7	372	0
29.	Sulawesi Selatan	78	5.228	3
30.	Sulawesi Tengah	71	3.426	82
31.	Sulawesi Tenggara	57	3.928	3
32.	Sulawesi Utara	13	954	0
33.	Sumatera Barat	32	3.172	23
34.	Sumatera Selatan	67	4.671	58
35.	Sumatera Utara	286	19.438	235
<b>TOTAL</b>		<b>2.876</b>	<b>197.862</b>	<b>1.405</b>

\*Data per 12 Desember 2024

Persebaran pelaksanaan di masing-masing lingkungan dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 7. Pelaksanaan Tes Urine Deteksi Dini Narkotika Per Lingkungan Tahun 2024

No	Sasaran	Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta	Jumlah Terindikasi Positif
1.	Lingkungan Masyarakat	494	17.967	182
2.	Lingkungan Pendidikan	479	44.251	427
3.	Instansi Pemerintah	1.397	89.769	247
4.	Lingkungan Swasta	506	45.875	549
<b>TOTAL</b>		<b>2.876</b>	<b>197.862</b>	<b>1.405</b>

\*Data per 12 Desember 2024

Salah satu bentuk intervensi Direktorat Peran Serta Masyarakat untuk mendukung Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkotika adalah melalui pengembangan kapasitas P4GN yang diberikan kepada instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengembangkan kapasitas P4GN bagi Penggiat P4GN yang diharapkan menjadi perpanjangan tangan BNN sebagai garda terdepan untuk menciptakan lingkungan bersinar di wilayahnya masing-masing.

Tabel 8. Pembentukan Penggiat P4GN di 34 Provinsi

No	Provinsi	Jumlah Penggiat
1	Aceh	365
2	Bangka Belitung	151
3	Bali	210
4	Banten	634
5	Bengkulu	157
6	DI Yogyakarta	141
7	DKI Jakarta	145
8	Gorontalo	185
9	Jawa Barat	775
10	Jambi	146
11	Jawa Tengah	968
12	Jawa Timur	686
13	Kalimantan Barat	264
14	Kalimantan Selatan	443
15	Kalimantan Utara	136
16	Kalimantan Tengah	30
17	Kalimantan Timur	311
18	Kepulauan Riau	189
19	Lampung	135
20	Maluku	25
21	Maluku Utara	130
22	NTB	2.428
23	NTT	120
24	Papua	123
25	Papua Barat	40
26	Riau	159
27	Sulawesi Barat	92
28	Sulawesi Selatan	81
29	Sulawesi Tengah	248
30	Sulawesi Tenggara	150
31	Sulawesi Utara	150
32	Sumatera Barat	50
33	Sumatera Selatan	660
34	Sumatera Utara	1.010
<b>JUMLAH</b>		<b>11.537</b>

Direktorat Pemberdayaan Alternatif di bawah Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN memiliki peran strategis dalam melaksanakan intervensi berbasis pemberdayaan masyarakat untuk kawasan yang rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Fungsi utama direktorat ini adalah mengembangkan potensi masyarakat di kawasan rawan narkoba dengan berbagai upaya yang bertujuan menciptakan lingkungan yang bebas dari ancaman narkoba secara berkelanjutan.

Kegiatan Pemberdayaan Alternatif menargetkan kawasan rawan narkoba yang telah teridentifikasi berdasarkan tingkat kerentanannya terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Strategi intervensi yang digunakan adalah Pengembangan Kapasitas Masyarakat melalui Bimbingan Teknis *Life Skill* Kawasan Rawan Narkoba.

Direktorat Pemberdayaan Alternatif dalam melakukan pemulihan kawasan rawan narkoba juga menggandeng stakeholder baik instansi pemerintah (K/L/D) maupun swasta (dunia

usaha), baik berupa sinergi program/kegiatan, pemanfaatan dana hibah, ataupun *Corporate Social Responsibility* (CSR), antara lain dengan PT PG Rajawali II Cirebon yang telah bersinergi dengan BNN dalam program Alternative Development pada masyarakat di kawasan rawan narkoba di 3 (tiga) Desa dengan status Kerawanan Bahaya di Kabupaten Indramayu, telah melatih 75 orang melalui kegiatan Bimtek Life Skill Budidaya Tanaman Tebu dan telah bermitra diberikan pinjam pakai lahan, hasilnya dibeli oleh PT PG Rajawali Selain itu sebagai wujud nyata dari komitmen PT PG Rajawali II, telah dilaksanakan kegiatan Ikrar Petani Anti Narkoba yang diikuti oleh 250 orang petani tebu.

Kerjasama juga telah dilakukan dengan PT. Ujang Jaya International (UJI) dalam hal pembelian komoditas Kopi Program GDAD di Kabupaten Gayo Lues sejak tahun 2022 dan pada tahun 2024 ini untuk memperluas areal penanaman Kopi telah diberikan bantuan program CSR berupa sarana produksi dan benih unggul (Kopi) dari PT UJI dan Starbucks yang diperuntukkan pada luas lahan 937,7 ha dan jumlah petani 195 org di Kabupaten Gayo Lues.

Tabel 9. Bimbingan Teknis *Life Skill* pada Masyarakat di Kawasan Rawan Narkoba

NO	SATKER	DESA/KEL	JENIS PELATIHAN	PESERTA	KET
1	Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN RI	Desa Sepanjang Kec. Gondanglegi Kab. Malang, Jawa Timur	Budidaya Lele	50	
2	Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN RI	Kel. Pasir Gintung Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung	Kuliner Cake	50	
3	Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN RI	Kel. Bontorannu, Kec. Mariso, Sulawesi Selatan	Perbengkelan	45	
4	Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN RI	Kel. Bulu Kasap, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai, Riau	Barista	50	Pesisir
5	Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN RI	Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumut	Budidaya jahe merah dalam Polybag	50	Kolaborasi dgn CSR
6	Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN RI	Kel Selat Tanjung Medan, Kec. Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Sumut	Olehan Ikan Kerang	50	Pesisir
7	Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN RI	Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli, Sumut	Bakery dan Pastry	50	
8	Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN RI	Kel. Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, Kepri	Barista Kopi dan pembuatan otak-otak	40	Pesisir
9	Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN RI	Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumut	Papan Bunga Ucapan	40	
10	Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN RI	Desa Amis, Kec. Cikedung, Indramayu, Jabar	Budidaya Tebu	25	Kolaborasi dgn CSR

NO	SATKER	DESA/KEL	JENIS PELATIHAN	PESERTA	KET
		Desa Tugu, Kec. Lelea, Indramayu, Jabar	Budidaya Tebu	30	
		Desa Tugu, Kec. Lelea, Indramayu, Jabar	Budidaya Tebu	20	
11	Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN RI	Desa Sungsang, Kec. Sungsang Kab Banyuasin, Sumsel	Budidaya Lele	40	
12	Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN RI	Desa Jurong, Kec. Sawang, Aceh Utara, Aceh	Pasca Panen jagung dan pengolahan pakan unggas	50	
13	Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN RI	Desa Pardomuan Kec Panyabungan Timur Kab Madina, Sumut	Kuliner Bahan Baku Gula Aren	50	
14	Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN RI	Kelurahan Kampung Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur, Kalimantan Barat	Teknik Instalasi Listrik Dasar dan Teknik Pengelasan	20	
15	Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN RI	Kelurahan Tanjung Hilir, Kec. Pontianak Timur, Kalimantan Barat	Teknik Instalasi Listrik Dasar dan Teknik Pengelasan	20	
16	BNNP ACEH	Desa Meunasah Baktrieng, Kec Barona Jaya, Aceh Besar	Budidaya Tanaman Hidroponik	30	
17	BNNP ACEH	Gampong Meurah Kec Seulimum, Kab Aceh Besar	Budidaya Cabai	30	
18	BNNP ACEH	Gampong Mureu Baro Kec Indrapuri Kab Aceh Besar	Budidaya Cabai	30	
19	BNN KAB. GAYO LUES	Desa Beranang, Kec. Kuta Panjang	Pupuk Bio Organik Padat dan Cair	15	
20	BNN KAB. GAYO LUES	Desa Kutelintang, Kec. Blangkejeren	Pembuatan Pakan Ikan	15	
21	BNN KAB. GAYO LUES	Desa Penosan Kec. Blangjerango	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	15	
22	BNN KAB. GAYO LUES	Desa Bukit Kec. Blangkajeren, Kab. Gayo Lues	Pakan Ikan	15	
23	BNN KAB. GAYO LUES	Desa Pertik Kec. Pining Kab. Gayo Lues	pembuatan pakan ayam	15	
24	BNN KAB. BIREUEN	Pase Kec. Juli Kab. Bireuen	Menjahit	15	

NO	SATKER	DESA/KEL	JENIS PELATIHAN	PESERTA	KET
25	BNN KAB. BIREUEN	Cot Bada Kec. Jeumpa Kab. Bireuen	Kuliner Kue	15	
26	BNN KAB. BIREUEN	Seubok Meujim-jim Kec. Juli Kab. Bireuen	Kuliner Kue	15	
27	BNN KAB. BIREUEN	Bale Me Kec. Kutablang Kab. Bireuen	Sabun Cair	15	
28	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	Gampong Sawang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara	Pakan Ternak Unggas	25	
29	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	Gampong Teupin Reusep Kec. Sawang Kab. Aceh Utara	Pakan Ternak Unggas	25	
30	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	Gampong Blang Banyak Kec. Sawang Kab. Aceh Utara	Pakan Ternak Unggas	25	
31	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	Gampong Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara	Pakan Ternak Unggas	25	
32	BNNP SUMATERA UTARA	Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan / Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan	Barista	15	
33	BNNP SUMATERA BARAT	Desa Balai Naras, Kec. Pariaman Utara, Kota Pariaman, Prov. Sumatera Barat	Pelatihan Seni Ukir Pelaminan	15	
34	BNNP RIAU	Kel. Bagan Hulu, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau	Pelatihan Pengolahan Hasil Laut	15	
35	BNNP KEPULAUAN RIAU	Kel. Sungai Pasir, Kec. Meral Kab. Tanjung Balai Karimun, Prov. Kepri	Pengolahan Hasil Laut	15	
36	BNNP BENGKULU	Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu	Pengolahan Ikan	15	
37	BNNP DKI JAKARTA	Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat	Pelatihan kuliner	15	
38	BNNP JAWA TENGAH	Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang Prov Jawa Tengah	Servis AC	15	

NO	SATKER	DESA/KEL	JENIS PELATIHAN	PESERTA	KET
39	BNNP JAWA BARAT	Desa Sukatani Kec. Sukatani Kab. Purwakarta	Pembuatan keripik singkong	15	
40	BNNP JAWA BARAT	Desa Pangandaran, Kec. Pangandaran, Kab Pangandaran	Produksi Sandal Hotel	15	Hibah Pemda
41	BNNK SUKABUMI	Desa Cibolang. Kec. Cisaat Kab. Sukabumi	Pelatihan UMKM	15	Hibah Pemda
42	BNNP JAWA TIMUR	Desa Made, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan	Service AC	15	
43	BNNP JAWA TIMUR	Desa Randubango, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto	Budidaya Maggot BSF	15	Hibah Pemda
44	BNNK SIDOARJO	Desa Banjarkemantren, Kec. Buduran Kab. Sidoarjo	Pelatihan Pengecetan	30	CSR
46	BNNP KALBAR	Kel. Dalam Bugis Pontianak, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak	Pelatihan Otomotif	30	
		Kel. Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak	Pelatihan Otomotif		
		kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak	Pelatihan Otomotif		
		Desa Kapur. Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya	Pelatihan Otomotif		
		Kel. Sungai Pinyuh kec. Sungai Pinyuh, Kab. Mempawah	Pelatihan Otomotif		
47	BNNP KALBAR	Kel. Roban Singkawang	Pelatihan Otomotif	30	
		Kel. Condong Singkawang	Pelatihan Otomotif		
		Kel. Sedau Singkawang	Pelatihan Otomotif		
		Kel. Sungai Garam Hilir Singkawang	Pelatihan Otomotif		
		Desa Jagoi Bengkayang	Pelatihan Otomotif		

NO	SATKER	DESA/KEL	JENIS PELATIHAN	PESERTA	KET
		Desa Pulau Lemukutan Bengkayang	Pelatihan Otomotif		
48	BNNP KALIMANTAN TENGAH	Kel. Baamang Barat Kecamatan Baamang Kab. Kotawaringin Timur	Pandai Besi	15	
49	BNNP KALIMANTAN SELATAN	Kel. Alalak Tengah, Kec. Banjarmasin Utara Dan Kel. Kelayan Luar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin	Pelatihan Kuliner	15	
50	BNNP SULAWESI UTARA	Kel. Airmadidi Atas, Kec.: Airmadidi, Kab.: Minahasa Utara, Prov Sulawesi Utara	Pelatihan Tata Rias	15	
51	BNNP SULTENG	Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi	Pelatihan Sablon	15	
52	BNNP SULSEL	Desa Panakkukang, Kec. Pallangga Kab Gowa Prov Sulsel	Pelatihan Percetakan	15	
53	BNNP SULTRA	Kel. Baruga, Kec. Baruga Kota Kendari, Prov Sulawesi Tenggara	Membuat aneka kue jajan	15	
54	BNNP MALUKU UTARA	Kel. Mangga Dua Kec. Ternate Tengah Kota Ternate	Pelatihan Hidroponik	15	
55	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Lombok Utara Kab.	Kuliner Jajanan dan Minuman Kekinian (Roti Gulung, Hamburger/ Hotdog, Kopi Dalgona dan Teh Susu Cincau	15	
56	BNNP BALI	Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan	Pelatihan Kuliner	15	
57	BNNP LAMPUNG	Desa Kibang, Kec. Metro Kibang, Kab. Lampung Timur	Kuliner Pembuatan Kripik Pisang dan Roti.	15	
58	BNNK BADUNG	Desa Mengwitani, Kec. Mengwi	Cake and Bakery	15	Hibah Pemda
59	BNNK BADUNG	Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara	Cake and Bakery	15	Hibah Pemda
60	BNNP BANTEN	Kel. Banten, Kec. Kasemen, Kota Serang	Pelatihan Barista	15	Hibah Pemda

NO	SATKER	DESA/KEL	JENIS PELATIHAN	PESERTA	KET
61	BNNP SUMSEL	Desa Gasing, Kec. Tatang Kelapa, Kab. Banyuasin	Budidaya Jamur Tiram, Budidaya Ikan Lele	10	
62	BNNP BABEL	Desa Balo Laut, Kec. Mentok, Kab. Bangka Barat dan Desa Air Putih, Kec. Mentok Kab. Bangka Barat	Pengelolaan Hasil Perikanan	15	
63	BNNP KALTIM	Kel. Patung, Kec. Penajam, Kab. Penajam Pasir Utara,	Pelatihan Membatik	15	
64	BNNP MALUKU	Kel. Kudamati, Kec. Nusaniwe, Kab. Ambon	Teknik Kendaraan Ringan	15	
65	BNNP GORONTALO	Desa Ayuta Utara Kec. Bulango Selatan, Kab. Bone Bulango	Pembuatan Kue	15	
54	BNNP MALUKU UTARA	Desa Ayuta Timur Kec. Bulango Selatan, Kab. Bone Bulango	Pembuatan Kue	15	
66	BNNP PAPUA	Kel. Adipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura	Pembuatan Kerupuk Sagu	15	
<b>JUMLAH</b>				<b>1.570</b>	

Tabel 10. Kawasan Rawan Narkoba yang Diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif Tahun 2024

NO	KEGIATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Jumlah Kawasan Rawan yang dibina Pemberdayaan Alternatif	72	Tercapai 163% dari target 44 Kawasan yang diintervensi
2	Jumlah kegiatan Bimbingan Teknis <i>Life Skill</i> Pada Kawasan Rawan Narkoba	66	Kuliner 34,85%, Budidaya 19,70%, Pupuk/pakan 13,64%, bengkel/listrik 9,09%, Handycraft 9,09 %, Barista 6,06%, Percetakan/Sablon 3,03%, Membatik 1,52%, Menjahit 1,52%, Tata rias 1,52%
3	Jumlah Peserta yang dilatih	1.510	

Tabel 11. Jumlah Masyarakat Kawasan Rawan yang Beralih Profesi Tahun 2024

NO	SATUAN KERJA	NAMA KAWASAN	JENIS PELATIHAN	JUMLAH BERALIH PROFESI (ORG)
1	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	Desa Amis, Kec. Cikedung, Indramayu, Jabar	Budidaya Tebu	25

NO	SATUAN KERJA	NAMA KAWASAN	JENIS PELATIHAN	JUMLAH BERALIH PROFESI (ORG)
2	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	Desa Tugu, Kec. Lelea, Indramayu, Jabar	Budidaya Tebu	30
3	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	Desa Tunggul Payung, Kec Lelea, Indramayu, Jabar	Budidaya Tebu	20
4	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	Desa Pardomuan, Huta Bangun dan Huta Tinggi, Kec. Panyabungan Timur, Kab. Madina, Sumut	Kuliner Bahan Baku Gula Aren	20
5	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	Kel. Bulu Kasap, Kec Dumai Timur, Kota Dumai, Riau	Barista	50
6	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	Kel. Pasir Gantung Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung	Kuliner Cake	12
7	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	Kel. Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, Kepri	Barista Kopi dan pembuatan otak-otak	40
8	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	Desa Sepanjang Kec. Gondanglegi Kab. Malang, Jawa Timur	Budidaya Lele	50
9	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	Desa Jurong, Kec. Sawang, Aceh Utara, Aceh	Pasca Panen jagung dan pengolahan pakan unggas	43
10	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	Kel. Mabar Hilir, Kec Medan Deli, Kota Medan, Sumut	Bududaya Jahe Merah dengan Polybag	20
11	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	Kel. Mabar Hilir, Kec Medan Deli, Kota Medan, Sumut	Kuliner bakery dan Pastry	9
12	BNNP ACEH	Desa Meunasah Baktrieng, Kec Barona Jaya, Aceh Besar	Budidaya Tanaman Hidroponik	3
13	BNNP ACEH	Gampong Meurah Kec Seulimum, Kab Aceh Besar	Budidaya Cabai	10
14	BNNP ACEH	Gampong Mureu Baro Kec Indrapuri Kab Aceh Besar	Budidaya Cabai	10
15	BNNK GAYO LUES	Desa Kutelintang, Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues	Pembuatan Pakan Ikan	4

NO	SATUAN KERJA	NAMA KAWASAN	JENIS PELATIHAN	JUMLAH BERALIH PROFESI (ORG)
16	BNNP SUMATERA BARAT	Desa Balai Naras, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Prov. Sumatera Barat	Pelatihan Seni Ukir Pelaminan	3
17	BNNP SUMATERA SELATAN	Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin	Budidaya Jamur Tiram, Budidaya Ikan lele	3
18	BNNP LAMPUNG	Desa Kibang, Kecamatan: Metro Kibang, Kabupaten: Lampung Timur, Prov Lampung	Pelatihan Kuliner	6
19	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Desa Belo Laut Kecamatan Mentok, Kab. Bangka Barat, Prov. Kep. Babel	Pengolahan Hasil Perikanan	1
		Desa Air Putih Kecamatan Mentok, Kab. Bangka Barat, Prov. Kep. Babel	Pengolahan Hasil Perikanan	1
20	BNNP BENGKULU	Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu	Pengelola Ikan	8
21	BNNP DKI JAKARTA	Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	Aneka Makanan dan Minuman	11
22	BNNP BANTEN	Kelurahan Banten, Kec. Kasemen Kota Serang	Pelatihan Kopi Barista	8
23	BNNP JAWA TENGAH	Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang Prov Jawa Tengah	Service AC	2
24	BNNP JAWA TIMUR	Desa Made, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan	Service AC	2
25	BNNP JAWA TIMUR	Desa Randubango, Kec. Mojokerto, Kab. Mojokerto	Budidaya Maggot BSF	2
26	BNNP KALIMANTAN BARAT	Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Prov Kalimantan Barat	Aneka kuliner dan Kerajinan Pokok Telok	1
		Pontianak Barat, Pontianak Timur Kalimantan Barat	Pelatihan Otomotif	3

NO	SATUAN KERJA	NAMA KAWASAN	JENIS PELATIHAN	JUMLAH BERALIH PROFESI (ORG)
27	BNNP KALIMANTAN SELATAN	Kel. Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kel. Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin	Pelatihan Kuliner	1
28	BNNP KALIMANTAN TIMUR	Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kab Penajam Paser Utara, Prov Kalimantan Timur	pelatihan membuat	6
29	BNNP SULAWESI TENGAH	Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi	Pelatihan Sablon	1
30	BNNP SULAWESI SELATAN	Desa Panakkukang, Kecamatan Pallangga Kab Gowa Prov Sulsel	Pelatihan Digital Printing	1
31	BNNP SULAWESI TENGGARA	Kelurahan Baruga, Kec. Baruga Kota Kendari, Prov Sulawesi Tenggara	Membuat aneka kue jajan	1
32	BNNP MALUKU	Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2
33	BNNP MALUKU UTARA	Kel. Mangga Dua Kec. Ternate Tengah Kota Ternate	Pelatihan Hidroponik	9
34	BNNP BALI	Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan	Bisnis Minuman Kekinian Kopi dan Bubble Drink	2
35	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara	Kuliner Jajanan dan Minuman Kekinian (Roti Gulung, Hamburger/ Hotdog, Kopi Dalgona dan Teh Susu Cincau	1
36	BNNP GORONTALO	Desa Ayula Utara & Ayula Timur Kec Bulango Selatan Kab. Bone Bolango	Pembuatan Kue	15
37	BNNP PAPUA	Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura	Pelatihan Pembuatan Kerupuk Sagu	5
38	BNNP BANTEN	Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang	Pelatihan Barista	8

NO	SATUAN KERJA	NAMA KAWASAN	JENIS PELATIHAN	JUMLAH BERALIH PROFESI (ORG)
39	BNNK BADUNG	Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung	Cake and Bakery	2
40	BNNK BADUNG	Kelurahan Kerobokan Kaja, kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung	Cake and Bakery	2
41	BNNP BALI	Desa Banjar Anyar dan Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan	Bisnis Minuman Kekinian Kopi dan Bubble Drink	2
<b>TOTAL</b>				<b>452</b>

Tabel 12. Program *Alternative Development*

NO	LOKASI KABUPATEN	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Kab. Aceh Utara	Budidaya Jagung	Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN kerja sama dengan Dinas pertanian Aceh Utara berupa bantuan Benih Jagung Pertiwi dan Bantuan Pupuk Urea 3 ton dari PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Lhokseumawe lokus di Desa Jurang Kec. Sawang Luas Lahan 15 ha, jumlah petani 43 orang.
2.	Kab. Bireuen	Budidaya Jagung	BNNK Bireuen bekerja sama dengan Masyarakat secara swadaya (kemandirian) Desa Paseh dan Geulumpang Meujim-jim Kec. Juli Kab Bireuen dengan Luas Lahan 27 ha dengan petani sebanyak 30 orang.
3.	Kab. Aceh Besar	Budidaya Cabe Merah	BNNP Aceh melalui Bimbingan Teknis <i>Life Skill</i> di Gampong Meurah Kec. Seulimeum. Luas lahan 2 ha jumlah petani 30 orang.
		Budidaya Sayuran Hidroponik	BNNP Aceh melalui Bimbingan Teknis <i>Life Skill</i> di Gampong Meunasah Bak Trieng, Kec. Kareung Barona Jaya dengan jumlah petani 30 orang
		Budidaya Cabe Merah	BNNP Aceh melalui Bimbingan Teknis <i>Life Skill</i> di Gampong Murue Baro, Kec. Indrapuri, dengan luas lahan 1,5 ha, jumlah petani 30 Orang

NO	LOKASI KABUPATEN	KEGIATAN	KETERANGAN
4.	Kab. Gayo Lues	Budidaya Kopi	PT. Ujang Jaya International dan Starbucks mendukung program GDAD BNN dalam pemberdayaan petani kopi, telah mengaudit (sertifikasi) lahan 937,7 Ha terdiri dari 1.007 petani yang difasilitasi BNNK Gayo Lues.  Petani yang menerima pembibitan dari starbucks jumlah 183,1 ha terdiri dari 195 petani di wilayah Blangjerango - Kutapanjang, Pantan Cuaca - Rikit Gaib, Blangkejeren, Blangpegayon - Dabun Gelang
5.	Kabupaten Indramayu	Budidaya Komoditas Tebu	Budidaya Komoditi Tebu Kerja Sama Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan PT. PG Rajawali 2 Cirebon membina 75 petani dengan luas lahan 135 ha di a. Desa Amis Kec. Cikedung b. Desa Tugu Kec. Lelea c. Desa Tunggul Payung Kec. Lelea

Dalam upaya pemulihan kawasan rawan narkoba secara berkelanjutan, Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN tidak hanya mengandalkan kerja sama lintas pemerintah dan masyarakat, tetapi juga aktif melibatkan sektor swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Peran CSR menjadi salah satu elemen kunci dalam memperkuat keberlanjutan program pemberdayaan alternatif, terutama dalam aspek pendanaan, pengembangan kapasitas, dan penyediaan infrastruktur.

Tabel 13. Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dana Hibah untuk Pemberdayaan Alternatif

NO	LOKASI KABUPATEN	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Kab. Indramayu	Bimbingan Teknis Life Skill Budidaya Komoditi Tebu di a. Desa Amis Kec. Cikedung b. Desa Tugu Kec. Lelea c. Desa Tunggul Payung Kec. Lelea membina 75 orang dan berbudidaya tebu seluas 135 ha	Implementasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan PT. Pabrik Gula Rajawali II Cirebon.
2	Kota Medan	Pelatihan Budidaya Jahe Merah menggunakan Polybag dan Pemasarannya di Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumut	Kerjasama Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan PT. Bintang Toedjoe membina 50 orang.
3	Kab. Gayo Lues	Pembibitan kopi untuk lahan seluas 183,1 ha untuk 195 petani di Kec. Blangjerango, Kutapanjang, Pantan Cuaca, Rikit Gaib, Blangkejeren, Blangpegayon, Dabun Gelang	CSR dari Starbucks berupa benih kopi unggul keluaran dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia.

NO	LOKASI KABUPATEN	KEGIATAN	KETERANGAN
			BNNK Gayo Lues dan Starbucks membina petani program GDAD.
4	Kab. Sidoarjo	Pelatihan Pengecatan dengan peserta 21 orang di Desa Banjarkemantren, Kec. Buduran	CSR dari PT Propan kerja sama dengan BNNK Sidoarjo
5	Kab. Pangandaran	Pemetaan Potensi Kawasan Rawan Narkoba di Desa Pangandaran, Kec. Pangandaran.	Pengelolaan Dana Hibah dari Pemprov Jawa Barat oleh BNNP Jawa Barat
		Pelatihan Produksi Sandal Hotel dengan peserta 15 Orang di Desa Pangandaran, Kec. Pangandaran.	
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Alternatif di Desa Pangandaran, Kec. Pangandaran, Kab. Pangandaran	
6	Kab. Purwakarta	Pemetaan Potensi Kawasan Rawan Narkoba di Desa Sukatani, Kec. Sukatani, Kab Purwakarta	Pengelolaan Dana Hibah dari Pemprov Jawa Barat oleh BNNP Jawa Barat
7	Kab. Sukabumi	Pelatihan UMKM dengan peserta 15 Orang di Desa Cibolang. Kec. Cisaat Kab. Sukabumi	Pengelolaan Dana Hibah dari Pemkab Sukabumi oleh BNNK Sukabumi
8	Kab. Mojokerto	Pelatihan Budidaya Magot dengan peserta 15 orang di Desa Randubango, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto	Pengelolaan Dana Hibah dari Pemprov Jawa Timur oleh BNNP Jawa Timur
9	Kota Palembang	Bantuan 2000 bibit ikan lele ke Masyarakat Binaan Pemberdayaan Alternatif di kel. sukarami Kec. Sukarami	Bantuan kegiatan dari Dinas Pertanian Kota Palembang kepada Masyarakat Binaan BNNP Sumatera Selatan
		Pameran kegiatan P4GN,	Kegiatan difasilitasi oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel
10	Kota Serang	Pelatihan Barista Kopi dengan peserta 15 orang di Kel. Banten, Kec. Kasemen, Kota Serang	Pengelolaan Dana Hibah dari Pemprov Banten oleh BNNP Banten
11	Kalimantan Barat	Pelatihan Otomotif sebanyak 2x kegiatan di 11 Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah peserta 60 orang	BNNP Kalbar menjalin kerjasama melalui CSR dari Stakeholder: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yayasan honda Motor jakarta (utama)</li> </ul> didukung <ul style="list-style-type: none"> <li>• HPI Group</li> <li>• PTPN</li> </ul> Yayasan Geratak Kab Sambas

NO	LOKASI KABUPATEN	KEGIATAN	KETERANGAN
12	Kota Tarakan	CSR Lingkungan, Literasi dan Kesehatan di Kelurahan Selumit Pantai Kec Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	BNNK Tarakan bekerjasama dengan PT Pertamina
11	Kab. Badung	Pelatihan Cake dan Bakery dengan peserta 15 Orang di Desa Mengwitani, Kec. Mengwi	Pengelolaan Dana Hibah dari Pemkab Badung oleh BNNK Badung
		Pelatihan Cake dan Bakery dengan peserta 15 Orang di Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara	

Tabel 14. Capaian Pemberdayaan Alternatif Tahun 2022-2024

No	Uraian	2022	2023	2024	Jumlah
1	Jumlah Fasilitasi Program <i>Alternative Development</i> pada Masyarakat Kawasan Tanaman Terlarang dan Peredaran Gelap Narkoba (Desa/ Kelurahan)	Target 70 Capaian 81	target 52 Capaian 72	target 44 Capaian 66	219
2	Jumlah Bimtek Life Skill (Kali)	86	73	66	225
3	Jumlah Peserta Bimtek Life Skill (Org)	1.854	1.447	1.510	4.811
4	Pengembangan Budidaya Komoditi Alternatif bersama Stakeholder (ha)	700	1.596	983,2	3.279
5	Jumlah Petani Budidaya Komoditi Alternatif (Org)	870	1.077	358	2.305

### III. BIDANG REHABILITASI

Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI berperan penting dalam upaya pemulihan pecandu narkoba sebagai bagian dari strategi komprehensif pemberantasan narkoba. Sepanjang tahun 2024, BNN melalui layanan rehabilitasi telah berhasil merehabilitasi 13.852 pecandu dari total 40.900 individu yang mendapatkan layanan pemulihan di Indonesia. Angka ini mencerminkan kontribusi signifikan BNN dalam memberikan layanan rehabilitasi berbasis pendekatan medis, psikologis, dan sosial yang dirancang untuk membantu pecandu kembali ke kehidupan normal dan produktif.

Selain menjalankan layanan rehabilitasi langsung, Deputi Bidang Rehabilitasi BNN juga menjalin sinergi dengan berbagai kementerian, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, untuk memastikan akses rehabilitasi yang merata dan berstandar tinggi. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem rehabilitasi yang berkelanjutan, dengan harapan dapat memberikan kesempatan kedua bagi para pecandu serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari penyalahgunaan narkoba di masyarakat.

#### A. LAYANAN REHABILITASI NARKOTIKA

NO	LAYANAN REHABILITASI	JUMLAH PECANDU DIREHABILITASI
1	BNN	13.852
2	Kementerian Kesehatan	17.311
3	Kementerian Sosial	1.937
4	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	7.800
<b>TOTAL</b>		<b>40.900</b>

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

NO	PROVINSI	JUMLAH PECANDU DIREHABILITASI		
		BNN		
		RAWAT JALAN	RAWAT INAP	IBM
1	Pusat	109		
2	Aceh	213		130
3	Sumatera Utara	1297	98	163
4	Sumatera Barat	218		47
5	Riau	280		50
6	Kepulauan Riau	175	170	52
7	Kepulauan Bangka Belitung	158		62
8	Bengkulu	260	74	48
9	Jambi	312		40
10	Sumatera Selatan	416		71
11	Lampung	336	155	73
12	Banten	186		44
13	DKI Jakarta	605		48
14	Jawa Barat	783	620	188
15	Jawa Tengah	370		89
16	D.I.Yogyakarta	293		40
17	Jawa Timur	520		202
18	Kalimantan Barat	227		98
19	Kalimantan Selatan	379		137
20	Kalimantan Tengah	118	6	33
21	Kalimantan Timur	260	246	38

NO	PROVINSI	JUMLAH PECANDU DIREHABILITASI		
		BNN		
		RAWAT JALAN	RAWAT INAP	IBM
22	Kalimantan Utara	136		29
23	Bali	201		49
24	Nusa Tenggara Barat	407		52
25	Nusa Tenggara Timur	61		15
26	Sulawesi Utara	159		90
27	Gorontalo	82		6
28	Sulawesi Barat	36		14
29	Sulawesi Selatan	707	219	35
30	Sulawesi Tengah	278		87
31	Sulawesi Tenggara	301		68
32	Maluku	39		25
33	Maluku Utara	67		17
34	Papua	79		16
35	Papua Barat	30		10
<b>TOTAL</b>		<b>10.098</b>	<b>1.588</b>	<b>2.166</b>

Dari **13.852** orang klien yang di rehabilitasi di BNN, ada **4.942** orang klien yang mengikuti layanan pascarehabilitasi

## B. INDEKS KAPABILITAS REHABILITASI DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PENYALAH GUNA NARKOBA

### 1. Indeks Kapabilitas Rehabilitasi

SASARAN KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN
Indeks Kapabilitas Rehabilitasi	3,4	3,51

### 2. Peningkatan Kualitas Hidup Penyalah Guna Narkoba

NO	DOMAIN	TARGET	CAPAIAN
1	Fisik	68%	83,70%
2	Psikologis	68%	84,23%
3	Sosial	68%	82,44%
4	Lingkungan	68%	85,76%

### 3. Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi

SASARAN KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN
Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi	3,3	Rawat Jalan :3,62 Rawat Inap : 3,66

## C. LEMBAGA REHABILITASI MENUJU STANDAR NASIONAL INDONESIA TENTANG LAYANAN REHABILITASI NARKOTIKA

### 1. PENGUATAN LEMBAGA REHABILITASI MENUJU STANDAR NASIONAL INDONESIA TENTANG LAYANAN REHABILITASI NARKOTIKA

NO	PROVINSI	JUMLAH LEMBAGA REHABILITASI		JUMLAH PETUGAS REHABILITASI TERLATIH	JUMLAH PETUGAS TERSERTI FIKASI
		MITRA	BNN		
1	Aceh	19	11	7	7
2	Sumatera Utara	41	17	11	7
3	Sumatera Barat	13	5	4	3

NO	PROVINSI	JUMLAH LEMBAGA REHABILITASI		JUMLAH PETUGAS REHABILITASI TERLATIH	JUMLAH PETUGAS TERSERTI FIKASI
		MITRA	BNN		
4	Riau	10	5	5	4
5	Kepulauan Riau	7	5	5	5
6	Kepulauan Bangka Belitung	23	5	5	2
7	Bengkulu	7	4	2	3
8	Jambi	14	4	5	4
9	Sumatera Selatan	21	10	7	4
10	Lampung	16	7	5	6
11	Banten	20	4	4	3
12	DKI Jakarta	27	5	44	3
13	Jawa Barat	60	16	7	3
14	Jawa Tengah	36	10	6	4
15	D.I. Yogyakarta	19	4	5	4
16	Jawa Timur	46	18	10	6
17	Kalimantan Barat	31	8	6	3
18	Kalimantan Selatan	23	9	7	2
19	Kalimantan Tengah	13	4	6	2
20	Kalimantan Timur	5	5	8	6
21	Kalimantan Utara	13	3	6	
22	Bali	18	7	5	1
23	Nusa Tenggara Barat	10	5	4	3
24	Nusa Tenggara Timur	10	4	5	2
25	Sulawesi Utara	10	5	3	
26	Gorontalo	5	6	5	3
27	Sulawesi Barat	19	2	4	3
28	Sulawesi Selatan	25	5	8	5
29	Sulawesi Tengah	17	7	4	2
30	Sulawesi Tenggara	15	5	5	2
31	Maluku	11	3	7	1
32	Maluku Utara	14	4	4	
33	Papua	29	3	4	2
34	Papua Barat	2	1	2	1
<b>TOTAL</b>		<b>649</b>	<b>216</b>	<b>225</b>	<b>106</b>

2. **CAPAIAN JUMLAH LEMBAGA YANG MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN REHABILITASI TAHUN 2020 – 2024**

NO.	PROVINSI	TAHUN CAPAIAN					TOTAL
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Aceh		3	2	2	2	9
2	Sumatera Utara	4	9	9	9	6	37
3	Sumatera Barat		1	3	3	1	8
4	Riau		2	4	1	3	10
5	Kepulauan Riau		2	2	3		7

NO.	PROVINSI	TAHUN CAPAIAN					TOTAL
		2020	2021	2022	2023	2024	
6	Kepulauan Bangka Belitung		3		5	2	10
7	Bengkulu		4	1	3	1	9
8	Jambi		4	2	2	2	10
9	Sumatera Selatan	1	3	3	4	3	14
10	Lampung		4	2	2	3	11
11	Banten				3	3	6
12	DKI Jakarta	2	2	8	5	5	22
13	Jawa Barat	2	5	7	9	7	30
14	Jawa Tengah		5	6	1	6	18
15	D.I. Yogyakarta		1	2	2	3	8
16	Jawa Timur		2	11	9	7	29
17	Kalimantan Barat		5		1	3	9
18	Kalimantan Selatan		4	5	2	4	15
19	Kalimantan Tengah			2		2	4
20	Kalimantan Timur		6	1	1		8
21	Kalimantan Utara		1	2		1	4
22	Kalimantan Barat			1			1
23	Kalimantan Tengah					1	1
24	Bali	1	6	4	3	3	17
25	Nusa Tenggara Barat		2	5	1	2	10
26	Nusa Tenggara Timur		1	2			3
27	Sulawesi Utara			1	1	4	6
28	Gorontalo			3	1	3	7
29	Sulawesi Barat		1	2		1	4
30	Sulawesi Selatan		4	3	2	4	13
31	Sulawesi Tengah		3	2	1	1	7
32	Sulawesi Tenggara		5				5
33	Maluku		1	1	1	1	4
34	Maluku Utara		1	1	1	1	4
	<b>TOTAL LEMBAGA</b>	<b>10</b>	<b>92</b>	<b>98</b>	<b>80</b>	<b>87</b>	<b>367</b>

#### D. UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT

NO	PROVINSI	JUMLAH UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT	JUMLAH PETUGAS AGEN PEMULIHAN
1	Aceh	22	110
2	Sumatera Utara	32	162
3	Sumatera Barat	10	50
4	Riau	10	50
5	Kepulauan Riau	8	52
6	Kepulauan Bangka Belitung	10	62
7	Bengkulu	6	30
8	Jambi	8	43
9	Sumatera Selatan	20	103
10	Lampung	12	66
11	Banten	10	50
12	DKI Jakarta	8	40

NO	PROVINSI	JUMLAH UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT	JUMLAH PETUGAS AGEN PEMULIHAN
13	Jawa Barat	31	156
14	Jawa Tengah	20	106
15	D.I. Yogyakarta	8	40
16	Jawa Timur	37	195
17	Kalimantan Barat	16	80
18	Kalimantan Selatan	18	107
19	Kalimantan Tengah	6	30
20	Kalimantan Timur	8	60
21	Kalimantan Utara	6	30
22	Bali	14	87
23	Nusa Tenggara Barat	10	66
24	Nusa Tenggara Timur	8	41
25	Sulawesi Utara	10	50
26	Gorontalo	12	60
27	Sulawesi Barat	4	20
28	Sulawesi Selatan	8	41
29	Sulawesi Tengah	14	70
30	Sulawesi Tenggara	10	50
31	Maluku	6	31
32	Maluku Utara	8	40
33	Papua	6	29
34	Papua Barat	2	10
<b>TOTAL</b>		<b>418</b>	<b>2217</b>

**E. PETUGAS REHABILITASI YANG MENDAPATKAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS DAN YANG TERSERTIFIKASI KOMPETENSI**

No	Kegiatan	Target	Capaian
1	Peningkatan Kemampuan Teknis Petugas Rehabilitasi BNN	175 org	175 org
2	Training on Trainers (UTC 5 dan Rehabilitasi Dan Konseling Dasar Pada Layanan Rawat Jalan)	50 org	50 org
3	Peningkatan Kemampuan Pendamping Agen Pemulihan Unit IBM	207 org	207 org
4	Bimbingan Teknis Petugas IBM (BNNP/Kab/K)	2.070 org	2.102 org
5	Petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi	100 org	106 org

**F. DATA PRESTASI BALAI DAN LOKA REHABILITASI BNN**

NO	KEGIATAN	TAHUN
1.	<b>Balai Besar Rehabilitasi BNN</b> menerima Penghargaan Lembaga dan Unit Penyedia Layanan Ramah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus oleh Kementerian	25 November 2024

NO	KEGIATAN	TAHUN
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (PPPA) dengan predikat <b>Nilai Maksimum</b> Sertifikat ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari penghargaan dan apresiasi kepada Kementerian dan Lembaga yang memberikan layanan publik terutama kepada Anak yang memerlukan perlindungan khusus terutama bagi Penyalahgunaan Narkoba	
	<b>Balai Besar Rehabilitasi BNN</b> menerima sertifikasi Paripurna untuk Klinik Utama Balai Besar Rehabilitasi BNN oleh Lembaga Penyelenggara Akreditasi Pelayanan Kesehatan Paripurna (LPA PKP)	13 September 2024
	<b>Balai Besar Rehabilitasi BNN</b> menerima sertifikasi <b>ISO 9001:2015</b> dari CAI (Certification Assurance International) terkait penerapan sistem manajemen mutu	03 Juni 2024
	<b>Balai Besar Rehabilitasi BNN</b> menerima sertifikasi <b>ISO 14001:2015</b> dari CAI (Certification Assurance International) terkait penerapan sistem manajemen lingkungan	03 Juni 2024
2.	<b>Balai Rehabilitasi BNN Badokka</b> meraih Akreditasi Paripurna dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memenuhi standar akreditasi	13 Mei 2024
	<b>Balai Rehabilitasi BNN Badokka</b> meraih penghargaan dari KEMENPAN RB sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik	8 Oktober 2024
3.	<b>Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah</b> meraih predikat Badan Publik Informatif Kategori Instansi Vertikal Pusat	2024
	<b>Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah</b> meraih predikat <b>Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)</b> dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	2024
	<b>Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah</b> meraih penghargaan <b>ISO 9001:2015</b> dari MS CERT terkait penerapan sistem manajemen mutu	2024
	<b>Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah</b> meraih penghargaan <b>ISO 14001:2015</b> dari MS CERT terkait penerapan sistem manajemen lingkungan	2024
	<b>Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah</b> meraih predikat <b>Paripurna Standarisasi Klinik Pratama</b> dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	4 Juni 2024
	<b>Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah</b> meraih penghargaan <b>Lembaga Perlindungan Khusus Ramah</b>	19 Agustus 2024

NO	KEGIATAN	TAHUN
	<b>Anak Terstandarisasi KPPA RI</b> dari Walikota Samarinda	
	<b>Loka Rehabilitasi BNN Batam</b> meraih Akreditasi Paripurna untuk Klinik Pratama dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	21 Juni 2024
4.	<b>Loka Rehabilitasi BNN Batam</b> meraih penghargaan sebagai Lembaga Perlindungan Khusus yang Terstandarisasi Ramah Anak (LPKRA) dengan “Nilai Maksimum” dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)	25 November 2024
5.	<b>Loka Rehabilitasi BNN Kalianda</b> meraih Akreditasi Paripurna untuk Klinik Pratama Loka Rehabilitasi BNN Kalianda dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	27 Maret 2024
	<b>Loka Rehabilitasi BNN Deli serdang</b> Meraih Akreditasi Paripurna Klinik Pratama Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang dari Kementerian Kesehatan Republik indonesia	05 Februari 2024
6.	<b>Loka Rehabilitasi BNN Deli serdang</b> meraih penghargaan sebagai Lembaga Perlindungan Khusus yang Terstandarisasi Ramah Anak (LPKRA) dengan “Nilai Maksimum” dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)	25 November 2024

#### IV. BIDANG PEMBERANTASAN

Pada Bidang Pemberantasan, BNN RI terus menunjukkan peran strategisnya dalam memerangi jaringan peredaran gelap narkoba, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sepanjang tahun 2024, Deputy Bidang Pemberantasan BNN RI berhasil mengungkap 13 jaringan nasional dan 14 jaringan internasional, yang mencerminkan komitmen kuat dalam melumpuhkan sindikat narkoba yang terorganisir. Selain itu, sebanyak 618 kasus tindak pidana narkoba dan psikotropika dengan 974 tersangka berhasil diungkap, menunjukkan penurunan kasus namun tetap mengedepankan efektivitas dalam setiap operasi pemberantasan.

Di sisi lain, Deputy Bidang Pemberantasan juga berhasil menangani 2 kasus *Clandestine Lab* prekursor narkoba dengan 11 tersangka, serta 13 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang terkait dengan peredaran narkoba. Dari penanganan kasus TPPU tersebut, total aset yang disita mencapai Rp 111,5 miliar. Angka ini menunjukkan upaya sistematis dalam memutus aliran dana kejahatan narkoba, yang menjadi salah satu strategi utama untuk melumpuhkan kekuatan sindikat secara menyeluruh.

BNN terus menguatkan koordinasi lintas sektor guna memastikan upaya pemberantasan yang komprehensif, terukur, dan berdampak nyata. Berbagai upaya kolaboratif dilakukan guna mewujudkan sinergitas antar penegak hukum dalam upaya pemberantasan narkoba.

Berikut rincian data pengungkapan kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh BNN RI, Polri, dan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan RI.

##### A. Jumlah kasus dan tersangka yang berhasil diungkap BNN

NO	JENIS	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1.	Jaringan terungkap	Nasional	26	15	13
		Internasional	23	22	14
2.	Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika	Kasus	768	910	618
		Tersangka	1209	1284	974
3.	Prekursor Narkoba (Clandestine Lab)	Kasus	2	-	2
		Tersangka	5	-	11
4.	TPPU	Kasus	17	21	13
		Tersangka	20	22	15
		Total Aset	Rp. 33.822.009.388	Rp. 162.244.526.644	Rp. 111.535.843.866

##### B. Daftar Pencarian Orang (DPO)

NO	KETERANGAN	JUMLAH DPO	PENGEJARAN	TERTANGKAP
1.	BNN	40	39	1
2.	BNNP	323	298	25
<b>TOTAL DPO BNN</b>		<b>363</b>	<b>337</b>	<b>26</b>
3.	DPO WNA	4	-	-
4.	DPO di Luar Negeri	1	-	-

### C. Barang Bukti Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika

#### Badan Narkotika Nasional

NARKOTIKA				
NO	JENIS	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1.	Sabu Kristal	1.895.397,09 gram (1,89 Ton)	1.361,109.55 gram	710.980,59 gram
2.	Sabu Butir		61.200 Butir	
3.	Jumlah Total Ladang Ganja yang dimusnahkan	44.8 Ha/ 104 Ton/ 198.000 Batang	27.7 Ha/80 Ton/ 172.750 Batang	13.5 Ha/35.5 Ton/ 99.864 Batang
4.	Ganja	1.063.490,38 gram (1,08 Ton)	1.420.995,64 gram	2.178.034,61 gram
5.	Ganja Sintetis	486,94 gram	2.969,75 gram	1.077,69 gram
6.	Ekstasi (Butir)	262.789,77 Butir	369.755 Butir	290.737,23 Butir
7.	Ekstasi (gr)	16.571,50 gram	145.475,73 gram	138.404,29 gram
8.	Heroin	8,09 gram	1.114 gram	2.760,00 gram
9.	Kokain	1.060 gram	-	4.335,34 gram
10.	Toluen	150 ml	-	-
11.	Pseudephedrine	2,40 gram	-	-
12.	Happy Five	29.482 Butir	-	-
13.	Tembakau Gorila	529.66 gram	-	-
14.	Cairan Sabu	7.200 ml	-	-
15.	Carnophen	11.500 Butir	-	-
16.	Carnophen Warna Kuning	39.000 Butir	-	-
17.	Zenit Warna Carnophen	12.800	-	-
18.	Karisoprodol	48.288 Butir	-	971.000 Butir
19.	PCC ( Gr)	-	-	2.800 gram
PREKURSOR				
NO	JENIS	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1.	Serbuk	1.903,35 gram	-	-
2.	Tablet	990 Butir	-	-
3.	Cairan	6.600,98 ml	-	-
4.	Cairan	8 Botol	-	-
5.	Neo Napacin	31 Bungkus	-	-
6.	Acetone	-	-	700 MI
7.	HCL	-	-	600 MI

#### Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri

NARKOTIKA		
NO	JENIS BARANG BUKTI	TAHUN 2024
1	Ganja (Gr)	6.027.230,28 GRAM (6 TON)
2	Pohon Ganja (Btg)	88.662 batang ganja
3	Heroin (Gr)	69 gr
4	Kokain (Gr)	11.019,3 GRAM
5	Hashish (Gr)	165.891 GRAM
6	Xtc (Tbl/Btr)	4.267.539 BUTIR
7	Shabu (Methapetamine)	6.342.459,08 GRAM (6,3 TON)
8	Carisoprodol	1.215.000 BUTIR
9	T Gorilla (Gr)	1.548.293,71 GRAM
10	NPS Synthetic Cannabinoid	7.747038 BUTIR
11	Obat Keras	7.568.089 GRAM

PSIKOTROPIKA					
NO	TAHUN	BARANG BUKTI			
		BENZODIAZEPIN /GOLONGAN III	BARBITURAT /GOLONGAN IV	DAFTAR G	KETAMINE
1	2024	1.244.921 BUTIR	-	7.568.089 BUTIR	24.700 GRAM

**Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan RI**

NO	JENIS	JANUARI S.D 1 DESEMBER 2024(GRAM)	
		SERAH TERIMA KE BNN	SERAH TERIMA KE POLRI
1	Ganja	1.705.450,82	821.505,39
2	Shabu / <i>Methamphetamine</i>	415.331,49	1.183.777,79
3	MDMA / Ekstasi	24.330,84	223.622,09
4	NPS <i>Synthetic Cannabinoid</i>	240,36	1.231.733,94
5	<i>Happy Five (Nimetazepam)</i>	-	53.945,26
6	<i>Alprazolam</i>	2.197,82	32.459,75
9	Ketamine	-	150,08
10	THC ( <i>Tetrahydrocannabinol</i> )	1.350,96	21.287,55
11	Tanaman Ganja (batang)	77.009,00	42
12	Lainnya	5.585,32	117.889,80

METODE PENGIRIMAN			
NO	METODE PENGIRIMAN	JANUARI s.d. DESEMBER 2024 (GRAM)	
		SERAH TERIMA KE BNN	SERAH TERIMA KE POLRI
1	Ekspedisi Lokal	688.347,06	609.202,16
2	<i>Land Transport</i>	2.278.180,19	647.845,28
3	<i>Sea Transport</i>	242.286,46	735.302,16
4	<i>Air Transport</i>	154.019,90	1.706.866,93

**D. PEMUSNAHAN LADANG GANJA 2023**

NO.	TANGGAL	KOORDINAT	LOKASI	LUAS (M <sup>2</sup> )	JUMLAH TANAMAN (BATANG)	BERAT (TON)
<b>DIREKTORAT NARKOTIKA DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN BNN</b>						
1	23-Jan-24	05°05'00.1"N 096°55'30.6"E	Desa Teupin Reusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh	10.000	12.364	7,5
2	23-Jan-24	05°04'58.2"N 096°55'29.5"E	Desa Teupin Reusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh	5.000	5.500	1,5
3	23-Jan-24	05°04'57.0"N 096°55'29.1"E	Desa Teupin Reusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh	5.000	5.000	1
4	06-Mar-24	05°27'18.26"N 095°30'29.65"E	Desa Lamlung Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besari Provinsi Aceh	10.000	2.500	1,5
5	06-Mar-24		Desa Lamlung Kecamatan			1,5

NO.	TANGGAL	KOORDINAT	LOKASI	LUAS (M <sup>2</sup> )	JUMLAH TANAMAN (BATANG)	BERAT (TON)
<b>DIREKTORAT NARKOTIKA DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN BNN</b>						
		05°27'16.55"N 095°30'28.26"E	Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh	10.000	2.500	
6	06-Mar-24	05°29.377"N 095°40.132"E	Desa Meurah Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh	20.000	15.000	4
7	20-Jun-24	05°28'09.69"N 095°39'15.07"E	Desa Pulo, Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh	25.000	24.000	12
8	15-Aug-24	05°28'11.6"N 095°32'01.5"E	Desa Lamlung, Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh	10.000	5.000	2,5
9	15-Aug-24	05°32'23.5"N 095°40'14.0"E	Desa Lampanah, Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh	10.000	5.000	1
<b>BNNP ACEH DAN SUMATERA UTARA</b>						
10	Aceh		Gampong Lampanah Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar Propinsi Aceh	10.000	3000	1
11	Sumut		Diwilayah Perbukitan Tor Sihite Aek Gorsing Ds. Rao Rao Dolok Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara	20.000	20.000	2
<b>JUMLAH</b>				<b>135.000</b>	<b>99.864</b>	<b>35,5</b>

## E. Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, BNN RI berhasil mengungkap 27 jaringan sindikat narkotika, yang terdiri dari 13 jaringan nasional dan 14 jaringan internasional. Pengungkapan ini menunjukkan komitmen kuat BNN RI dalam memberantas peredaran gelap narkotika di berbagai tingkatan, baik di dalam negeri maupun lintas negara. Operasi yang dilakukan melibatkan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum internasional, untuk memastikan jaringan sindikat ini dapat dilumpuhkan secara menyeluruh. Prestasi ini mencerminkan keberhasilan pendekatan strategis BNN RI dalam mengidentifikasi dan menindak jaringan yang selama ini beroperasi secara terorganisir.

Dari 27 pengungkapan tersebut, sejumlah kasus menonjol berhasil diungkap, mencakup tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang terkait dengan peredaran narkotika. Dengan terungkapnya kasus-kasus ini, BNN RI tidak hanya menghentikan distribusi narkotika dalam jumlah besar tetapi juga memutus sumber pendanaan sindikat, yang menjadi salah satu strategi kunci dalam melemahkan jaringan narkoba secara sistematis.

### 1. Penyelundupan Sabu di Perairan Aceh

Perairan Aceh yang menjadi bagian dari Selat Malaka masih menjadi area favorit para penyelundup sabu. BNN RI, Polri, ataupun BC masih terus melakukan operasi penindakan di wilayah ini. Di antara hasil penindakan yang dilakukan oleh BNN adalah pengungkapan Jaringan Tengku M. Pengungkapan kasus ini berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai indikasi peredaran gelap narkotika melalui Perairan Laut di Wilayah Aceh Timur. Dari hasil pengembangan berhasil dilakukan pengungkapan pada tanggal 9 Januari 2024. Petugas Gabungan yang terdiri dari BNN, Dit. Interdiksi Narkotika Ditjen Bea dan Cukai, Kanwil Ditjen Bea dan Cukai,

serta KPPBS Langsa berhasil mengamankan sebuah perahu jenis Bot Timur yang kedapatan membawa 4 (empat) bungkus besar plastik berwarna hitam yang berisi total 40 paket narkotika jenis sabu berat total 42,17 kg. Adapun TKP berada di Perairan Langsa, Desa Teulaga Tujuh, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa, Aceh. Bersama dengan hal tersebut, petugas mengamankan dua orang tersangka bernama Abdurrahman bin Syaripuddin dan Fauzi alias Neh bin Syaiful yang merupakan ABK.

Tim gabungan kemudian mengamankan 5 (lima) orang tersangka lainnya. Antara lain Sayuti bin Muhammad Isa dan Muhammad Dia alias Tengku M. yang berhasil diamankan di Daerah Uteun Dama, Kec. Peureulak, Aceh Timur. Kedua tersangka merupakan orang yang memerintahkan tersangka Abdurrahman dan Fauzi untuk mengambil barang dari Penang, Malaysia. Adapun Sayuti dan Tengku M. mendapat perintah dari Amri bin Nurdin selaku pengendali kurir yang kemudian berhasil diamankan di Daerah Dusun Seulangsa, Langsa Timur, Langsa, Aceh. Selanjutnya diketahui bahwa terdapat keterlibatan seorang warga binaan Lapas Kelas I Medan yaitu Husaini bin Husen sebagai pengendali jaringan dan turut diamankan juga seorang tersangka bernama Mansur yang menjadi penghubung antara pengendali di Lapas (Husaini) dengan pengendali kurir (Amri).



## 2. Penindakan terhadap Jaringan Ganja Aceh dan Ganja Madina

BNN kembali melakukan pengungkapan terhadap peredaran gelap narkotika yang diproduksi di wilayah Aceh dan Madina. Petugas BNN berupaya melakukan pengungkapan jaringan dari hulu hingga hilir atau dari tingkat produksi hingga tingkat pengedar. Di antara kelompok pengedar yang berhasil BNN identifikasi adalah kelompok Jaringan Rizal.

Pada tanggal 2 Maret 2024, Tim BNN melakukan pembuntutan, dan terpantau bahwa kurir membuang barang bukti berupa karung berisi ganja di pinggir jalan karena curiga terhadap aktivitas pembuntutan. Namun, petugas BNN berhasil mengamankan barang bukti tersebut sebanyak 6 (enam) karung warna putih berisi 125 (seratus dua puluh lima) paket ganja kering dengan total berat sebanyak 132,12 kg. Selanjutnya tim BNN berhasil menemukan mobil Avanza yang sudah tidak berpenumpang tersebut di Wilayah Suka Damai, Lembah Seulawah, Aceh Besar. Adapun tersangka kurir bernama M. Rizal alias Zal yang sebelumnya berhasil melarikan diri selanjutnya berhasil diamankan dari rumahnya. Dari hasil pengembangan ditemukan gudang ganja milik jaringan. Di lokasi tersebut disita 6 (enam) karung warna putih berisi narkotika jenis ganja basah dengan berat bruto 67,9 kg.



Selain, kelompok Jaringan Rizal, baik tim dari BNN RI ataupun tim BNNP/K, sepanjang tahun 2024 terus melakukan penindakan terhadap para pengedar jaringan ganja misalnya yang dilakukan oleh jaringan Ganja Sumatera Barat. Penindakan yang dilakukan pada tanggal 11 Oktober tersebut berhasil menyita ganja sebanyak 624.507,41 kg dan tujuh orang tersangka yang ditangkap di daerah Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Tujuh orang pelaku adalah Muhammad Rijalta alias Kajai, Randi Yufelianda alias Randi, Prim Hidayat alias Dayat, Zulfi Rahmad Wanda alias Wanda, Ridho Kurnia Lavendri alias Godok, Samsul Bahri alias Erwin, dan Hasimi. Tersangka diamankan di Jalan Raya Trans Sumatera, Kabupaten Pasaman, setelah teridentifikasi dua mobil pengangkut ganja.



Sementara kasus lainnya adalah penindakan terhadap jaringan Pandapotan Nasutian, dkk yang menyelundupkan narkotika jenis ganja sebanyak 54,94 kilogram pada tanggal 30 November 2024 di daerah Bangka, Provinsi Babel. Tim pemberantasan dari BNNP Kepulauan Bangka Belitung berhasil menyita barang bukti ganja yang berasal dari Mandailing Natal tersebut dengan mengamankan 5 orang tersangka.

### **3. Penyelundupan Narkotika dari Luar Negeri oleh Berbagai Jaringan Internasional.**

Berbagai jenis narkotika seperti sabu, heroin, kokain, ekstasi, dan bahkan ganja diselundupkan dari luar negeri sepanjang tahun 2024. Kasus ini mencerminkan bahwa terdapat konektivitas jaringan antara jaringan lokal dengan jaringan internasional. Beberapa kasus juga melibatkan perempuan dalam kelompok penyelundup baik dengan peran pengendali atau sebagai kurir internasional.

Berikut adalah beberapa kasus penyelundupan narkotika dari luar negeri yang menonjol.

**Pertama, penyelundupan narkotika sabu yang dikirim melalui jasa ekspedisi.** pada tanggal 6 April 2024 telah dilakukan penangkapan terhadap Ari Mukti Alias Bharon yang merupakan bagian dari Jaringan Malaysia-Indonesia. Tersangka terlibat dalam upaya pengiriman narkotika melalui jasa ekspedisi Fedex. Berdasarkan data *manifest* paket, diketahui bahwa paket dikirimkan oleh seseorang bernama **Neoh Cho Kean** yang beralamat di Penang, Malaysia. Paket dikirimkan kepada seorang perempuan yang bernama Ibu Sri/Ayu yang beralamat di daerah Kel. Balekambang, Kec. Kramat Jati, Jakarta.

Pengiriman paket dikamuflese berupa *curtain blind* (tirai gulung) yang berjumlah sebanyak 6 (enam) buah yang di dalamnya disembunyikan narkotika sabu sebanyak 3,96 kg. Selanjutnya juga ditemukan barang bukti berupa 37 gram biji tanaman ganja di rumah tersangka yang beralamat di Desa Singasari, Kab. Bogor, Jawa Barat. Seorang tersangka bernama Ari Mukti yang merupakan pemilik barang tersebut berhasil ditangkap.



**Kedua, penyelundupan ekstasi dari Belanda oleh Jaringan Fariborz.** Pada tanggal 4 Juni 2024 berhasil dilakukan upaya pengungkapan terhadap Jaringan Internasional yang melibatkan WN asal Iran. BNN berhasil mengamankan dua orang tersangka yaitu Fariborz Heidar dan Muhammad Afzali. Fariborz merupakan mantan narapidana yang baru bebas, sedangkan tersangka Muhammad Afzali masih berstatus sebagai narapidana dengan hukuman seumur hidup di Lapas Kelas I Cipinang. Tersangka Fariborz diamankan di area Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta Pusat.

Jaringan ini melakukan pengiriman paket narkotika dari Belanda menuju Jakarta menggunakan jasa pengiriman internasional yang bermitra dengan PT Pos Indonesia. Narkotika jenis ekstasi dikirimkan dalam sebuah paket berupa kardus berwarna abu-abu dengan menyebutkan ekstasi tersebut sebagai suplemen yang dimasukkan ke dalam 6 botol suplemen merk Kruidvat. Adapun total barang bukti yaitu 1.608 butir ekstasi.



**Ketiga, pengiriman narkotika sabu yang dilakukan oleh Jaringan Meksiko Gregor Johann Haas.** Pada tanggal 5 Desember 2023, diperoleh informasi dari Bea Cukai terkait adanya temuan paket diduga berisi narkotika yang dikirim oleh atas nama Servando Felix Hugo berasal dari Meksiko dengan tujuan Indonesia yang ditujukan kepada Edi yang beralamatkan di Hayam Wuruk, Gambir, Jakarta Pusat. Paket yang berisi ±5,1kg sabu dikirim melalui jasa pengiriman DHL Slipi (Jasa Pengiriman Internasional). Narkotika jenis sabu tersebut disamarkan ke dalam media *decorative resin*.

Tim berhasil mengamankan 6 orang tersangka dengan peran berbeda. Tersangka Rio Aditia sebagai pengambil paket, Angga Pratama sebagai orang yang memberikan perintah kepada Rio untuk mengambil paket, Raden Yoga Setiawan yang memberikan perintah kepada Angga, Gerson Indrian Kurniawan sebagai pengendali, Rian Mahendra Putro sebagai pengendali kurir dan Hamdi yang merupakan orang kepercayaan yang berhubungan langsung dengan pengendali jaringan. Adapun diketahui bahwa pengendali jaringan ini melibatkan WNA Australia bernama Gregor Johann Haas yang diduga melarikan diri ke Filipina.

Kemudian pada tanggal 15 Mei 2024 tersangka Gregor Johann Haas berhasil diamankan di Cebu, Filipina oleh Polri yang bekerja sama dengan kepolisian setempat.



**Keempat, Penyelundupan Narkotika Ganja Thailand oleh Jaringan Mardiansyah Thailand.** Kasus bermula dari informasi yang diperoleh dari Tim Bea Cukai Soekarno Hatta terkait adanya pengiriman paket berisi ganja dari Thailand. Adapun paket tersebut berupa 5 bal berisi masing-masing 2 pcs bedcover, adapun

pada masing-masing bedcover didapatkan 2 paket ganja masing-masing 3 bungkus ganja dan bal tersebut dibungkus kembali menggunakan peti atau seberat  $\pm 31,88$  kg. Seorang tersangka a.n. Asep Saripudin yang menjemput paket tersebut di PT. CAS Soekarno Hatta berhasil diamankan petugas. Tim kemudian menangkap tersangka Mardiansyah als. Dian yang berperan sebagai pengendali kurir pada tanggal 25 Juli 2024 di Bekasi, Jawa Barat. Tim kemudian menemukan lokasi gudang penyimpanan paket lainnya yang berada di Cipinang, Jakarta Timur yang dikelola oleh Wisnu dan Jarot. Dari hasil pengakuan Wisnu dan Jarot bahwa paket tersebut akan dibongkar dan dikemas kembali lalu dikirimkan melalui paket dengan tujuan Inggris (United Kingdom).



**Kelima, Penyelundupan Narkotika Sabu, Ekstasi, dan Kokain Jaringan Aceh – Malaysia.** Pada tanggal 25 November 2024, tim gabungan BNN dan Bea Cukai menggagalkan penyelundupan narkotika dari Malaysia di sebuah hotel di Kota Tangerang. Pada saat dilakukan penindakan, empat orang tersangka yaitu Aguswandi, Ismail, Idris, dan Rusdi berhasil diamankan dengan barang bukti berupa sebanyak sabu 4 kg dan ekstasi 4 kg. Kedua jenis narkotika tersebut dibawa oleh tersangka dari Sumatera Utara dan diyakini barang berasal dari kawasan *Golden Triangle* karena pengendali atas pengiriman narkotika ini diduga berada di Thailand.

Berdasarkan hasil penggalangan dari Masyarakat di lapangan, pada tanggal 2 Desember 2024, tim berhasil menangkap seorang tersangka bernama Angga Pratama di sebuah hotel yang berbeda Kota Tangerang dengan barang bukti sabu sebanyak 9.985 gram dan kokain sebanyak 1.968 gram yang berasal dari Aguswandi yang hingga kini masih buron (DPO). Kemudian, pada keesokan harinya, tim mengidentifikasi gudang berupa rumah kontrakan milik DPO tersebut di daerah Pinang, Kota Tangerang dan ditemukan narkotika jenis ekstasi sebanyak 19.948 gram.

**Keenam, penyelundupan narkotika Heroin oleh Jaringan Atfan Kamboja.** Pada tanggal 22 September 2024, telah dilakukan pengungkapan terhadap Jaringan Atfan Heroin Kamboja. Narkotika heroin sebanyak 2.760 gram disimpan di dalam koper milik Zulmeidi.

Melalui metode *controlled delivery*, BNN berhasil mengamankan tersangka Susanto bin Sukian yang berperan sebagai kurir penerima di area Terminal 3 bandara Soekarno – Hatta. Dari penangkapan kedua tersangka, diketahui bahwa keduanya diperintah oleh Atfan untuk mengambil narkotika jenis heroin kepada seseorang bernama Dewi Astuti alias Dinda. Pada tanggal 22 September 2024, berhasil diamankan tersangka Atfan Hanafi Siregar di Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Sementara Dewi Astuti hingga saat ini menjadi buron internasional.



**Ketujuh, penyelundupan Kokain dari Brazil.** Pada tanggal 6 Oktober 2024, telah diamankan seorang wanita bernama Brigitha Retno Prapti Ningsih di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Tersangka menggunakan penerbangan Doha, Qatar – Soekarno Hatta, Cengkareng. Dari hasil pemeriksaan ditemukan narkotika jenis kokain di dalam koper merk *Crepier* warna krem yang dibawanya. Paket narkotika tersebut disembunyikan dengan teknik *false concealment* di dinding koper. Adapun total barang bukti narkotika jenis kokain yang berhasil diamankan sebanyak 2.366 gram.

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa tersangka Brigitha diminta oleh seseorang bernama Rodrigo Cortez yang juga calon suaminya untuk pergi ke Brazil. Di Brasil dia menerima koper dengan merk *Crepier* warna krem dan diminta oleh Rodrigo Cortez dan Bento untuk membawanya. Setelah sampai di Jakarta, dia diminta untuk mengantarkan ke Thailand. Adapun biaya dan proses perjalanan tersangka semuanya diatur oleh travel agen Brasil.



#### 4. Pengungkapan Jaringan Kurir Terbang Pontianak – Madura

Pada tanggal 29 Mei 2024, tim gabungan BNN dan Bea Cukai berhasil menggagalkan upaya pengiriman narkotika jenis sabu melalui Bandara Soekarno Hatta yang dilakukan oleh Jaringan Pontianak-Madura. Pada pengungkapan ini diamankan 4 (empat) orang tersangka yaitu Fedry Firmansyah, Noraeny, Marsiani, dan Slamet Riada. Keempat tersangka merupakan kurir terbang pembawa sabu dari Pontianak menuju Jakarta. **Dua tersangka wanita** ditugaskan untuk membawa sabu melalui udara. Kedua tersangka menumpang pesawat dengan tujuan Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang Banten. Mereka menyembunyikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 kg di dalam sol 2 (dua) pasang sandal wanita.

Penangkapan diawali dengan berhasil diamankannya dua orang tersangka yaitu Fedry Firmansyah dan Noraeny. Kedua tersangka sedang menaiki mobil CRV warna

abu-abu metalik dan tengah melakukan transaksi dan diamankan di Jl. Perimeter Selatan, Soekarno-Hatta. Selanjutnya dilakukan penangkapan tersangka Marsiani di Gedung Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Satu hari setelah itu, berhasil diamankan tersangka Slamet Riadi yang merupakan orang yang memerintahkan Noraeny dan Marsiani.



## 5. Pengungkapan Penyelundup Sindikat Internasional di Perairan Kepulauan Riau.

Pada tanggal 13 Juli 2024 Tim gabungan BNN, BNNP Riau dan BC Batam melakukan penyelidikan dengan menggunakan kapal BC di perairan Kepulauan Riau, Selat Malaka. Tim melakukan upaya penindakan setelah mendapat informasi terkait adanya sebuah kapal besar yang bertulisan "*Legend Aquarius*" yang diduga membawa narkotika.

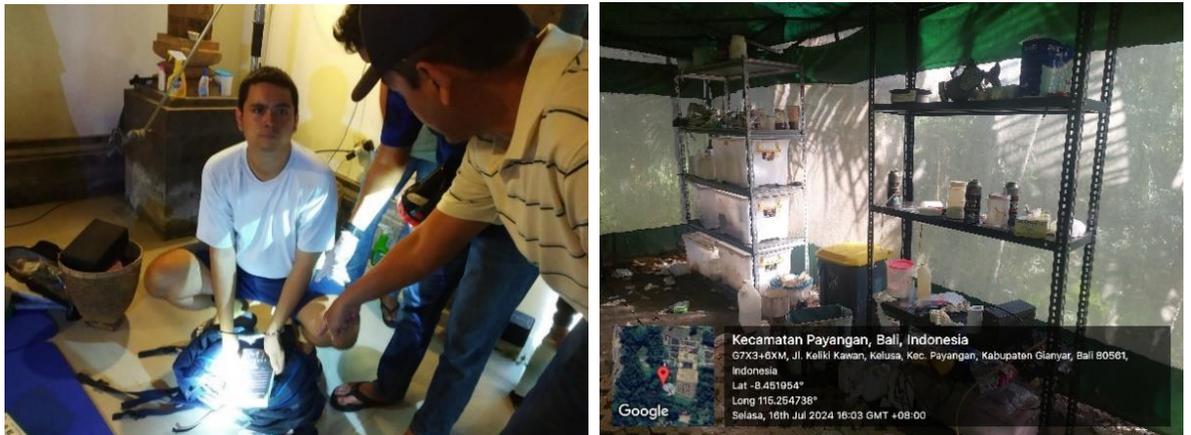
Pada malam hari, tim berhasil mengamankan Kapal *Legend Aquarius* di daerah perairan selat Malaka dan mengamankan 13 kru kapal tersebut yang terdiri dari 3 orang WNA India dan 10 orang WNI. Adapun 3 orang WNA India yang diamankan petugas bernama Raju Muthukumar, Selvadurai Dinakaran, dan Govindhasamy Vimalkandhan. Dari hasil pemeriksaan, ketiga WNA India ditetapkan sebagai tersangka, sementara sepuluh orang WNI ditetapkan sebagai saksi. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap muatan kapal dan diperoleh sebanyak 106 bungkus atau seberat ± 106,43 kg narkotika jenis sabu yang disimpan dalam 8 tas plastik besar. Selanjutnya tim gabungan membawa kapal beserta para tersangka dan ABK Indonesia menuju ke Dermaga Sekupang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut oleh BNN.





## 6. Pengungkapan *Clandestine Laboratorium* Narkotika DMT di Bali

Setelah dilakukan serangkaian proses penyelidikan, pada tanggal 18 Juli 2024 diamankan seorang tersangka WNA Filipina bernama Diego Alejandro Santos yang berperan sebagai produsen narkotika jenis DMT (*Dimethytryptamine*) dengan mendirikan *Clandestine Lab* yang berlokasi di Villa Mamma Ji House, Jl. Keliki Kawan, Kelusa, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, Bali. Kasus ini adalah kasus pertama kali ditemukannya CL jenis narkotika DMT.



## 7. Pengungkapan *Clandestine Laboratorium* 1 Juta Obat Keras Trihexyphenidyl di Sumedang

Pada Senin, 4 November 2024, berhasil diungkap *Clandestine Laboratory* Jaringan Sadin CL Sumedang. Sekitar pukul 16.50 WIB, Tim BNN menggerebek sebuah rumah di Dusun Rahayu, Desa Trunamanggala, Kecamatan Cimalaka, Sumedang, yang digunakan sebagai pabrik obat terlarang.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan 1 juta butir pil setan siap edar, 170 kilogram bahan baku, lima ponsel, satu motor, dan satu mobil. Tujuh tersangka, yakni RC, AM, Sug, Alx, Ag, Er, dan Suk, juga ditangkap, dengan empat di antaranya berasal dari Jatinunggal, Sumedang, dan tiga dari Bandung. Adapun proses penyidikan diserahkan ke Polda Jawa Barat.



**8. Pengungkapan *Clandestine Laboratorium Jaringan PCC Benny Setiawan***  
Pengungkapan terhadap usaha produksi Pil PCC di daerah Serang Banten berawal dari adanya informasi bahwa terdapat pengiriman barang diduga PCC dalam jumlah besar. Pengiriman diketahui dilakukan oleh Abdul Wahid menggunakan Ekpedisi Kurnia Indah 8 Express. Barang yang dikirimkan sebanyak 16 karung. Setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa isi paket-paket tersebut berupa pil yang mengandung Carisoprodol (PCC).

Pada tanggal 27 Agustus 2024, BNN mengamankan pengirim a.n. Abdul Wahid alias Dudung di rumah yang diduga digunakan sebagai tempat produksi PCC. Lokasi rumah beralamat di Jl. Ki Puger, Kel. Lialang, Kec. Taktakan, Kota Serang, Banten. Dudung berperan sebagai koki. Dari hasil pengecekan terhadap rumah ditemukan sebuah kamar yang berisi mesin dan bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi narkotika gol I jenis carisoprodol (PCC) serta beberapa karton untuk mengemas hasil produksi.

Berdasarkan keterangan Abdul Wahid alias Dudung maka dilakukan pengembangan terhadap anggota jaringan lainnya termasuk pengendali, koordinator keuangan, pemasok bahan, koki, dan pekerja produksi lainnya. Tim berhasil mengamankan para tersangka sebagaimana keterangan Dudung di TKP terpisah. Adapun tersangka yang berhasil diamankan antara lain 1) Andrei Fathur Rohman alias Andrei yang berperan sebagai pengawas rumah produksi sekaligus merupakan anak dari Benny yang merupakan pengendali jaringan. Di samping itu, Andrei juga berperan untuk mengirimkan hasil produksi mereka kepada konsumen. 2) Reni Maria Anggraeni berperan sebagai koordinator keuangan, dia bertugas melakukan pembayaran pembelian bahan baku, menerima uang penjualan, dan mengelola gaji karyawan, 3) Jafar berperan sebagai koki pembuat PCC, 4) Acu berperan sebagai asisten koki, dia bertugas menimbang bahan dan mengemas pil PCC, 5) Hapas berperan sebagai pemasok bahan, dan 6) Muhammad Lutfi yang berperan sebagai kurir pengantar bahan baku dan pekerja produksi.

Diketahui bahwa pengendali jaringan produksi PCC ini bernama Benny Setiawan berstatus sebagai Narapidana LP Kelas IIA Tangerang. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan pihak LP untuk mengamankan tersangka Benny serta seorang pembeli yang bernama Faisal yang juga berstatus sebagai Napi di LP yang sama. Adapun total tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan barang bukti berupa 16 karung PCC siap edar dengan total 960.000 tablet, bahan-bahan kimia PCC, serta alat-alat produksi pil PCC.





Andrei Fathur Rohman



Abdul Wahid als Dudung



Acu



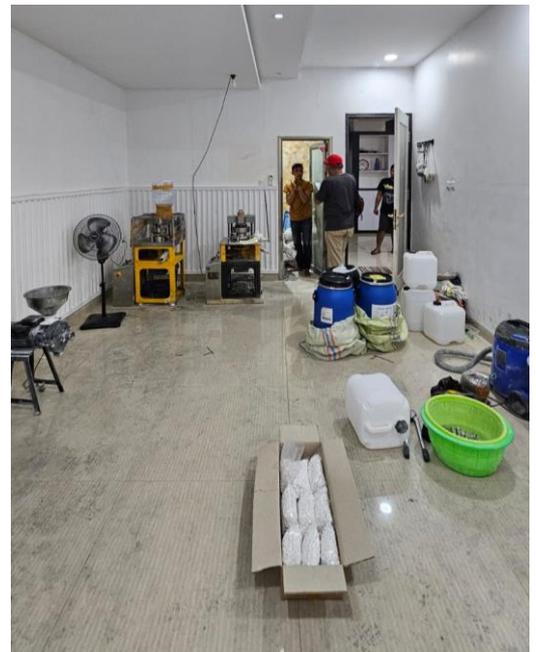
Burhanudin



Muhammad Lutfi



Reni Maria Anggreini



## 9. Empat Kasus TPPU Narkotika Jaringan Malaysia – Palembang

Tindak pidana pencucian uang ini berawal dari terungkapnya tindak pidana narkotika Jaringan AC oleh BNN pada Bulan Mei 2024. Petugas BNN yang mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap tersangka berinisial AT alias WH dan LM pada saat melakukan transaksi narkotika.

Keduanya diamankan petugas di Jalan Sei Seputih, Kota Palembang, Sumatera Selatan dengan barang bukti satu kantong berwarna krem berisi sabu seberat 1.044 gram, pada Jumat (24/5). Berdasarkan penyidikan lebih lanjut diketahui bahwa narkotika yang berasal dari Malaysia menuju Palembang melalui Pekanbaru

tersebut berada di bawah kendali dua orang pria berinisial HE alias AT dan Hi alias AC. Keduanya kemudian ditangkap di dua lokasi berbeda, HE alias AT ditangkap di Bali dan Hi alias AC ditangkap di Palembang, Sumsel. Sementara seorang pria berkewarganegaraan Malaysia berinisial KOH yang merupakan pengendali kurir pengirim sabu kepada HE alias AT tersebut kini masuk dalam DPO.

Usai penangkapan para tersangka, penyidik TPPU selanjutnya melakukan analisa transaksi keuangan guna menemukan bukti pencucian uang dalam kasus tersebut. Hasilnya penyidik menemukan sejumlah aliran dana transaksi narkoba yang dilakukan para tersangka melalui beberapa rekening bank dengan menggunakan nama pribadi maupun orang lain. Selain itu penyidik juga menemukan barang bukti lain berupa aset milik para tersangka berupa aset tidak bergerak, aset bergerak, dan uang tunai berbagai mata uang dengan total aset untuk tersangka AC diperkirakan sebanyak **Rp. 28.148.209.829,26, tersangka LM sebanyak Rp. 6.700.000.000,00, dan tersangka AT sebanyak Rp. 7.000.000.000,00.**

Para tersangka diketahui melakukan TPPU dengan menggunakan *modus nomine, u turn*, tarik dan setor tunai, serta menyamarkan dalam bentuk aset baik dengan nama pribadi maupun pihak lain. Tim penyidik juga masih mengembangkan kasus ini.

Sedangkan satu kasus lainnya bermula dari temuan barang bukti non narkoba yang melibatkan narapidana berinisial NH dan MM. Penyidik BNN pada Direktorat TPPU BNN kemudian melakukan Analisa, Penyelidikan dan Pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap transaksi keuangan yang dikuasai narapidana berinisial NH dan MM, maka penyidik BNN bekerjasama dengan PPATK mendapatkan adanya aliran dana transaksi narkoba dari rekening NH dan MM ke rekening pihak ketiga yang dikuasai oleh tersangka AS alias YD. AS alias YD diketahui merupakan seorang residivis kasus narkoba dengan hukuman pidana 11 tahun pada tahun 2011.

Terpidana narkoba NH dalam rentang waktu tahun 2014 – 2019 mentransfer uang hasil peredaran gelap narkoba total sejumlah Rp. 13.501.725.000,00 dengan frekuensi 340 kali transaksi sedangkan terpidana narkoba MM dalam rentan waktu tahun 2014 – 2016 telah mentransfer uang hasil peredaran gelap narkoba total sejumlah Rp 155.700.000,00 dengan frekuensi 4 kali transaksi.

Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, penyidik menyita aset dari tangan AS alias YD dari berbagai jenis bentuk seperti uang tunai, perhiasan, aset tidak bergerak, dan aset bergerak sebanyak **Rp. 22.206.792.000,00.** Beberapa modus pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka AS alias Yudi yaitu *modus use nominee, structuring, u turn*, modus pembelian aset dan barang mewah atas nama orang lain, serta modus *transaksi pass by*.

## V. BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA

Penguatan instrument dalam bidang Hukum dan Kerja Sama memiliki peran krusial dalam mendukung upaya P4GN di Indonesia. Pada lingkup aktivitas hukum, BNN berfokus pada penyusunan, harmonisasi, dan implementasi kebijakan terkait pencegahan dan pemberantasan narkoba. Langkah ini mencakup pemberian bantuan hukum, pembaruan regulasi, serta pengawasan pelaksanaan hukum agar selaras dengan perkembangan dinamika kasus narkoba di tingkat nasional maupun internasional. Dengan pendekatan hukum yang kokoh, BNN RI memastikan adanya landasan yang kuat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Sementara itu, melalui aktivitas kerja sama, BNN RI mengedepankan kolaborasi lintas lembaga, baik di dalam negeri maupun luar negeri, guna meningkatkan efektivitas upaya penanganan narkoba secara menyeluruh. BNN RI berupaya membangun sinergi dengan berbagai pihak, seperti lembaga penegak hukum, organisasi internasional, dan pemerintah asing, guna mendukung pertukaran informasi, teknologi, dan strategi pemberantasan narkoba. Dengan mengintegrasikan aktivitas hukum dan kerja sama, BNN RI berkomitmen untuk menciptakan sistem yang solid dan berkelanjutan dalam menghadapi ancaman peredaran gelap narkoba.

### A. AKTIVITAS HUKUM

#### 1. Produk Hukum yang Terbit Tahun 2024

Penyampaian Revisi Undang-Undang (RUU) Narkoba dari Presiden RI kepada Ketua DPR RI dengan menugaskan Menteri Hukum dan HAM, Menteri PAN-RB, dan Menteri Kesehatan. Pada tanggal 6 Februari 2023 telah terlaksana rapat Panitia Kerja RUU dengan mengundang Menteri Hukum dan HAM dengan usulan untuk menggabungkan Undang-Undang Narkoba dan Undang-Undang Psicotropika, kemudian Komisi III DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk menunda pembahasan RUU Narkoba.

Hingga saat ini info yang didapatkan yaitu rancangan terakhir telah disiapkan oleh Kementerian Hukum adalah RUU tentang Tata Kelola dan Pengendalian Narkoba dan Psicotropika per tanggal 13 Mei 2024.

Disisi lain BNN juga telah memberikan usulan RUU Narkoba dan Psicotropika kepada Kementerian Hukum pada tanggal 4 Oktober 2024. RUU Narkoba dan Psicotropika ini juga sudah dimasukkan dalam Prolegnas 2025 oleh Kemenkum. Selanjutnya pada tahun 2025 akan dilakukan pembahasan lanjutan bersama DPR.

NO	PRODUK HUKUM YANG TERBIT 2024	JUMLAH
1.	Peraturan Badan Narkoba Nasional	3
2.	Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional	10
<b>TOTAL</b>		<b>13</b>

Dengan rincian sebagai berikut :

#### a) Peraturan Badan Narkoba Nasional

NO	NAMA PRODUK HUKUM	ALASAN PEMBENTUKAN/ REVISI	TANGGAL PEMBENTUKAN
1	Peraturan Badan Narkoba Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang	1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta	Menunggu release dari Kementerian Hukum

NO	NAMA PRODUK HUKUM	ALASAN PEMBENTUKAN/ REVISI	TANGGAL PEMBENTUKAN
	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	<p>elayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan BNN.</p> <p>2) Merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap pimpinan instansi pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE.</p>	
2	Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota	Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK/Kota perlu disesuaikan terhadap perkembangan organisasi karena terdapat penambahan 9 BNNK atas persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sehingga perlu di ganti/ dilakukan revisi.	Menunggu release dari Kementerian Hukum
3	Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor (-) Tahun 2024 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (Corporate University) Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	Delegasi Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi ( <i>Corporate University</i> ) dan delegasi Pasal 2 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi ( <i>Corporate University</i> ), bahwa	Sedang dalam proses penetapan dan pengundangan

NO	NAMA PRODUK HUKUM	ALASAN PEMBENTUKAN/ REVISI	TANGGAL PEMBENTUKAN
		penyelenggaraan sistem pembelajaran terintegrasi ( <i>Corporate University</i> ) dilaksanakan pada tingkat nasional dan tingkat instansi.	

b) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional

NO	NAMA PRODUK HUKUM	ALASAN REVISI/ PEMBENTUKAN	TANGGAL PEMBENTUKAN
1	Peraturan Kepala BNN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 memberikan kepastian hukum bagi Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk turut serta dalam menanggulangi permasalahan narkotika. Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis RAN P4GN Tahun 2020-2024 perlu dilakukan penyesuaian terhadap target, capaian, dan pelaksanaan aksi, sehingga perlu dilakukan penggantian. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Kepala BNN tentang Petunjuk Teknis RAN P4GN.	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2024
2.	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Data Statistik	Untuk memberikan pemahaman tentang data statistik P4GN kepada masyarakat, diperlukan data yang berkualitas dan tepat guna. Pemberian data yang berkualitas dan tepat guna untuk masyarakat, memerlukan pedoman penggunaan standar data statistik di lingkungan BNN. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2024

NO	NAMA PRODUK HUKUM	ALASAN REVISI/ PEMBENTUKAN	TANGGAL PEMBENTUKAN
		Kepala BNN tentang Standar Data Statistik.	
3.	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Metadata Statistik	Dalam rangka perencanaan, evaluasi, dan pengambilan Keputusan kebijakan BNN, perlu data yang berkualitas dan tepat guna untuk masyarakat. Pemberian data yang berkualitas dan tepat perlu pedoman penggunaan metadata statistik guna memudahkan dalam memahami data dan mencegah interpretasi data. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlunya penetapan Peraturan Kepala BNN tentang Metadata statistik.	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2024
4.	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	Untuk meningkatkan pengelolaan arsip sesuai dengan fungsi dan tugas BNN, diperlukan pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien. Dalam mewujudkan pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien sebagaimana dimaksud tersebut, diperlukan klasifikasi arsip yang logis, faktual, berkelanjutan, sistematis, akomodatif, dan kronologis. Peraturan Kepala BNN Nomor 14 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip Badan Narkotika Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan organisasi sehingga perlu diganti.	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2024
5.	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Jadwal Retensi	Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu serta menjaminketersediaan arsip yang autentik, utuh, terpercaya, dan mudah	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2024

NO	NAMA PRODUK HUKUM	ALASAN REVISI/ PEMBENTUKAN	TANGGAL PEMBENTUKAN
	Arsip Badan Narkotika Nasional	<p>sebagai satu keutuhan informasi diperlukan jadwal retensi arsip untuk pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, BNN perlu menyusun jadwal retensi arsip setelah mendapatkan persetujuan Kepala ANRI. Perlu dilakukan pembaharuan terhadap jadwal retensi arsip karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dan organisasi sehingga perlu diganti. Pembaharuan jadwal retensi arsip sebagaimana dimaksud telah mendapat persetujuan dari Kepala ANRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Kepala BNN tentang Jadwal Retensi Arsip BNN.</p>	
6.	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Program Arsip Vital di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	<p>Dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan Arsip Vital bagi keberlangsungan Badan Narkotika Nasional, perlu dilakukan Program Arsip Vital di Setiap Unit Pengolah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Program Arsip Vital Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.</p>	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2024

NO	NAMA PRODUK HUKUM	ALASAN REVISI/ PEMBENTUKAN	TANGGAL PEMBENTUKAN
7.	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia wajib memiliki Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan BNN. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 6 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Badan Narkotika Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi BNN sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Kepala BNN RI tentang system Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan BNN.	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2024
8.	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pedoman Operasional Standar Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	Untuk meningkatkan pengelolaan arsip sesuai dengan fungsi dan tugas Badan Narkotika Nasional serta penyelenggaraan kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan suatu pedoman operasional standar yang efektif dan efisien. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Kepala Narkotika Nasional tentang Pedoman Operasional Standar Penyelenggaraan Kearsipan BNN.	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2024
9.	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik	Untuk melakukan penyesuaian system kerja guna mewujudkan birokrasi	Ditetapkan di Jakarta pada

NO	NAMA PRODUK HUKUM	ALASAN REVISI/ PEMBENTUKAN	TANGGAL PEMBENTUKAN
	Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pedoman Sistem Kerja Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di lingkungan BNN. Untuk memberikan acuan terhadap mekanisme kerja maka perlu disusun peraturan tentang pengaturan penyesuaian sistem kerja secara profesional dan kolaboratif di lingkungan BNN. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Kepala BNN tentang Pedoman Sistem Kerja di Lingkungan BNN.	tanggal 30 September 2024
10	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Manajemen Risiko Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta mendukung pencapaian kinerja tugas dan fungsi organisasi.  Untuk memberikan acuan terhadap manajemen risiko pembangunan nasional, maka perlu menyusun peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Kepala BNN tentang Manajemen Risiko di Lingkungan BNN	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2024

## 2. Kasus Hukum yang Ditangani Badan Narkotika Nasional

NO	KASUS	KET
1.	Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN JKT Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Pemohon Tsk Andreas Andi Mulyawan, Termohon Kepala BNN RI ( <b>Direktorat TPPU</b> )	Permohonan Ditolak
2.	Gugatan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Cbd di Pengadilan Negeri Cibadak dengan	Gugatan Tidak Dapat Diterima ( <i>Niet</i> )

NO	KASUS	KET
	Penggugat I Rika Afriyani dan Penggugat II Asri Anisa Juliyani, Tergugat II Kepala BNN RI ( <b>Direktorat TPPU</b> )	<i>Onvankijke</i> <i>Verklaard/NO</i> )
3.	Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jap di Pengadilan Negeri Jayapura dengan Pemohon Tsk Icuik Goris Gurindra dan Termohon Kepala <b>BNNP Papua</b>	Permohonan Ditolak
4.	Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Plp di Pengadilan Negeri Palopo dengan Pemohon Jumardi alias Madi bin Zakaria dan Termohon Kepala <b>BNNP Sulawesi Selatan</b>	Permohonan Ditolak
5.	Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Mtr di Pengadilan Negeri Mataram dengan Pemohon Lalu Adit Juniawan alias Adit, Termohon Kepala <b>BNNP NTB</b>	Permohonan Ditolak
6.	Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Ptk di Pengadilan Negeri Pontianak dengan Pemohon Daryl Domickan (WNA Malaysia) Termohon Kepala <b>BNNP Kalimantan Barat</b>	Permohonan Ditolak
7.	Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Ptk di Pengadilan Negeri Pontianak dengan Pemohon Jeky alias Jek Termohon Kepala <b>BNNP Kalimantan Barat</b>	Permohonan Ditolak
8.	Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2024/PN Ptk di Pengadilan Negeri Pontianak dengan Pemohon Remmond alias Rimund (WNA Malaysia) Termohon Kepala <b>BNNP Kalimantan Barat</b>	Permohonan Ditolak
9.	Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2024/PN Ptk di Pengadilan Negeri Pontianak dengan Pemohon Benny Diktus Termohon Kepala <b>BNNP Kalimantan Barat</b>	Permohonan Ditolak
10.	Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Ptk di Pengadilan Negeri Palopo dengan Pemohon Risnawati alias Bunda Risna dan Termohon Kepala <b>BNNK Palopo</b>	Permohonan Gugur
11.	Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Gin di Pengadilan Negeri Gianyar dengan Pemohon Diego Alejandro Santos (WNA Filiphine) dan Termohon Kepala BNN RI ( <b>Direktorat P2</b> )	Permohonan Ditolak
12.	Gugatan Perdata Cibadak II Nomor 34/Pdt.Bth/2024/PN Cbd di Pengadilan Negeri Cibadak dengan Pemohon Dedi Rukmana dan Termohon Kepala BNN RI ( <b>Direktorat TPPU</b> )	<i>on process</i>
13.	Gugatan TUN di Pengadilan TUN Jakarta dengan Pemohon DN dan Termohon Kepala BNN RI atas <b>Putusan Sidang Disiplin Pegawai.</b>	<i>on process</i>
14.	Praperadilan Nomor: 32/Pid.Pra/2024/PN.Plg di Pengadilan Negeri Palembang dengan	<i>on process</i>

NO	KASUS	KET
	Pemohon Yanti Baiti Binti Mulibar dan Termohon <b>Kepala BNNP Sumatera Selatan</b>	
15.	Praperadilan Nomor: 33/Pid.Pra/2024/PN.Plg di Pengadilan Negeri Palembang dengan Pemohon Yanti Baiti Binti Mulibar (istri tersangka Chairil Ubaidi Alias Dedi Bin Abdulah) dan Termohon <b>Kepala BNNP Sumatera Selatan</b>	<b>on process</b>

### 3. Tindak Lanjut Kasus Narkotika yang Dilakukan oleh WNA.

Gregore Johann Haas, Philipina.

Dalam kasus ini, BNN RI melakukan serangkaian langkah strategis, mulai dari permohonan deportasi hingga koordinasi dengan pihak berwenang di Filipina untuk memastikan proses penyerahan Haas berjalan sesuai hukum yang berlaku.

Pada tanggal 13 Februari 2024, Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengirimkan surat kepada Commissioner Bureau of Immigration Manila terkait permohonan deportasi dan penyerahan Gregor Johann Haas kepada BNN. Sebagai tindak lanjut, pada 17 Mei 2024, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat kepada National Central Bureau (NCB) Manila dan Philipines National Police (PNP) untuk memfasilitasi proses deportasi Gregor Johann Haas yang terdaftar dalam Red Notice. Permintaan tersebut bertujuan untuk memastikan proses deportasi dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pada 18 November 2024, kuasa hukum Gregor Johann Haas, Amar Law Firm & Public Interest Law Office, mengirimkan surat kepada Direktur Interdiksi BNN untuk menanyakan status hukum klien mereka di Indonesia serta dasar penerbitan permohonan deportasi dan penyerahan yang diajukan oleh BNN.

BNN menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil berlandaskan laporan kasus narkotika, surat perintah penyidikan atas enam tersangka/terpidana terkait, serta surat daftar pencarian orang yang diterbitkan oleh BNN pada 22 Desember 2023 dengan nomor DPO/48-INTD/XII/2023/BNN.

## B. AKTIVITAS KERJA SAMA

### 1. Kerja Sama Internasional

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL / LOKASI PELAKSANAAN	NEGARA / LEMBAGA PENYELENGGARA
1	<i>2<sup>nd</sup> workshop on development of ASEAN Cooperation Projects for ASOD Focal Points</i>	1 Februari 2024	Asean Sekretariat, CCDAC Myanmar
2	Kunjungan Kerja Kepala BNN ke Malaysia dan Singapura	19 s.d. 23 Februari 2024	Badan Narkotika Nasional
3	<i>The 13<sup>th</sup> Asean Airport Interdiction Task Force (AAITF)</i>	5 Maret 2024 secara virtual	CNB Singapura
4	<i>The 16<sup>th</sup> ADMN Meeting</i>	7 Maret 2024 dan 17 Juli 2024	CCDAC Myanmar

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL / LOKASI PELAKSANAAN	NEGARA / LEMBAGA PENYELENGGARA
5	<i>The 67<sup>th</sup> Commission on Narcotic Drugs (The 66<sup>th</sup> CND)</i>	13 s.d. 19 Maret 2024 di Wina, Austria	UNODC
6	Kunjungan Kerja Kepala BNN ke NTT dan Dili	27 April s.d. 3 Mei 2024	UNODC dan Badan Narkotika Nasional
7	Kunjungan Kerja Kepala Kerja Kepala BNN ke Amerika Serikat	10 s.d. 24 Mei 2024	Badan Narkotika Nasional
8	<i>Regional Workshop of Early Warning</i>	10-11 Juni 2024 di Bangkok, Thailand	UNODC
9	Peningkatan Kerja sama dan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika bagi anak-anak di wilayah perbatasan	22 s.d. 26 Juli 2024	UNODC
10	<i>Colombo Plan Drug Advisory Program national secretariats Meeting (CPDAP NSM)</i>	4 s.d. 10 Agustus 2024 di Bhutan	Colombo Plan
11	Kunjungan Kerja ke <i>Ministry of Justice Investigation Bureau (MJIB)</i> Taiwan	19 s.d. 24 Agustus 2024	MJIB Taiwan
12	Pertemuan Pertama <i>Indonesia-Thailand Security Dialogue (ITSD)</i>	5 September 2024 di Hotel Pullman, Jakarta	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
13	UNODC <i>Global Smart Forensics Regional Workshop for East and Southeast Asia 2024</i>	10 s.d. 12 September 2024 di Kamboja	Direktorat Kerja Sama
14	Idec International ke-38 di Athena, Yunani	22 s.d. 27 September 2024	DEA
15	Kunjungan <i>National Anti-Drug Agency (NADA)</i> Malaysia ke BNN tentang <i>Alternative Development BNN</i>	26 September 2024, di Badan Narkotika Nasional	Badan Narkotika Nasional dan NADA Malaysia
16	ASEAN <i>Senior Officials on Drug Matters (ASOD)</i> ke-45	2 s.d. 4 Oktober 2024, Secara virtual di Hotel Wyndham,	Filipina
17	<i>The Anti-Drug Liaison Officials' Meeting for International Cooperation (ADLOMICO)</i>	30 s.d. 31 Okt, di Korea	Supreme Prosecutors' Office (SPO) Korea
18	<i>Factory Visit Invitation for The Grant Project of Anti-Narcotics</i>	12 s.d. 15 November di Beijing dan Shanghai, China	China

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL / LOKASI PELAKSANAAN	NEGARA / LEMBAGA PENYELENGGARA
19	<i>The 3<sup>rd</sup> Intersessional Meeting of the Commission on Narcotic Drugs</i>	12 s.d. 14 November di Wina, Austria	UNODC
20	<i>The 9<sup>th</sup> ASEAN Seaport Interdiction Task Force</i>	19 s.d. 22 November 2024, Penang	NADA Malaysia
21	Kunjungan <i>Narcotics Crime Investigation Department Royal Malaysia Police (NCID RMP)</i> ke BNN	28 s.d. 29 November 2024	Badan Narkotika Nasional
22	<i>Invitation to the Regional Seminar on International Cooperation Against Drug Trafficking</i>	1 s.d. 6 Desember 2024 di Bangkok, Thailand	French Police Attache

## 2. Kerja Sama Nasional

NO	JENIS KERJA SAMA	JUMLAH
1	Dokumen Kerja Sama dengan Instansi Pemerintah	25
2	Dokumen Kerja Sama dengan BUMN	5
3	Dokumen Kerja Sama dengan Lingkungan Pendidikan	12
4	Dokumen Kerja Sama dengan Komponen Masyarakat	14
<b>JUMLAH</b>		<b>56</b>

### Dengan Rincian Sebagai Berikut:

NO	MOU	TEMA	KET
1	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Narkotika, Hukum dan Hak Asasi Manusia	Instansi Pemerintah
2	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Brawijaya	Tridarma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Instansi Pemerintah (Lingkungan Pendidikan)
3	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Penyelenggaraan Pelatihan Bersama di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Tindak Pidana Pencucian Uang	Instansi Pemerintah
4	Nota Kesepahaman Badan Narkotika Nasional dengan	Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Instansi Pemerintah

NO	MOU	TEMA	KET
	Kejaksaan Republik Indonesia		
5	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional dengan Yayasan Rumah Film Indonesia	Publikasi dan Promosi Serta Kegiatan Workshop Perfilman Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Komponen Masyarakat
6	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Instansi Pemerintah
7	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Sinergitas Tugas dan Fungsi dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Serta Prekursor Narkotika	Instansi Pemerintah
8	Perjanjian Kerja Sama antara Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor	Pelayanan Kesehatan Bagi Klien/Pasien dan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia	Instansi Pemerintah
9	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dengan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Penegakan Hukum Keimigrasian	Instansi Pemerintah
10	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui Tri Darma Perguruan Tinggi	Instansi Pemerintah (Lingkungan Pendidikan)
11	Perjanjian Kerja Sama antara Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan Puskesmas Cigombong	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Dan Puskesmas Cigombong	Instansi Pemerintah

<b>NO</b>	<b>MOU</b>	<b>TEMA</b>	<b>KET</b>
12	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Ketenagakerjaan	Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Serta Prekursor Narkotika	Instansi Pemerintah
13	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Asosiasi Dosen Indonesia	Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Serta Prekursor Narkotika	Komponen Masyarakat
14	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Kesehatan	Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Serta Prekursor Narkotika	Instansi Pemerintah
15	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Tama Jagakarsa	Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Serta Prekursor Narkotika	Komponen Masyarakat (Lingkungan Pendidikan)
16	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan	Instansi Pemerintah (BUMN)
17	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Gerakan Nasional Anti Narkotika	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Komponen Masyarakat
18	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada Nelayan dan Masyarakat Pesisir	Komponen Masyarakat
19	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah	Instansi Pemerintah (BUMN)
20	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yuridiksi Indonesia	Instansi Pemerintah

<b>NO</b>	<b>MOU</b>	<b>TEMA</b>	<b>KET</b>
21	Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Replikasi Sistem Informasi Elektronik Reformasi Birokrasi (E-RB) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)	Instansi Pemerintah
22	Perjanjian Kerja Sama antara Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung Barat	Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Instansi Pemerintah
23	Perjanjian Kerja Sama antara Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bina Warga Mandiri	Pelayanan Pendidikan dan Pengembangan Klien dan Pegawai Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional	Komponen Masyarakat (Lingkungan Pendidikan)
24	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Majelis Ulama Indonesia	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Komponen Masyarakat
25	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Ikatan Profesional Bidang Penyalahgunaan Napza dan Perilaku Adiktif	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Komponen Masyarakat
26	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Sinergi Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Banyuwangi	Instansi Pemerintah
27	Perjanjian Kerja Sama antara Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan Rumah Sakit Vania Bogor	Pelayanan Penunjang Kesehatan bagi Klien/Pasien Spesialistik serta Penyebarluasan Informasi dan Edukasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika	Komponen Masyarakat
28	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor	Instansi Pemerintah

NO	MOU	TEMA	KET
	dengan Arsip Nasional Republik Indonesia	Narkotika serta Penyelenggaraan Kearsipan	
29	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Komponen Masyarakat
30	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat	Sinergi Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Manggarai Barat	Instansi Pemerintah
31	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Komponen Masyarakat (Lingkungan Pendidikan)
32	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Badan Amil Zakat Nasional	Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Instansi Pemerintah
33	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dengan PT Lion Group	Pelaksanaan Pemberantasan dalam Upaya Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika	Komponen Masyarakat
34	Perjanjian Kerja Sama antara Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional dengan Puskesmas Kramat Jati Provinsi DKI Jakarta	Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Human Immunodeficiency Virus (HIV), Inkubasi Menular Seksual (IMS) dan Tata Laksana Tuberkulosis (TBC) dengan Strategi Directly Observed Treatment Short-Course (DOTS)	Instansi Pemerintah
35	Perjanjian Kerja Sama antara Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional dengan Puskesmas Kramat Jati Provinsi DKI Jakarta	Dukungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Mensukseskan Program Kesehatan Nasional dan Daerah	Instansi Pemerintah
36	Nota Kesepahaman antara Badan	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran	Komponen Masyarakat

NO	MOU	TEMA	KET
	Narkotika Nasional dengan Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba	Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berbasis Tridarma Perguruan Tinggi	
37	Perjanjian Kerja Sama antara Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan Kelompok Kerja Neurorestorasi-Neuroengineering Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia	Pengembangan dan Pemanfaatan Metode Terapi Medis pada Rehabilitasi Narkotika	Komponen Masyarakat
38	Perjanjian Kerja Sama antara Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional dengan Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional	Penguatan Pengawasan Intern Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Instansi Pemerintah
39	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional dengan PT Pabrik Gula Rajawali II	Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Alternative Development pada Masyarakat di Kawasan Rawan Narkoba di Provinsi Jawa Barat	Komponen Masyarakat (BUMN)
40	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara	Penyelenggaraan Akreditasi Program Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Narkotika Nasional	Instansi Pemerintah
41	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui Tridarma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	Komponen Masyarakat (Lingkungan Pendidikan)

NO	MOU	TEMA	KET
42	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional Dengan ID Next Leader	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Bidang Hukum dan Kerja Sama	Komponen Masyarakat
43	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Lampung	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui Tridarma Perguruan Tinggi	Instansi Pemerintah (Lingkungan Pendidikan)
44	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Negeri Surabaya	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui Tridarma Perguruan Tinggi	Instansi Pemerintah (Lingkungan Pendidikan)
45	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kawasan Perbatasan Negara	Instansi Pemerintah
46	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Dalam Negeri	Sinergi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Instansi Pemerintah
47	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan PT Perkebunan Nusantara III	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Instansi Pemerintah (BUMN)
48	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Hukum Dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta	Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	Instansi Pemerintah (Lingkungan Pendidikan)
49	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Komponen Masyarakat

<b>NO</b>	<b>MOU</b>	<b>TEMA</b>	<b>KET</b>
50	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi	Penyelenggaraan Pemasangan Perangkat Penyidikan, Penyediaan Informasi dan Pelaksanaan Operasional dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Komponen Masyarakat
51	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Kristen Indonesia	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui Tridarma Perguruan Tinggi	Komponen Masyarakat (Lingkungan Pendidikan)
52	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Satuan Kerja Pemasyarakatan	Instansi Pemerintah
53	Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pemberantasan BNN dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan	Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Instansi Pemerintah
54	Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Pendidikan Ganesha	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui Tridarma Perguruan Tinggi	Instansi Pemerintah (Lingkungan Pendidikan)
55	Nota Kesepahaman antara BNN dengan PT Kereta Api Indonesia	Optimalisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Instansi Pemerintah (BUMN)
56	Nota Kesepahaman antara BNN dengan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui Tridarma Perguruan Tinggi	Komponen Masyarakat (Lingkungan Pendidikan)

## VI. PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN

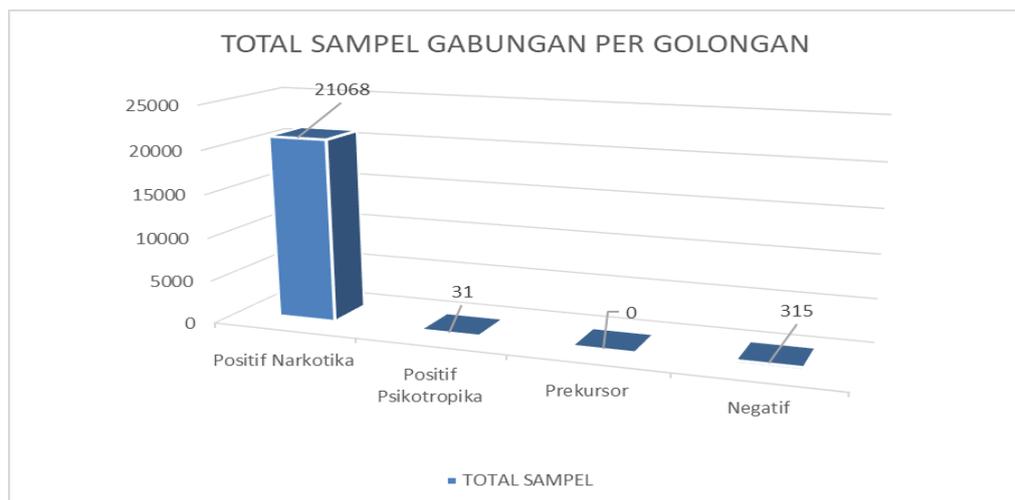
### A. DATA SAMPEL 2024

Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, merupakan satuan kerja pendukung teknis aspek laboratorium pada BNN yang mempunyai tugas melaksanakan pengujian laboratorium, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika. Saat ini, Pusat Laboratorium Narkotika telah memiliki dukungan kedaerahan berupa 5 Laboratorium Daerah, diantaranya di Laboratorium Narkotika Deli Serdang Sumatera Utara, Laboratorium Narkotika Baddoka Makassar, dan Laboratorium Narkotika Samarinda Kalimantan Timur, serta 1 Laboratorium Daerah Bangkalan yang saat ini sedang dalam proses pemenuhan SDM dan Sarana Prasarana sehingga dapat lebih memperluas wilayah layanan Laboratorium Narkotika. Semua Laboratorium Narkotika Daerah memiliki fungsi dan tugas yang sama yang dapat mendukung Badan Narkotika Nasional secara teknis laboratorium yang menjangkau hampir seluruh Indonesia.

Data sampel yang telah diuji di Pusat Laboratorium Narkotika dan Laboratorium Narkotika Daerah didapat dari seluruh Satuan Kerja Badan Narkotika Nasional, Instansi Kepolisian, TNI dan Instansi lain. Sampel yang diterima dan diuji di Pusat Laboratorium Narkotika BNN meliputi sampel Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dengan total sampel sebagai berikut:

No	LABORATORIUM	NARKO-TIKA	PSIKO TROPIKA	PRE KURSOR	NEG	JML
1	Pusat Laboratorium Narkotika, Lido	16345	27	0	181	16553
2	Laboratorium Narkotika Di Deli Serdang, Sumatera Utara	2415	3	0	45	2463
3	Laboratorium Narkotika Di Samarinda, Kalimantan Timur	1687	0	0	14	1701
4	Laboratorium Narkotika Di Baddoka Makassar, Sulawesi Selatan	644	1	0	75	720
<b>TOTAL</b>		<b>21091</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>21437</b>

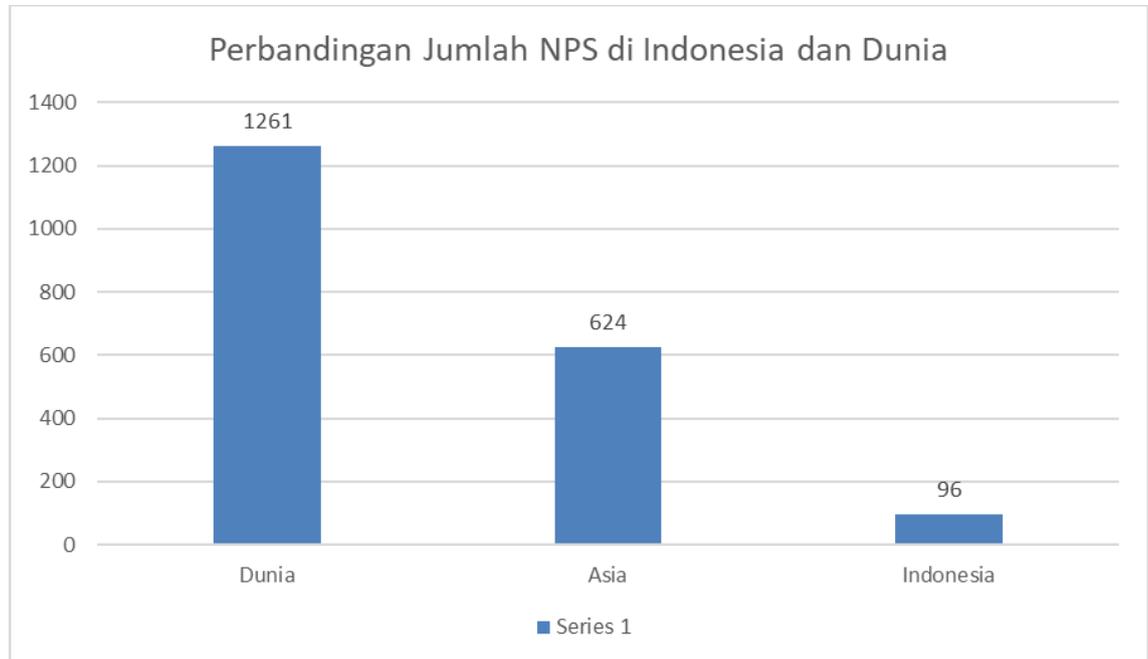
\*Data per tanggal 12 Desember 2024



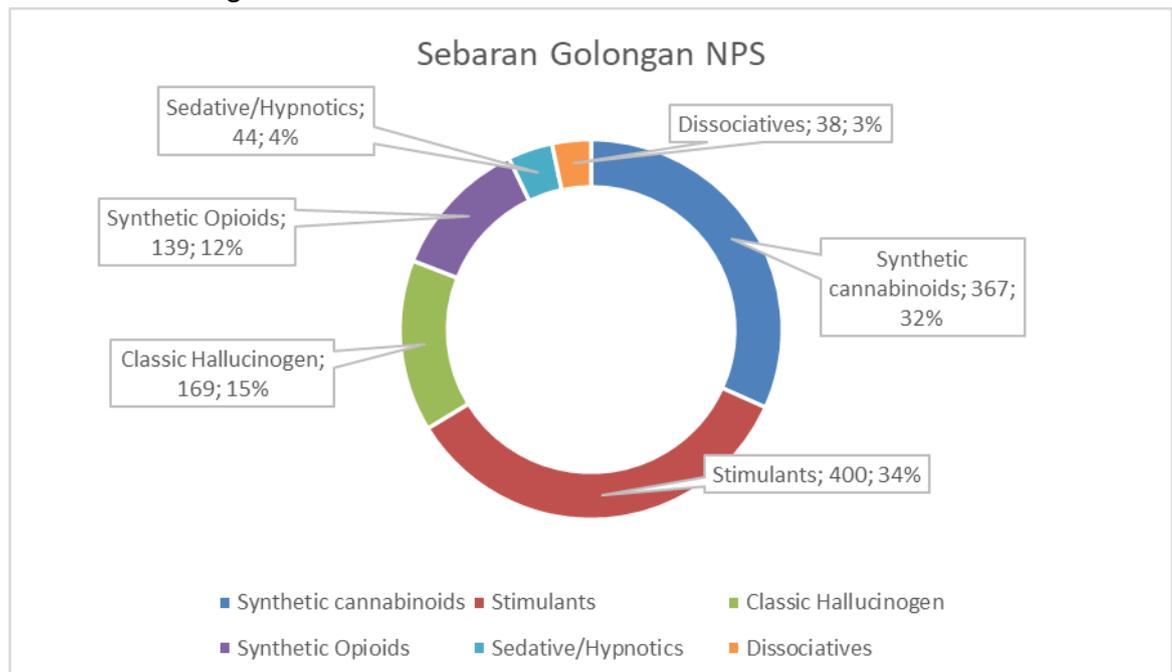
## B. DAFTAR NAMA NPS 2024

### 1. Perbandingan NPS di Indonesia dan Dunia

Sampai dengan tahun 2024, sebanyak 1261 New Psychoactive Substances (NPS) dilaporkan ke UNODC dari 148 negara partisipan yang terus memperbaharui data (termasuk Indonesia). Data tersebut dapat dilihat di website UNODC secara realtime. Dari Indonesia sendiri sudah menemukan 96 zat NPS. Perbandingan data NPS yang sudah ditemukan di Indonesia dengan seluruh dunia dapat dilihat pada grafik berikut:



### Sebaran Golongan NPS di Dunia



Sumber data : <https://www.unodc.org/LSS/Page/NPS/DataVisualisations>

## 2. Data NPS yang ditemukan di Indonesia

Tabel *New Psychoactive Substances* (NPS) yang teregulasi

NO	NAMA ZAT	GOLONGAN	TAHUN REGULASI	PENGGOLONGAN NPS DALAM REGULASI
1	2	3	4	5
1	5-APB	<i>Phenethylamines</i>	2014	Narkotika Golongan I
2	6-APB	<i>Phenethylamines</i>	2014	Narkotika Golongan I
3	25B-NBOMe	<i>Phenethylamines</i>	2014	Narkotika Golongan I
4	2C-B	<i>Phenethylamines</i>	2014	Narkotika Golongan I
5	25C-NBOMe, nama lain 2C-C- NBOMe	<i>Phenethylamines</i>	2014	Narkotika Golongan I
6	DIMETILAMFETAMINE , nama lain DMA	<i>Phenethylamines</i>	2014	Narkotika Golongan I
7	DOC	<i>Phenethylamines</i>	2014	Narkotika Golongan I
8	ETKATINONA, nama lain N- ETILKATINONA	<i>Synthetic cathinones</i>	2014	Narkotika Golongan I
9	JWH-018	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2014	Narkotika Golongan I
10	MDPV, nama lain 3,4- METILENDIOKSIPIRO VALERON	<i>Synthetic cathinones</i>	2014	Narkotika Golongan I
11	MEFEDRON, nama lain 4-MMC	<i>Synthetic cathinones</i>	2014	Narkotika Golongan I
12	METILON, nama lain MDMC	<i>Synthetic cathinones</i>	2014	Narkotika Golongan I
13	4-METILETKATINONA, nama lain 4-MEC	<i>Synthetic cathinones</i>	2014	Narkotika Golongan I
14	MPHP	<i>Synthetic cathinones</i>	2014	Narkotika Golongan I
15	25I-NBOMe, nama lain 2C-I- NBOMe	<i>Phenethylamines</i>	2014	Narkotika Golongan I
16	PENTEDRON	<i>Synthetic cathinones</i>	2014	Narkotika Golongan I
17	PMMA. p- METOKSIMETAMFETA MINA, nama lain PARA- METOKSIMETILAMFE TAMINA, 4- MMA	<i>Phenethylamines</i>	2014	Narkotika Golongan I
18	XLR-11	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2014	Narkotika Golongan I
19	5-FLUORO AKB 48, nama lain 5F- APINACA	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2017	Narkotika Golongan I
20	BENZILPIPERAZIN (BZP), N- BENZILPIPERAZIN	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2017	Narkotika Golongan I
21	FUB-144, nama lain FUB-UR-144	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2017	Narkotika Golongan I
22	AB-CHMINACA	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2017	Narkotika Golongan I
23	AB-FUBINACA	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2017	Narkotika Golongan I
24	FUB-AMB, nama lain AMB- FUBINACA	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2017	Narkotika Golongan I

NO	NAMA ZAT	GOLONGAN	TAHUN REGULASI	PENGGOLONGAN NPS DALAM REGULASI
1	2	3	4	5
25	AB-PINACA	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2017	Narkotika Golongan I
26	THJ-2201	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2017	Narkotika Golongan I
27	THJ-018	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2017	Narkotika Golongan I
28	MAB-CHMINACA, nama lain ADB- CHMINACA	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2017	Narkotika Golongan I
29	ADB-FUBINACA	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2017	Narkotika Golongan I
30	MDMB-CHMICA, nama lain MMB- CHMINACA	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2017	Narkotika Golongan I
31	5-Fluoro-ADB	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2017	Narkotika Golongan I
32	AKB-48	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2017	Narkotika Golongan I
33	4-APB	<i>Phenethylamines</i>	2017	Narkotika Golongan I
34	ETILON, nama lain bk- MDEA, MDEC	<i>Synthetic cathinones</i>	2017	Narkotika Golongan I
35	TFMPP	<i>Piperazines</i>	2017	Narkotika Golongan I
36	Alfa-Metiltriptamina	<i>Tryptamines</i>	2017	Narkotika Golongan I
37	5-MeO-MIPT	<i>Tryptamines</i>	2017	Narkotika Golongan I
38	METOKSETAMINA, nama lain MXE	<i>Phencyclidine- type Substances</i>	2017	Narkotika Golongan I
39	BUFEDRON, nama lain METILAMINO- BUTIROFENON	<i>Synthetic cathinones</i>	2017	Narkotika Golongan I
40	4- KLOROMETKATINONA , nama lain 4-CMC, KLEFEDRON	<i>Synthetic cathinones</i>	2017	Narkotika Golongan I
41	AH-7921	<i>Fentanyl Analogues</i>	2017	Narkotika Golongan I
42	4-MTA	<i>Phenethylamines</i>	2017	Narkotika Golongan I
43	AM-2201	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2017	Narkotika Golongan I
44	Asetilfentanil	<i>Fentanyl Analogues</i>	2017	Narkotika Golongan I
45	MT-45	<i>Fentanyl Analogues</i>	2017	Narkotika Golongan I
46	Alfa-PVP	<i>Synthetic cathinones</i>	2017	Narkotika Golongan I
47	4,4'-DMAR	<i>Other Substances</i>	2017	Narkotika Golongan I
48	Tanaman Khat	<i>Plant-based Substances</i>	2017	Narkotika Golongan I
49	META- KLOROFENILPIPERAZ IN (MCPP)	<i>Piperazines</i>	2017	Narkotika Golongan II
50	Dihidroetorfin	<i>Fentanyl Analogues</i>	2017	Narkotika Golongan II
51	Oripavin	<i>Fentanyl Analogues</i>	2017	Narkotika Golongan II
52	Remifentanil	<i>Fentanyl Analogues</i>	2017	Narkotika Golongan II
53	CB 13, nama lain CRA 13 atau SAB-378	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2017	Narkotika Golongan III
54	JWH-073	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2017	Narkotika Golongan I
55	JWH-122	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2017	Narkotika Golongan I

NO	NAMA ZAT	GOLONGAN	TAHUN REGULASI	PENGGOLONGAN NPS DALAM REGULASI
1	2	3	4	5
56	5-KLORO AKB 48, nama lain 5-Cl-APINACA	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2017	Narkotika Golongan I
57	5-FLUORO-AMB, nama lain 5-FLUORO-AMP, 5F-AMB-PINACA	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2017	Narkotika Golongan I
58	SDB-005	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2017	Narkotika Golongan I
59	5-Fluoro-ADBICA	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2017	Narkotika Golongan I
60	EMB-Fubinaca	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2017	Narkotika Golongan I
61	MMB-CHMICA	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2017	Narkotika Golongan I
62	2C-I, nama lain 4-IODO-2,5- DMPEA	<i>Phenethylamines</i>	2017	Narkotika Golongan I
63	2C-C	<i>Phenethylamines</i>	2017	Narkotika Golongan I
64	2C-H	<i>Phenethylamines</i>	2017	Narkotika Golongan I
65	PMEA; p-METOKSIETILAMFETAMINA, nama lain  PARAMETOKSIETILAMFETAMINA	<i>Phenethylamines</i>	2017	Narkotika Golongan I
66	Mexedron	<i>Synthetic cathinones</i>	2017	Narkotika Golongan I
67	PENTILON, nama lain bk-METIL- K, bk-MBDP	<i>Synthetic cathinones</i>	2017	Narkotika Golongan I
68	EPILON, nama lain N-ETILPENTILON	<i>Synthetic cathinones</i>	2017	Narkotika Golongan I
69	4-CEC, nama lain 4-KLOROETKATINON	<i>Synthetic cathinones</i>	2017	Narkotika Golongan I
70	BENZEDRON, nama lain 4-MBC	<i>Synthetic cathinones</i>	2017	Narkotika Golongan I
71	U-47700	<i>Fentanyl Analogues</i>	2017	Narkotika Golongan I
72	Metiopropamina	<i>Phenethylamines</i>	2017	Narkotika Golongan I
73	4-Fluoro-Alfa-PVP	<i>Synthetic cathinones</i>	2017	Narkotika Golongan I
74	4-Kloro-Alfa-PVP	<i>Synthetic cathinones</i>	2017	Narkotika Golongan I
75	4-Bromo-Alfa-PVP	<i>Synthetic cathinones</i>	2017	Narkotika Golongan I
76	N-Etilheksedron	<i>Synthetic cathinones</i>	2017	Narkotika Golongan I
77	PB-22	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2017	Narkotika Golongan I
78	MAM-2201	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2017	Narkotika Golongan I
79	FDU-PB-22	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2017	Narkotika Golongan I
80	FUB-PB-22	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2017	Narkotika Golongan I
81	Tanaman Banistreriopsis caapi dan Psychotria viridis (Ayahuasca)	<i>Plant-based Substances</i>	2017	Narkotika Golongan I

NO	NAMA ZAT	GOLONGAN	TAHUN REGULASI	PENGGOLONGAN NPS DALAM REGULASI
1	2	3	4	5
82	Tanaman Mimosa tenuiflora	<i>Plant-based Substances</i>	2017	Narkotika Golongan I
83	Butirfentanil	<i>Fentanyl Analogues</i>	2018	Narkotika Golongan I
84	Karfentanil	<i>Fentanyl Analogues</i>	2018	Narkotika Golongan I
85	Okfentanil	<i>Fentanyl Analogues</i>	2018	Narkotika Golongan I
86	Furanilfentanil	<i>Fentanyl Analogues</i>	2018	Narkotika Golongan I
87	Akriiloilfentanil	<i>Fentanyl Analogues</i>	2018	Narkotika Golongan I
88	4-Fluoroisobutirifentanil	<i>Fentanyl Analogues</i>	2018	Narkotika Golongan I
89	Tetrahidrofuranilfentanil	<i>Fentanyl Analogues</i>	2018	Narkotika Golongan I
90	4-Fluoroamfetamina (4-FA)	<i>Phenethylamines</i>	2018	Narkotika Golongan I
91	3-Fluoroamfetamina (3-FA)	<i>Phenethylamines</i>	2018	Narkotika Golongan I
92	4-Fluorometamfetamina (4-FMA)	<i>Phenethylamines</i>	2018	Narkotika Golongan I
93	3-Fluorometamfetamina (3-FMA)	<i>Phenethylamines</i>	2018	Narkotika Golongan I
94	FUB-AKB 48	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2018	Narkotika Golongan I
95	UR-144	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2018	Narkotika Golongan I
96	Diphenidine	<i>Phencyclidine type substances</i>	2018	Narkotika Golongan I
97	Methoxphenidine	<i>Phencyclidine- type Substances</i>	2018	Narkotika Golongan I
98	3-Methoxphenidine	<i>Phencyclidine type substances</i>	2018	Narkotika Golongan I
99	4-Methoxphenidine	<i>Phencyclidine type substances</i>	2018	Narkotika Golongan I
100	Parafluorobutiril fentanil	<i>Fentanyl Analogues</i>	2019	Narkotika Golongan I
101	Parametoksibutiril fentanil	<i>Fentanyl Analogues</i>	2019	Narkotika Golongan I
102	Ortofluorofentanil	<i>Fentanyl Analogues</i>	2019	Narkotika Golongan I
103	Metoksiasetilfentanil	<i>Fentanyl Analogues</i>	2019	Narkotika Golongan I
104	Siklopropilfentanil	<i>Fentanyl Analogues</i>	2019	Narkotika Golongan I
105	5F-MDMB-PICA	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2019	Narkotika Golongan I
106	CUMIL-4CN-BINACA	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2019	Narkotika Golongan I
107	5F-AB-PINACA	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2019	Narkotika Golongan I
108	5F-CUMIL-P7AICA	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2019	Narkotika Golongan I
109	NM-2201	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2019	Narkotika Golongan I
110	EAM-2201	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2019	Narkotika Golongan I
111	Eutilon	<i>Synthetic cathinones</i>	2019	Narkotika Golongan I
112	Dibutilon	<i>Synthetic cathinones</i>	2019	Narkotika Golongan I
113	3,4-Metilendioksi-N-Benzilkatina	<i>Synthetic cathinones</i>	2019	Narkotika Golongan I
114	MDMB-FUBINACA	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2020	Narkotika Golongan I
115	MMB-FUBICA	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2020	Narkotika Golongan I

NO	NAMA ZAT	GOLONGAN	TAHUN REGULASI	PENGGOLONGAN NPS DALAM REGULASI
1	2	3	4	5
116	4F-MDMB-BINACA	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2020	Narkotika Golongan I
117	5F-NNEI	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2020	Narkotika Golongan I
118	5F-EMB-PINACA	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2020	Narkotika Golongan I
119	5F-EDMB-PINACA	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2020	Narkotika Golongan I
120	MMB-2201	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2020	Narkotika Golongan I
121	MDMB-4en-PINACA	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2020	Narkotika Golongan I
122	pFPP	<i>Piperazines</i>	2020	Narkotika Golongan I
123	4F-Pentedron	<i>Synthetic cathinones</i>	2021	Narkotika Golongan I
124	Alfa-PHP	<i>Synthetic cathinones</i>	2021	Narkotika Golongan I
125	Alfa-PiHP	<i>Synthetic cathinones</i>	2021	Narkotika Golongan I
126	MDMB-FUBICA	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2021	Narkotika Golongan I
127	APP-BINACA	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2021	Narkotika Golongan I
128	Crotonil Fentanil	<i>Fentanyl Analogues</i>	2021	Narkotika Golongan I
129	Valeril Fentanil	<i>Fentanyl Analogues</i>	2021	Narkotika Golongan I
130	4F-MDMB-BUTICA	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2022	Narkotika Golongan I
131	5F-EMB-PICA	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2022	Narkotika Golongan I
132	4F-ABUTINACA	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2022	Narkotika Golongan I
133	5F-EDMB-PICA	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2022	Narkotika Golongan I
134	ADB-BUTINACA	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2022	Narkotika Golongan I
135	2-CE	<i>Phenethylamines</i>	2022	Narkotika Golongan I
136	1P-LSD	<i>Other Substances</i>	2022	Narkotika Golongan I
137	ISOTONITAZENE	<i>Nitazenes</i>	2022	Narkotika Golongan I
138	3-METHOXYPHENCYCLIDINE	<i>Phencyclidine- type Substances</i>	2022	Narkotika Golongan I
139	CUMYL-PEGACLONE	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2022	Narkotika Golongan I
140	MDMB-BUTINACA	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2022	Narkotika Golongan I
141	MDMB-INACA	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2022	Narkotika Golongan I
142	BZO-POXIZID	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2022	Narkotika Golongan I
143	BZO-4en-POXIZID	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2022	Narkotika Golongan I
144	BZO-HEXOXIZID	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2022	Narkotika Golongan I
145	ADB-FUBIATA	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2022	Narkotika Golongan I
146	Metonitazene	<i>Nitazenes</i>	2022	Narkotika Golongan I
147	Brorphine	<i>Other Substances</i>	2022	Narkotika Golongan I
148	Amineptina	<i>Other Substances</i>	2017	Psikotropika Golongan II

NO	NAMA ZAT	GOLONGAN	TAHUN REGULASI	PENGGOLONGAN NPS DALAM REGULASI
1	2	3	4	5
149	Zolpidem	<i>Other Substances</i>	2017	Psikotropika Golongan IV
150	Fenazepam	<i>Benzodiazepines</i>	2017	Psikotropika Golongan IV
151	Etilfenidat	<i>Phenidates</i>	2017	Psikotropika Golongan II
152	Etizolam	<i>Benzodiazepines</i>	2018	Psikotropika Golongan II
153	Diclazepam	<i>Benzodiazepines</i>	2018	Psikotropika Golongan II
154	2F-Deskloroketamin	<i>Phencyclidine-type Substances</i>	2020	Psikotropika Golongan I
155	Deskloroketamin	<i>Phencyclidine-type Substances</i>	2020	Psikotropika Golongan I
156	Flubromazolam	<i>Benzodiazepines</i>	2021	Psikotropika Golongan I
157	Flualprazolam	<i>Benzodiazepines</i>	2021	Psikotropika Golongan I
158	Clonazolam	<i>Benzodiazepines</i>	2022	Psikotropika Golongan I
159	Metilbenzilpiperazin (MBZP)	<i>Piperazines</i>	2023	Narkotika Golongan I
160	MDMB-5Br-INACA	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2023	Narkotika Golongan I
161	N-N-Dimetilpentilon	<i>Synthetic cathinones</i>	2023	Narkotika Golongan I
162	Fluorexetamin	<i>Phencyclidine-type Substances</i>	2023	Psikotropika Golongan I
163	Dibenzilpiperazin (DBZP)	<i>Piperazines</i>	2023	Narkotika Golongan I
164	2-Metilmetkatinona (2-MMC)	<i>Synthetic cathinones</i>	2023	Narkotika Golongan I
165	3-Metilmetkatinona (3-MMC)	<i>Synthetic cathinones</i>	2023	Narkotika Golongan I
166	5F-MDA-19	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2023	Narkotika Golongan I
167	5-Fluoro-PB-22	<i>Synthetic cannabinoids</i>	2017	Narkotika Golongan I
<b>Belum diatur Undang – Undang</b>				
168	KETAMIN	<i>Phencyclidine-type Substances</i>	-	-
169	KRATOM	<i>Plant-based Substances</i>	-	-
170	ALPHA-PROPILAMINOPENTIOFENON	<i>Synthetic cathinones</i>	-	-
171	MDMB-5-Methyl-INACA	<i>Synthetic cannabinoids</i>	-	-
172	Bromazolam	<i>Benzodiazepines</i>	-	-

### C. PENGHARGAAN YANG DITERIMA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN RI

#### 1. Penghargaan Pelayanan Prima

Dalam komitmen Pusat Laboratorium Narkotika terhadap Pelayanan Prima, Kementerian PAN dan RB kembali memberikan penghargaan sebagai Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik Dengan Predikat Pelayanan Prima pada PEKPPP Tahun 2024. Penghargaan ini diberikan pada 8 Oktober 2024.



## 2. Akreditasi SNI ISO/IEC 17043:2023 sebagai Laboratorium Penyelenggara Uji Profisiensi

Pusat Laboratorium Narkotika saat ini berhasil mempertahankan status akreditasi dengan standar terbaru dari SNI ISO/IEC 17043:2010 menjadi SNI ISO/IEC 17043:2023 yang diberikan oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan telah ditetapkan pada tanggal 4 April 2024 dengan nomor akreditasi PUP-033-IDN. SNI ISO/IEC 17043:2023 merupakan standar internasional tentang penilaian kesesuaian persyaratan umum uji profisiensi. Pusat Laboratorium Narkotika menggunakan standar kompetensi SNI ISO/IEC 17043:2023 untuk mengembangkan sistem manajemen mutu, administratif dan penyelenggaraan uji profisiensi. Peserta yang diibatkan dalam uji profisiensi ini adalah laboratorium yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian narkotika sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika.



## 3. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh Kemenpan RB

Hasil yang diperoleh berdasarkan LHE BNN menunjukkan bahwa Perolehan nilai pada tahun 2023 3,27 Kriteria "B-" Predikat "baik" meningkat pada **tahun 2024** menjadi **4,51 Kriteria "A" predikat "pelayanan prima"**. Nilai ini diperoleh dari perwakilan UPP

Pusat Laboratorium Narkotika BNN, Direktorat Psikotropika dan Prekursor, dan Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat yang telah dinilai pada Mei - September tahun 2024.

**REKAPITULASI HASIL  
PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2024**

Kementerian / Lembaga : Badan Narkotika Nasional

Periode Penilaian : Mei - September 2024

No.	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input (21.85)	Proses (32.37)	Output (24.24)	Pengaduan (21.54)	
1	Direktorat Psikotropika dan Prekursor	19.67	28.65	22.94	21.01	92.28
2	Pusat Laboratorium Narkotika	20.08	29.68	23.27	21.54	94.58
3	Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	20.62	28.48	22.69	21.01	92.79
Nilai Akhir dan Zona		93.22				
Kategori		A				
Opini		Kualitas Tertinggi				

#### 4. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan oleh Ombudsman RI

Hasil yang diperoleh berdasarkan LHE BNN menunjukkan bahwa nilai pada tahun 2023 sebesar 78,42 predikat B "Kualitas Tinggi" **meningkat pada tahun 2024 menjadi 93,22 predikat A "Kualitas Tertinggi"**. Nilai ini diperoleh BNN melalui perwakilan UPP Direktorat Psikotropika dan Prekursor, Pusat Laboratorium Narkotika dan Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat. Penghargaan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik



## VII. PUSAT PENELITIAN DATA DAN INFORMASI (PUSLITDATIN)

Kepercayaan Masyarakat terhadap BNN merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong pelaksanaan program P4GN. Sejak tahun 2021, BNN sebagai leading sector dalam penanggulangan permasalahan narkoba di Indonesia telah mengukur indeks kepercayaan masyarakat terhadap BNN setiap tahun. Mengingat kepercayaan masyarakat bersifat dinamis, maka pada tahun 2024 BNN kembali melakukan pengukuran indeks kepercayaan masyarakat terhadap BNN mulai dari tingkat pusat hingga tingkat provinsi.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap BNN diperoleh kesimpulan bahwa **Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap BNN Tahun 2024** sebesar **87,81** dalam kategori **“Sangat Baik” (dalam skala 84,01-100)**. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar **0,54** dibandingkan tahun **2023** yang bernilai **87,27**. Hasil survei ini dapat dijadikan sebagai motivasi BNN dalam meningkatkan kinerja dan kualitas program P4GN terutama melalui layanan publik yang dilaksanakan di lingkungan BNN.

Selain mengukur Indeks Kepercayaan Masyarakat Tahun 2024 BNN juga melaksanakan **Survei Kepuasan Masyarakat** untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap kualitas dan efektivitas layanan publik yang diberikan oleh BNN, di mana masyarakat memberikan umpan balik tentang pengalaman mereka terhadap pelayanan yang diterima. Pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan BNN secara umum mencerminkan tingkat kualitas **“Sangat Baik”** dengan nilai rata-rata SKM **88,95**.

Adapun jenis pelayanan yang dinilai dalam survei ini sebanyak 16 (enam belas) layanan yaitu contact center, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) sekolah, KIE masyarakat, tes urine, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN), Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH), data hasil penelitian, besuk tahanan, pengembangan kapasitas penggiat, bimbingan teknis, pengadaan barang jasa, perpustakaan BNN, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), media sosial, dan museum. Hasil dari survei ini digunakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki layanan yang ada, serta untuk memastikan bahwa kebutuhan dan harapan masyarakat terpenuhi dengan baik.

## VIII. PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (PPSDM)

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks dalam pemberantasan narkotika, pengembangan kompetensi sumber daya manusia menjadi elemen krusial untuk memastikan efektivitas program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Badan Narkotika Nasional (BNN) memanfaatkan momentum tahun 2024 sebagai tonggak penting untuk memperkuat peran petugas intelijen melalui pendekatan pelatihan berbasis kebutuhan nyata.

Dengan menggandeng mitra strategis seperti Australian Federal Police (AFP), Drug Enforcement Administration (DEA), dan lembaga internasional lainnya, PPSDM BNN tidak hanya meningkatkan kapabilitas teknis dan analitis para pegawai, tetapi juga membangun jejaring kolaborasi yang relevan untuk menghadapi ancaman lintas batas. Di tingkat nasional, kerja sama dengan lembaga seperti LAN RI, ANRI, dan PPAK memperkuat fondasi pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan domestik.

Fokus utama pada intelijen tidak hanya meningkatkan keahlian individu dalam pengumpulan informasi dan analisis, tetapi juga memperkuat strategi kolektif dalam perang melawan peredaran gelap narkotika. Dengan pendekatan ini, PPSDM BNN menempatkan diri sebagai pusat unggulan yang adaptif, inovatif, dan strategis dalam pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung misi besar bangsa menuju Indonesia yang bebas dari ancaman narkoba.

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Badan Narkotika Nasional (BNN) terus berkomitmen menjadi pusat unggulan dalam pengembangan kompetensi pegawai, terutama dalam mendukung upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Tahun 2024 menjadi momen penting bagi PPSDM BNN, dengan fokus utama pada penguatan kompetensi petugas intelijen melalui berbagai program pelatihan dan kolaborasi strategis baik di tingkat nasional maupun internasional.

### Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2024

Pada tahun ini, PPSDM BNN telah menggelar berbagai kegiatan pengembangan kompetensi, meliputi:

- 12 Kegiatan Pelatihan:
  - 10 pelatihan teknis untuk meningkatkan keterampilan operasional pegawai, termasuk penguatan kemampuan intelijen dan analisis narkotika.
  - 2 pelatihan manajerial untuk membangun kepemimpinan yang adaptif dan strategis.
- 2 Kegiatan Bimbingan Teknis: Memperdalam pemahaman teknis dan prosedural untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional sehari-hari.
- 5 Webinar: Memberikan akses pembelajaran yang fleksibel dengan topik-topik terkini.
- 2 Workshop: Salah satunya adalah workshop bertajuk *Digging Deeper: Narcotics Analyst* yang melibatkan kolaborasi dengan Drug Enforcement Administration (DEA).

Sebanyak 1.733 pegawai telah menerima pengembangan kompetensi sepanjang tahun 2024, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2023 yang melibatkan 1.451 pegawai, dan tahun 2022 dengan jumlah 1.110 pegawai.

### Kolaborasi Strategis di Tingkat Internasional

PPSDM BNN terus memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, untuk meningkatkan kualitas program pelatihan. Beberapa kolaborasi penting pada tahun 2024 meliputi kerja sama bersama:

1. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC): UNODC mendukung pelatihan penyuluh narkoba BNN dalam penguatan kapasitas pemberantasan narkotika di Indonesia. Program ini dirancang untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan penyuluh dalam mencegah penyalahgunaan narkotika.
2. Australian Federal Police (AFP): Dalam upaya penguatan intelijen, AFP bekerja sama dengan BNN untuk memberikan pelatihan pengembangan personel intelijen yang kompeten. Selain itu, AFP berbagi pengalaman dalam penanganan *clandestine labs*, memperkaya wawasan pegawai BNN dalam mengatasi tantangan operasional di lapangan.
3. Drug Enforcement Administration (DEA): Workshop *Digging Deeper: Narcotics Analyst* menjadi salah satu bukti nyata dari kerja sama strategis antara BNN dan DEA. Workshop ini berfokus pada penguatan kemampuan analisis narkotika dan strategi intelijen untuk mendukung penegakan hukum yang efektif.

### **Kolaborasi Strategis di Tingkat Nasional**

Selain kerja sama internasional, PPSDM BNN juga menjalin sinergi dengan berbagai instansi dalam negeri, baik sebagai fasilitator maupun peserta pelatihan. Beberapa mitra strategis di tingkat nasional meliputi:

1. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI): Mendukung pelatihan dalam pengembangan manajerial dan administrasi publik.
2. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI): Mengintegrasikan pelatihan pengelolaan arsip yang mendukung tugas operasional BNN.
3. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu): Berkontribusi pada pelatihan kerja sama
4. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): Mendukung pelatihan terkait tata kelola pemerintahan dan hubungan antar lembaga.
5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK): Memperkuat kemampuan analisis keuangan untuk mendukung pemberantasan peredaran narkotika.
6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN): Memberikan pandangan dan pembahasan isu terkini dalam bidang keamanan siber.
7. Universitas Indonesia (UI): Menyediakan tenaga ahli dan praktisi yang mendukung kurikulum pelatihan BNN.
8. Serta berbagai Praktisi Profesional: Berperan aktif dalam memberikan materi sesuai dengan kebutuhan spesifik kurikulum pelatihan.

### **Dampak Positif dan Prospek Ke Depan**

Melalui berbagai kegiatan ini, PPSDM BNN berhasil menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan BNN. Fokus pada penguatan kompetensi intelijen tidak hanya meningkatkan kapabilitas individu, tetapi juga memperkuat sinergi dalam mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Kolaborasi dengan AFP, DEA, UNODC, serta berbagai instansi dalam negeri seperti LAN RI, ANRI, dan Kemenlu diharapkan terus berkembang, menciptakan inovasi program pelatihan yang relevan dengan dinamika global. Selain itu, peningkatan jumlah peserta pelatihan dari tahun ke tahun mencerminkan komitmen PPSDM BNN dalam menyediakan akses pengembangan kompetensi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tahun 2024 menjadi tahun yang penuh tantangan sekaligus peluang bagi PPSDM BNN. Dengan fokus pada penguatan intelijen dan kolaborasi strategis, PPSDM telah

menunjukkan perannya sebagai pusat pengembangan kompetensi yang relevan dan progresif. Langkah ini tidak hanya mendukung visi BNN dalam P4GN, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga masa depan Indonesia yang bebas dari ancaman narkoba.



#### A. AKREDITASI/RELISENSI

PPSDM BNN kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelatihan dan sertifikasi profesi. Melalui pencapaian penting berupa akreditasi Program Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS serta pelaksanaan relisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BNN.

NO	NAMA KEGIATAN	NILAI	NOMOR SURAT
1	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan	Terakreditasi	2210/K.1/PDP.09
2	Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Admininstrator	B	2210/K.1/PDP.09
3	Akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS	A	KEP LAN NO 522/K.1/PDP.09/2024
4	Relisensi LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) BNN	MEMENUHI	BNSP-LSP-1448-ID

#### B. PENGEMBANGAN KOMPETENSI

NO	NAMA KEGIATAN PELATIHAN	PESERTA				
		PUSAT	BNNP	BNNK	BALAI/LOKA	LUAR
1	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	7	5	18		
2	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	7	11	22		
3	Orientasi Nilai dan Etika bagi PPPK		3	27		
4	Pelatihan TPPU 2024	6	27			5

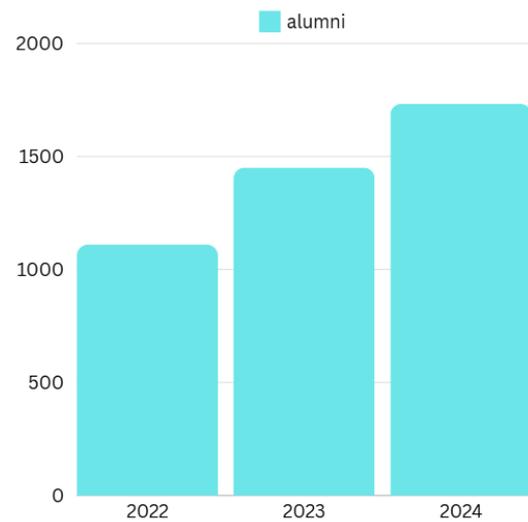
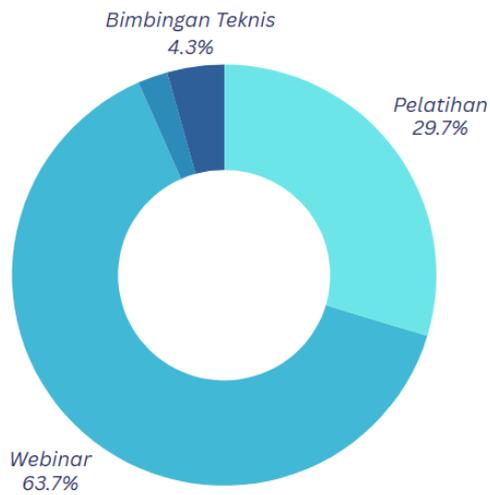
NO	NAMA KEGIATAN PELATIHAN	PESERTA				
		PUSAT	BNNP	BNNK	BALAI/ LOKA	LUAR
5	Pelatihan Analisis Intelijen	6	34			
6	Pelatihan Teknis Pencegahan (Komunikasi Bagi Penyuluh)		40			
7	Pelatihan Teknis Dayamas (Deteksi Dini melalui Test Urine Uji Narkoba) Angkatan 1	25				
8	Pembekalan Uji Sertifikasi Kompetensi Konselor Adiksi	1	31	62	12	19
9	Pelatihan Pembentukan Petugas Analisis Intelijen BNN	14	16			
10	Pelatihan Teknis Kerja Sama	20	19	1		
11	Pelatihan Teknis Penyusunan Peraturan Badan	40				
12	Pelatihan Manajemen Talenta	36				
<b>JUMLAH</b>		<b>162</b>	<b>186</b>	<b>130</b>	<b>12</b>	<b>24</b>
<b>TOTAL</b>		<b>514</b>				

### C. STANDARISASI DAN SERTIFIKASI, BIMTEK, DAN WORKSHOP

NO	NAMA KEGIATAN	OUTPUT	METODE UJIKOM
1	Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Konselor Adiksi	8	Wawancara, Tes Tulis Esai (Studi Kasus) dan Uji Portofolio
2	Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi	1	Wawancara, Tes Tulis dan Uji Portofolio
3	Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi	38	Wawancara dan Tes Tulis serta menulis esai
4	Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Penata Laboratorium	1	Wawancara
<b>JUMLAH</b>		<b>48</b>	
<b>WEBINAR</b>			
NO	NAMA KEGIATAN	OUTPUT	METODE PELATIHAN
1	Judi Online: Makin Fenomenal, Makin Kena Mental	179	Virtual
2	Corporate University dalam pengembangan kompetensi ASN	143	Virtual
3	Peran Nilai BerAKHLAK dalam mewujudkan Birokrasi Bersih dan Melayani	226	Virtual
4	Bebas Stres Burnout: Tips Mencapai Work Life Balance di BNN	305	Virtual
5	Future Life with AI	251	Virtual
<b>JUMLAH</b>		<b>1104</b>	
<b>SEMINAR/WORKSHOP</b>			
NO	NAMA KEGIATAN	OUTPUT	METODE PELATIHAN

1	Digging Deeper: Narcotics Analyst Workshop Gel I	20	Tatap Muka
2	Digging Deeper: Narcotics Analyst Workshop Gel II	20	Tatap Muka
<b>JUMLAH</b>		<b>40</b>	
<b>BIMBINGAN TEKNIS</b>			
1	Bimbingan Teknis Arsip Digital Angkatan I	30	Virtual
2	Bimbingan Teknis Arsip Digital Angkatan II	45	Virtual
<b>JUMLAH</b>		<b>75</b>	

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI



## IX. PENGUATAN KELEMBAGAAN

### A. SEKRETARIAT UTAMA

#### 1. BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETTAMA BNN

##### a. TOP GPR Award 2024 dari GPR Institute



Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau BNN RI kembali mencatatkan prestasi dengan meraih penghargaan TOP GPR Award 2024 dari GPR Institute.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan BNN RI dalam menjalankan program Government Public Relations (GPR) yang efektif dan inovatif, serta kontribusinya dalam membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.

TOP GPR Award merupakan ajang penghargaan yang menilai dan mengapresiasi instansi pemerintah yang berhasil menjalankan komunikasi publik secara optimal.

Penghargaan ini menilai berbagai aspek, yaitu Digital Awareness Aspect, Digital Media dan Website Aspect serta Social Media Aspect. BNN RI, dengan dedikasinya dalam memerangi narkoba dan obat-obatan terlarang, telah membuktikan keunggulannya dalam semua aspek tersebut.

Berdasarkan hasil penilaian TOP GPR Index 2024, dalam 1 tahun terakhir ada lebih dari 115 ribu ulasan mengenai BNN di internet, dan dicari oleh rata-rata 40 ribu pengguna internet tiap bulannya. Di berbagai media online, BNN telah diberitakan sebanyak 41 ribu kali dalam 1 tahun terakhir dan halaman website resminya dikunjungi sebanyak 200 ribu pengunjung tiap bulannya

- b. Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah berhasil meraih predikat sebagai Badan Publik Informatif dalam kategori Instansi Vertikal Pusat Tahun 2024. Prestasi ini diberikan dalam ajang Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kepatuhan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur. Pengakuan ini menjadi salah satu capaian penting di bidang kehumasan, yang menunjukkan komitmen Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat, sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi public.

Capaian ini tidak hanya menegaskan keberhasilan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi juga memperkuat peran strategis kehumasan dalam

membangun citra positif instansi. Dengan meraih predikat tersebut, instansi ini diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung program rehabilitasi dan pemberantasan narkoba. Keberhasilan ini menjadi motivasi bagi instansi lain untuk lebih memprioritaskan transparansi informasi guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai program pemerintah.



## 2. BIRO KEUANGAN SETTAMA BNN

Di era digital yang terus berkembang, transformasi sistem keuangan menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan, terutama dalam mendukung program-program strategis pemerintah. Salah satu inovasi yang menjadi motor penggerak dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih efektif, efisien, dan transparan adalah Cash Management System atau CMS.

CMS merupakan sebuah layanan yang diterbitkan oleh perbankan untuk mendukung pelaksanaan program non-tunai yang dicanangkan pemerintah. Melalui CMS, instansi pemerintah, lembaga swasta, maupun organisasi lainnya dapat menjalankan transaksi keuangan dengan lebih cepat, aman, dan terintegrasi.

Di tahun 2024 ini, BNN RI berhasil meraih peringkat III pada penghargaan IKPA Awards sebagai Lembaga dengan jumlah transaksi CMS terbanyak Cluster Pagu Besar. Hal ini membuktikan bahwa BNN turut bertransformasi dalam proses digitalisasi keuangan negara. Penghargaan ini menjadi Langkah awal BNN untuk terus berinovasi pada bidang perbendaharaan negara.



## 3. BIRO PERENCANAAN SETTAMA BNN

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) berhasil meraih penghargaan atas pencapaian luar biasa dalam penilaian **Indeks Perencanaan**

**Pembangunan Nasional (IPPN) Kementerian/Lembaga Tahun 2024.** Dengan skor sebesar **96,46**, BNN RI memperoleh predikat "**Sangat Baik**" menegaskan komitmen institusi dalam menyusun perencanaan pembangunan berbasis dampak (*outcome*). Capaian ini menunjukkan tingginya kualitas perencanaan yang dihasilkan, yang tidak hanya memenuhi standar teknis tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait, khususnya dalam upaya penanggulangan narkoba secara holistik dan terukur.

Pencapaian ini merupakan wujud nyata dari upaya BNN RI untuk terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam merancang program-program strategis yang berorientasi pada hasil. Dengan mematuhi pedoman perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan, BNN RI berhasil menunjukkan dedikasi terhadap reformasi birokrasi yang berdampak luas. Pengakuan ini diharapkan semakin memotivasi BNN RI untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas perencanaan di masa mendatang, guna mewujudkan visi Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

#### 4. BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ORGANISASI (SDMAO) SETTAMA BNN

- a) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) menerima penghargaan dari Universitas Indonesia atas dukungan dan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pendidikan di Universitas Indonesia. Penghargaan yang diberikan pada 31 Oktober 2024 ini menjadi bukti nyata komitmen BNN RI dalam mendukung pengembangan generasi muda melalui kerja sama strategis di bidang pendidikan. Berbagai program yang telah dijalankan, seperti penyuluhan antinarkoba, pelatihan, dan kolaborasi akademik, turut memperkuat kualitas pendidikan di lingkungan Universitas Indonesia, sekaligus membangun kesadaran generasi muda untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba.

Pengakuan ini merupakan hasil dari sinergi yang terjalin erat antara BNN RI dan Universitas Indonesia dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan kondusif. Dengan penghargaan ini, BNN RI berharap dapat terus memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung institusi pendidikan di seluruh Indonesia, sehingga generasi penerus bangsa tidak hanya memiliki kompetensi akademik yang unggul tetapi juga kesadaran tinggi akan pentingnya menjaga kesehatan fisik, mental, dan moral. Penghargaan ini menjadi dorongan bagi BNN RI untuk melanjutkan upaya kolaboratif dalam mendukung pendidikan yang bermutu dan berintegritas.



- b) Pada 19 April 2024, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) melaksanakan program pembinaan rohani bagi 19 orang Pejabat Tinggi Madya dan Pratama melalui program ibadah haji. Program ini mencerminkan komitmen

BNN RI dalam mendukung kebutuhan rohani pegawai, sekaligus memperkuat nilai-nilai keimanan dan integritas di lingkungan kerja. Melalui program ini, diharapkan para peserta dapat membawa dampak positif dalam pelaksanaan tugas mereka di masa mendatang.

- c) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) terus berkomitmen mengembangkan kapasitas sumber daya manusia melalui program beasiswa pascasarjana di Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Peminatan Kajian Penanganan Narkoba, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Program ini telah berlangsung sejak tahun 2009, dengan jumlah peserta yang bervariasi setiap tahunnya.

Hingga tahun 2023, sebanyak 173 pegawai BNN RI telah mengikuti program ini, dengan rincian 27 orang pada tahun 2009, 2013, dan 2015; 23 orang pada tahun 2011; 30 orang pada tahun 2017; serta masing-masing 13 orang pada tahun 2019, 2021, dan 2023. Total pegawai yang telah berhasil lulus dan meraih gelar S-2 sebanyak 160 orang dan 13 orang lainnya masih menjalankan program studi S-2 nya hingga saat ini.

Program beasiswa ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas analitis dan strategis pegawai BNN RI dalam menghadapi tantangan penanganan narkoba yang semakin kompleks. Melalui pendidikan lanjutan ini, diharapkan para pegawai dapat berkontribusi lebih optimal dalam merumuskan kebijakan berbasis data, inovasi program, dan pendekatan strategis yang berdampak nyata. Keberlanjutan program ini menjadi bukti nyata dedikasi BNN RI dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, sejalan dengan visi untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

## 5. BIRO UMUM SETTAMA BNN

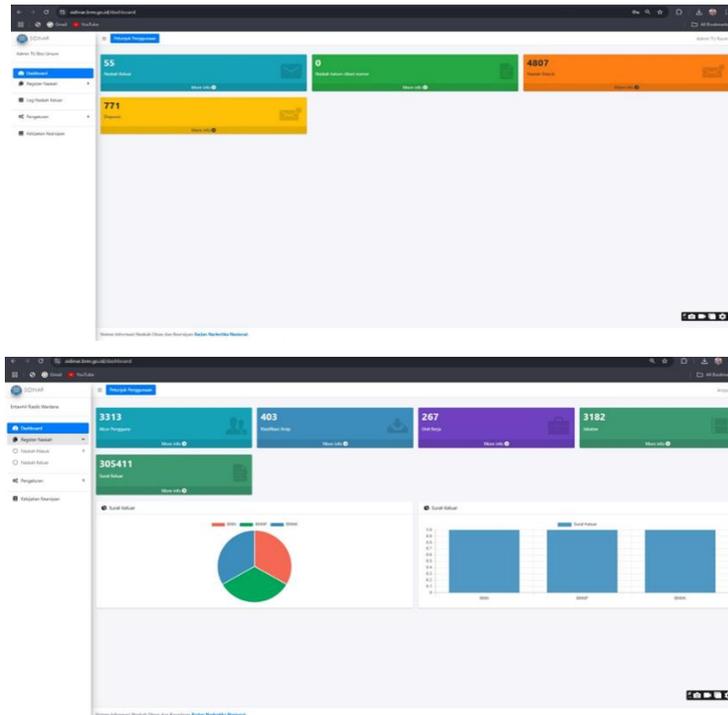
- a) Sistem Informasi Naskah Dinas dan Kearsipan (SIDINAR)

Seiring dengan perkembangan zaman di era digital, maka aktifitas instansi yang meliputi administrasi perkantoran (persuratan) perlu melakukan upaya dan terobosan untuk menyesuaikan dengan tuntutan perubahan yang menuntut adanya pelayanan publik secara transparan, cepat dan akuntabel.

Dalam upaya implementasi hal tersebut, Biro Umum Settama BNN membuat aplikasi persuratan digital SIDINAR (Sistem Informasi Naskah Dinas dan Kearsipan). Aplikasi SIDINAR ini digunakan untuk menunjang kegiatan persuratan internal BNN. Pada aplikasi SIDINAR ini terdapat fitur-fitur yang dapat memudahkan dalam mengelola proses persuratan seperti surat masuk, surat keluar dan disposisi pimpinan.

Dengan hadirnya aplikasi SIDINAR ini, tentunya dapat membantu meminimalisir masalah-masalah dalam proses persuratan, karena aplikasi SIDINAR ini memang dikembangkan secara khusus untuk membantu dan mempermudah dalam tata kelola persuratan yang ada di BNN sekaligus komitmen Badan Narkotika Nasional mendukung SPBE mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

## Gambar Aplikasi SIDINAR



### b) Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA)

GNSTA adalah upaya untuk peningkatan kesadaran lembaga negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan melalui aspek kebijakan, organisasi, sumber daya kearsipan, prasarana dan sarana, pengelolaan arsip serta pendanaan kearsipan.

Pada tanggal 6 Agustus 2024, Biro Umum Settama BNN menyelenggarakan kegiatan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip dan pengucapan komitmen bersama Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) oleh seluruh peserta yang hadir, baik secara luring maupun daring. Komitmen tersebut merupakan bentuk keseriusan BNN dalam membangun tata kelola arsip yang tertib guna mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi.

Pengelolaan arsip yang tertib melalui penyimpanan dan kemudahan akses informasi merupakan bukti akuntabilitas sekaligus bentuk pertanggungjawaban instansi atau lembaga dalam penyelenggaraan negara.





c) Penghargaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Badan Narkotika Nasional berhasil meraih penghargaan Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Level 3 (Proaktif) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI atas pencapaiannya memenuhi kelengkapan atribut pada sembilan variabel (9/9).

Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan bahwa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. UKPBJ diamanatkan untuk melaksanakan peningkatan kapabilitas melalui Model Kematangan UKPBJ minimal Proaktif dalam rangka menuju Pusat Keunggulan PBJ.

Pencapaian Kematangan UKPBJ Proaktif menunjukkan bahwa UKPBJ sudah memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan(stakeholder) melalui kolaborasi internal maupun eksternal.

Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Level 3 (Proaktif) juga merupakan salah satu indikator dalam penilaian Reformasi Birokrasi (RB) Penguatan Pengadaan Barang/Jasa yang dinilai oleh LKPP dalam Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP). Dengan pencapaian ini, maka nilai ITKP akan meningkat serta memudahkan BNN untuk mencapai predikat ITKP minimal "Baik" pada tahun tahun berikutnya.



e) Penghargaan Anugerah Reksa Bandha

Anugerah Reksa Bandha merupakan perubahan dan penggabungan dari kegiatan BMN Award dan Lelang Award yang pernah digelar pada tahun-tahun sebelumnya. Penghargaan Anugerah Reksa Bandha terdiri dari 5 kategori penghargaan di bidang pengelolaan BMN dan 4 kategori di bidang lelang.

Penghargaan di bidang pengelolaan aset yang diberikan setiap tahun kepada K/L yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan BMN, dengan persyaratan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan. Kategori apresiasi kepada K/L terbagi menjadi tiga kelompok berdasarkan jumlah satuan kerja (satker). Kelompok I adalah K/L yang mempunyai 1-10 satker, kelompok II adalah K/L yang mempunyai 10-100 satker, dan kelompok III adalah K/L yang mempunyai lebih dari 100 satker.

Penghargaan di bidang lelang merupakan bentuk apresiasi kepada para insan lelang Indonesia, yang telah berkontribusi dalam penerimaan negara dari sektor lelang. Selain itu, apresiasi ini juga diberikan pada insan lelang Indonesia yang telah memasyarakatkan lelang kepada masyarakat termasuk kepada UMKM dan penghargaan kepada stakeholders dari sektor perbankan maupun non perbankan yang telah berperan penting dalam perekonomian negara.



## B. INSPEKTORAT UTAMA

### 1. Penetapan APIP Penelaah dan Ditelaah APIP Ekstern Semester I 2024

**Kegiatan Telaah Sejawat Ekstern** adalah proses evaluasi independen yang dilakukan oleh auditor atau aparat pengawasan dari luar suatu organisasi (pihak eksternal) untuk menilai kualitas, efektivitas, dan kepatuhan pelaksanaan pengawasan internal (APIP) terhadap standar yang berlaku. Telaah ini bertujuan untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan internal dilakukan secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan serta pedoman kerja.

Kegiatan Telaah Sejawat Ekstern bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui evaluasi yang dilakukan oleh tim independen dari luar organisasi. Telaah sejawat ekstern biasanya dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan di suatu instansi. Sesuai dengan surat Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor: 18/AAIPI/KTS/IV/2024 tanggal 5 April 2024 perihal Penetapan APIP Penelaah dan Ditelaah APIP Ekstern Semester I 2024, sesuai dengan surat dari AAIPI tersebut Inspektorat Utama BNN ditunjuk untuk Menelaah Inspektorat Badan Informasi Geospasial.

**AAIPI** ASSOSIASI AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA  
**KOMITE TELAHAH SEJAWAT**  
 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
 Jalan Patimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Nomor : 18/AAIPI/KTS/IV/2024 Jakarta, 5 April 2024  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : 3 (tiga) lembar  
 Hal : Penetapan APIP Penelaah dan Ditelaah Telaah Sejawat Ekstern DPN AAIPI Semester I Tahun 2024

Yth. (Daftar Terlampir) di Tempat

Menindaklanjuti:

- Peraturan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) AAIPI Nomor KEP-43/AAIPI/DPN/2019 Tanggal 31 Juli 2019 Tentang Pedoman Telaah Sejawat Ekstern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- Surat Ketua Komite Telaah Sejawat DPN AAIPI Nomor 4/AAIPI/KTS/IV/2024 Tanggal 24 Januari 2024 Hal Pelaksanaan Telaah Sejawat Ekstern DPN AAIPI Tahun 2024;
- Surat Ketua Komite Telaah Sejawat DPN AAIPI Nomor 14/AAIPI/KTS/III/2024 Tanggal 25 Maret 2024 Hal Permintaan Konfirmasi Kesediaan untuk menjadi APIP Penelaah dalam Telaah Sejawat Ekstern (TSE) Semester I Tahun 2024;
- Surat Kesediaan menjadi APIP Penelaah dari pimpinan APIP KLUD,

bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Ditetapkan APIP Penelaah dan APIP yang Ditelaah pada Semester I Tahun 2024:

No.	Usulan APIP Penelaah	APIP yang Ditelaah
1.	Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2.	Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN)	Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
3.	Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
4.	Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional	Inspektorat Badan Informasi Geospasial
5.	Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Inspektorat Lembaga Ketahanan Nasional
6.	Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Inspektorat Komite Pemberantasan Korupsi
7.	Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan	Satuan Pengawasan Intern LPP TVRI
8.	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara
9.	Inspektorat Provinsi Bali	Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah
10.	Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	Inspektorat Provinsi Banten
11.	Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau	Inspektorat Provinsi Aceh

2. Mekanisme pelaksanaan TSE:
- Pelaksanaan TSE mengacu pada Keputusan Ketua Umum DPN AAIPI Nomor KEP-43/AAIPI/DPN/2019 Tanggal 31 Juli 2019 Tentang Pedoman Telaah Sejawat Ekstern APIP (dapat diunduh pada tautan <https://bit.ly/BahanTSE>);
  - Jadwal TSE berdasarkan kesepakatan antara APIP Penelaah dan APIP yang Ditelaah, dan paling lambat diselesaikan pada tanggal 31 Mei 2024;
  - Surat Tugas Penelaah diterbitkan oleh APIP Penelaah dan disampaikan kepada APIP yang Ditelaah dengan tembusan kepada Ketua Komite Telaah Sejawat DPN AAIPI;
  - Susunan Tim Penelaah yaitu:
    - Penanggung Jawab/Pengendali Mutu;
    - Pengendali Teknis;
    - Ketua Tim; dan
    - Anggota
 Personil yang ditugaskan sebagai Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota merupakan Pejabat Fungsional Auditor.
  - Kualifikasi dan kompetensi Tim Penelaah:
    - Objektif dan independen;
    - Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dalam pengawasan intern yang ditandai dengan sertifikasi seperti JFA, QIA, dan/atau CIA;
    - Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman terkait proses *Quality Assurance and Improvement Program* (QAIP) yang ditandai dengan sertifikat bimbingan teknis/workshop/pelatihan terkait kegiatan TSE;
    - Memiliki kemampuan komunikasi dan analisis yang baik; dan
    - Memiliki pengetahuan yang memadai terkait area kerja yang ditelaah.
  - APIP Penelaah menribarkan Berita Acara Hasil TSE Sementara dan disampaikan kepada APIP yang Ditelaah untuk dilakukan pembahasan;
  - APIP Penelaah mengusulkan *Quality Control* (QC) kepada Ketua Komite Telaah Sejawat DPN AAIPI dengan melampirkan Berita Acara Hasil TSE Sementara;
  - Tim QC menribarkan Berita Acara QC sebagai dasar penyusunan Laporan Hasil TSE oleh APIP Penelaah;
  - Anggaran pelaksanaan TSE dibebankan pada APIP Penelaah;
  - Untuk kelancaran proses TSE, APIP yang Ditelaah agar menyiapkan dokumen sebagaimana tercantum pada Lampiran;
  - Koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Komite Telaah Sejawat DPN AAIPI Sdr. Lenny Febriana (nomor selular 0813-1646-7015).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Telaah Sejawat,  
  
 I. T. Iskandar, M.T., CGCIA

- Tembusan:
- Ketua Umum DPN AAIPI;
  - Direktur Eksekutif DPN AAIPI;
  - Wakil Ketua I Komite Telaah Sejawat DPN AAIPI;
  - Wakil Ketua II Komite Telaah Sejawat DPN AAIPI;
  - Sekretaris Komite Telaah Sejawat DPN AAIPI.

### 2. Mekanisme ...

**AAIPI** ASSOSIASI AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA  
**KOMITE TELAHAH SEJAWAT**  
 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
 Jalan Patimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Nomor : 18/AAIPI/KTS/IV/2024 Jakarta, 5 April 2024  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : 3 (tiga) lembar  
 Hal : Penetapan APIP Penelaah dan Ditelaah Telaah Sejawat Ekstern DPN AAIPI Semester I Tahun 2024

Yth. (Daftar Terlampir) di Tempat

Menindaklanjuti:

- Peraturan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) AAIPI Nomor KEP-43/AAIPI/DPN/2019 Tanggal 31 Juli 2019 Tentang Pedoman Telaah Sejawat Ekstern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- Surat Ketua Komite Telaah Sejawat DPN AAIPI Nomor 4/AAIPI/KTS/IV/2024 Tanggal 24 Januari 2024 Hal Pelaksanaan Telaah Sejawat Ekstern DPN AAIPI Tahun 2024;
- Surat Ketua Komite Telaah Sejawat DPN AAIPI Nomor 14/AAIPI/KTS/III/2024 Tanggal 25 Maret 2024 Hal Permintaan Konfirmasi Kesediaan untuk menjadi APIP Penelaah dalam Telaah Sejawat Ekstern (TSE) Semester I Tahun 2024;
- Surat Kesediaan menjadi APIP Penelaah dari pimpinan APIP KLUD,

bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Ditetapkan APIP Penelaah dan APIP yang Ditelaah pada Semester I Tahun 2024:

No.	Usulan APIP Penelaah	APIP yang Ditelaah
1.	Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2.	Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN)	Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
3.	Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
4.	Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional	Inspektorat Badan Informasi Geospasial
5.	Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Inspektorat Lembaga Ketahanan Nasional
6.	Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Inspektorat Komite Pemberantasan Korupsi
7.	Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan	Satuan Pengawasan Intern LPP TVRI
8.	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara
9.	Inspektorat Provinsi Bali	Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah
10.	Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	Inspektorat Provinsi Banten
11.	Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau	Inspektorat Provinsi Aceh

2. Mekanisme pelaksanaan TSE:
- Pelaksanaan TSE mengacu pada Keputusan Ketua Umum DPN AAIPI Nomor KEP-43/AAIPI/DPN/2019 Tanggal 31 Juli 2019 Tentang Pedoman Telaah Sejawat Ekstern APIP (dapat diunduh pada tautan <https://bit.ly/BahanTSE>);
  - Jadwal TSE berdasarkan kesepakatan antara APIP Penelaah dan APIP yang Ditelaah, dan paling lambat diselesaikan pada tanggal 31 Mei 2024;
  - Surat Tugas Penelaah diterbitkan oleh APIP Penelaah dan disampaikan kepada APIP yang Ditelaah dengan tembusan kepada Ketua Komite Telaah Sejawat DPN AAIPI;
  - Susunan Tim Penelaah yaitu:
    - Penanggung Jawab/Pengendali Mutu;
    - Pengendali Teknis;
    - Ketua Tim; dan
    - Anggota
 Personil yang ditugaskan sebagai Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota merupakan Pejabat Fungsional Auditor.
  - Kualifikasi dan kompetensi Tim Penelaah:
    - Objektif dan independen;
    - Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dalam pengawasan intern yang ditandai dengan sertifikasi seperti JFA, QIA, dan/atau CIA;
    - Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman terkait proses *Quality Assurance and Improvement Program* (QAIP) yang ditandai dengan sertifikat bimbingan teknis/workshop/pelatihan terkait kegiatan TSE;
    - Memiliki kemampuan komunikasi dan analisis yang baik; dan
    - Memiliki pengetahuan yang memadai terkait area kerja yang ditelaah.
  - APIP Penelaah menribarkan Berita Acara Hasil TSE Sementara dan disampaikan kepada APIP yang Ditelaah untuk dilakukan pembahasan;
  - APIP Penelaah mengusulkan *Quality Control* (QC) kepada Ketua Komite Telaah Sejawat DPN AAIPI dengan melampirkan Berita Acara Hasil TSE Sementara;
  - Tim QC menribarkan Berita Acara QC sebagai dasar penyusunan Laporan Hasil TSE oleh APIP Penelaah;
  - Anggaran pelaksanaan TSE dibebankan pada APIP Penelaah;
  - Untuk kelancaran proses TSE, APIP yang Ditelaah agar menyiapkan dokumen sebagaimana tercantum pada Lampiran;
  - Koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Komite Telaah Sejawat DPN AAIPI Sdr. Lenny Febriana (nomor selular 0813-1646-7015).
- Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
- Ketua Komite Telaah Sejawat,  
  
 I. T. Iskandar, M.T., CGCIA
- Tembusan:
- Ketua Umum DPN AAIPI;
  - Direktur Eksekutif DPN AAIPI;
  - Wakil Ketua I Komite Telaah Sejawat DPN AAIPI;
  - Wakil Ketua II Komite Telaah Sejawat DPN AAIPI;
  - Sekretaris Komite Telaah Sejawat DPN AAIPI.



## Dokumentasi

## Telaah Sejawat antara Inspektorat Utama BNN dengan Inspektorat BIG

15 s.d 30 Mei 2024



## 2. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inspektorat Utama BNN dengan Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Inspektorat Utama BNN memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN melalui Perjanjian Kerja Sama dalam rangka mendukung Penguatan Pengawasan Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sebagai salah satu bentuk Pengawasan Internal, Inspektorat Utama melaksanakan Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) SPBE dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.

Melalui PKS ini, diharapkan BRIN dapat melakukan pendampingan serta pengembangan kompetensi dalam melaksanakan Audit TIK SPBE yang hasilnya dapat mendukung digital government yang partisipatif, kolaboratif, berkelanjutan, dan efektif.

Kolaborasi ini juga merupakan cermin dari semangat gotong royong dan sinergi antar lembaga pemerintah dalam menjawab tantangan zaman. Kerja sama yang baik dan

berkelanjutan adalah kunci keberhasilan dalam melaksanakan amanah publik dan memenuhi harapan masyarakat.

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh Inspektur Utama BNN (Drs. Wahyno, M.H., CFA., CGCAE) dan Deputy Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN (Dr. Mego Pinandito, M.Eng) serta dihadiri dan disaksikan oleh Kepala BNN RI dan dilaksanakan di Ruang Moh. Hatta Gedung BNN RI Lt. 7 Cawang Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 19 September 2024. Dokumentasi

#### Dokumentasi

PKS antara Inspektorat Utama BNN dengan Deputy Bidang Kebijakan Pembangunan  
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

19 September 2024



### 3. Inovasi Pengaduan Masyarakat di lingkungan BNN

Inspektorat Utama BNN melakukan *Quality Assurance* dalam bentuk inovasi Pengaduan masyarakat melalui *drop box* BNN adalah salah satu bentuk partisipasi/pelayanan publik pada bidang pengawasan dan peningkatan transparansi pemerintahan. Namun, tidak semua masyarakat ataupun pegawai memiliki akses mudah ke saluran pengaduan berbasis teknologi atau formal. Inovasi melalui *drop box* BNN memberikan alternatif sederhana dan inklusif untuk menampung pengaduan.

*Drop box* BNN adalah wadah fisik yang ditempatkan di lokasi strategis untuk menampung pengaduan tertulis dari masyarakat atau pegawai sehingga dapat mempermudah dalam menyampaikan keluhan, saran, atau laporan serta menjamin anonimitas pelapor yang mungkin merasa lebih nyaman menyampaikan pengaduan secara tertulis tanpa merasa takut terhadap tekanan atau konsekuensi dan membuka peluang lebih luas bagi masyarakat atau pegawai untuk ikut serta dalam pengawasan serta perbaikan layanan publik.



#### 4. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI

Tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kementerian/Lembaga (K/L) adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memastikan laporan keuangan K/L menyajikan informasi secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dengan mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 15 oleh BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) Tahun 2023, maka BNN akan lebih mudah memperoleh kepercayaan terhadap publik, meningkatkan rating dan citra positif pada *stakeholder*, mendorong pencapaian visi dan misi pemerintah, serta menjadi cerminan akuntabilitas atas tata kelola keuangan yang baik. Inspektorat Utama BNN berperan penting sebagai *Quality Assurance* Pemerintah dalam pencapaian visi dan misi dengan memastikan adanya “*Good Governance*” pada BNN.

## Dokumentasi Penyerahan Opini WTP BPK-RI

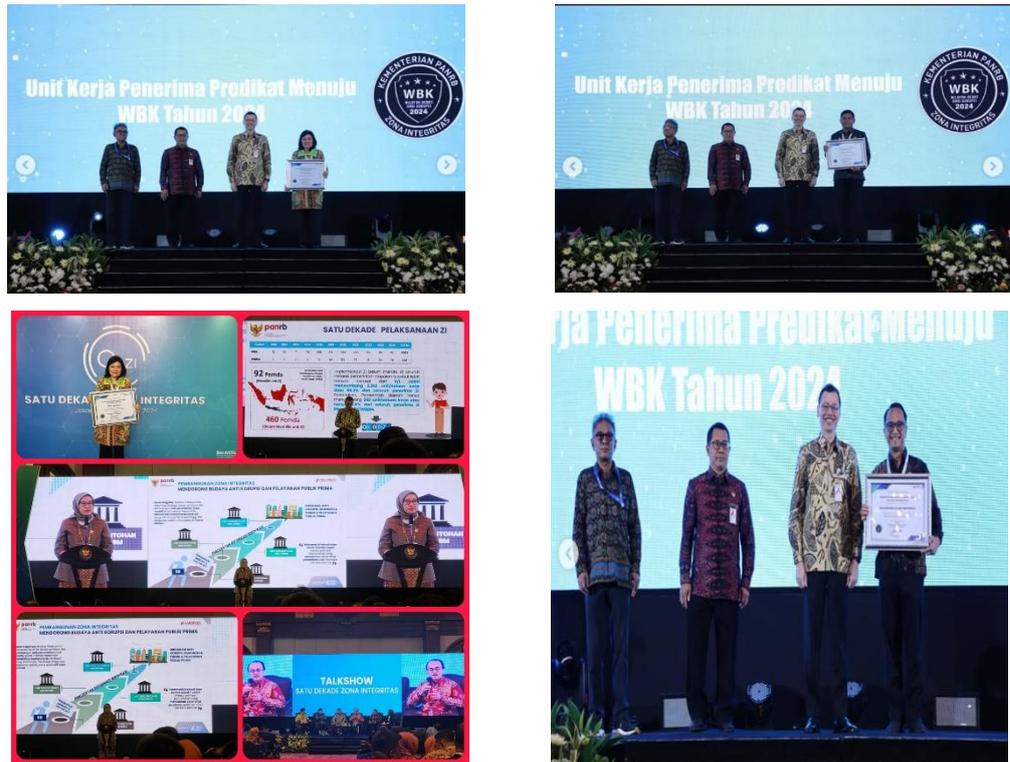


### 5. Jumlah Satuan Kerja Yang mendapatkan predikat WBK/WBBM

Penerapan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bertujuan untuk membangun budaya kerja yang bersih, profesional, dan berintegritas tinggi di lingkungan instansi pemerintah. Ini diwujudkan melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan langkah-langkah nyata untuk mencegah segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Zona Integritas menuju WBK merupakan upaya konkret pemerintah dalam mendorong terciptanya birokrasi yang bersih dan melayani demi keberlanjutan pembangunan yang adil dan berkeadilan.

Inspektorat Utama BNN mempunyai peran sebagai Fasilitator Pembangunan Zona Integritas (ZI) perihal merancang, menyosialisasikan, dan mengimplementasikan langkah-langkah untuk membangun ZI, serta bimbingan teknis kepada satuan kerja terkait indikator dan strategi pencapaian WBK. Dengan peran ini, Inspektorat Utama menjadi pilar penting dalam mendukung pencapaian Zona Integritas menuju WBK di instansi pemerintah. Penghargaan WBK diberikan kepada Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, BNN Kota Denpasar, dan BNN Kabupaten Purbalingga. Penghargaan ini merupakan hasil dari komitmen yang berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan pelayanan publik, sebagai bagian dari upaya mendukung Indonesia bersih narkoba dan korupsi.

## Dokumentasi Penyerahan Penghargaan WBK Kepada 3 Satuan Kerja di Badan Narkotika Nasional



### 6. Data Hukuman Disiplin Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

Hukuman disiplin pegawai adalah sanksi yang diberikan kepada pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional baik itu dari Kepolisian (Polri), Pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai lainnya yang melanggar ketentuan dan peraturan disiplin dalam lingkungan kerja. Tujuannya adalah menjaga kedisiplinan, integritas, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, khususnya mengingat fungsi strategis BNN dalam pemberantasan narkoba.

Penegakan disiplin di BNN menjadi cerminan dari komitmen lembaga dalam memberantas penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh. Hukuman disiplin yang diterapkan secara adil dan transparan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Berikut adalah rincian data hukuman disiplin pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional dari tahun 2022 s/d 2024, sebagai berikut:

NO	JENIS PELANGGARAN	2022	2023	2024
1.	Kode Etik	29	21	17
2.	Disiplin	10	14	7
3.	Pidana	0	3	1
4.	Lain-lain	3	4	8
<b>TOTAL</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	<b>33</b>